



SINERGI

Deptan
dengan

Komisi IV DPR RI

Ir Anton Apriyantono, MS

HZ Arifin Junaidi



Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian

SINERGI

Deptan
dengan
Komisi IV DPR RI



SINERGI

Deptan
dengan
Komisi IV DPR RI

Ir Rusdiono
Ir Ahmad Soim



Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian



Sinergi Deptan dengan Komisi IV DPR RI

xvi + 152; 14,5 X 21 cm
ISBN 978-979-99015-1-4

Cetakan Pertama, November 2008

Penulis: Ir Rusdiono dan Ir Ahmad Soim

Editor: Lina Najwa

Tata-letak & Desain Cover: Rudy Priyatno

Diterbitkan oleh:

Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian

Copyright © DEPARTEMEN PERTANIAN RI, 2008



Kata Pengantar

Menteri Pertanian RI

Penerbitan buku **Sinergi Deptan dengan Komisi IV DPR RI** ini saya nilai cukup bagus. Buku ini tidak hanya menyoroti substansi pertanian, tapi juga bagaimana pola-pola hubungan antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI yang antara lain membidangi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Hubungan Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI sangat baik walau melalui proses yang panjang. Proses yang berliku dan penuh dinamika. Namun semua itu demi menghadirkan program-program pembangunan di bidang pertanian yang mampu memperbaiki keadaan: Peningkatan kesejahteraan rakyat dan Pengu-rangan kemiskinan.

Antara Departemen Pertanian dan Komisi IV saling menunjang dan bisa saling memahami, walaupun untuk mengarah ke sana dinamikanya luar biasa. Ada pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan yang tidak hanya formal, tapi juga informal. Bahkan pendekatan personal. Tapi saya kira itu semua sebagai hal yang lumrah di dalam proses bernegara.

Kita tidak menutup mata bahwa apapun yang kita lakukan tentu banyak hal yang harus disempurnakan. DPR yang berfungsi legislasi, pengawasan dan budget, jelas membantu kita karena pengawasan kita terbatas. Semua kritik anggota Dewan dijadikan bahan untuk memperbaiki program kita yang akan datang.

Kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa dijadikan pelajaran bagi generasi yang akan datang. Karena itu, sekali lagi, saya menyambut baik atas diterbitkannya buku ini.

Penerbitan buku ini sangat bermanfaat untuk dapat menyinergikan dan menyatukan persepsi antara Deptan dengan Komisi IV DPR RI dalam pengembangan dan pembangunan sector pertanian untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta, 13 Oktober 2008
Menteri Pertanian RI



Dr Ir Anton Apriyantono, MS



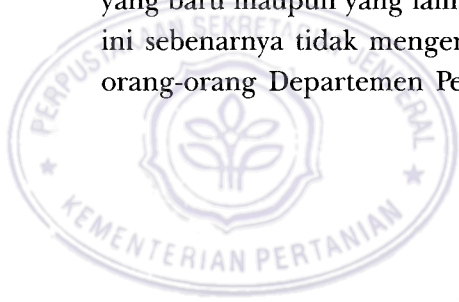
Kata Pengantar

Ketua Komisi IV DPR RI

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku **Sinergi Deptan dengan Komisi IV DPR RI**. Buku ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang kurang dari hubungan antara Komisi IV dengan Departemen Pertanian bisa diperbaiki. Dan yang sudah baik supaya bisa ditingkatkan lagi.

Buku ini sangat bermanfaat, bukan saja bagi Departemen Pertanian dan para pejabatnya. Misalnya saja jika ada teman-teman dari Departemen Pertanian yang tidak mengerti siklus anggaran, dengan membaca buku ini akan menjadi mengetahui. Atau mereka yang tidak mengetahui bagaimana sebuah undang-undang (UU) itu dilahirkan, dengan membaca buku ini mereka bisa paham. Jadi jika suatu saat mereka menjadi pejabat, mereka sudah mengetahui bagaimana hubungan antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI.

Sebaliknya, di Komisi IV ini anggotanya sering berganti. Kalau ada buku semacam ini kami bisa belajar. Baik bagi teman-teman yang baru maupun yang lama. Karena kalau teknis pertanian kami ini sebenarnya tidak mengerti. Padahal yang kami hadapi adalah orang-orang Departemen Pertanian yang ahli pertanian. Dengan



membaca tulisan orang-orang pertanian, kami akan menjadi tahu. Kami tidak sok tahu.

Setiap periode, setiap tahun, kalau perlu ada buku semacam ini. Tidak saja sinergi antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tapi bagaimana di antara keduanya bisa menciptakan simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan.

Sinergi itu dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berbeda, tapi keduanya tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Ibarat siang dan malam, ini dua hal yang berbeda 180 derajat. Tapi tidak akan ada siang jika tidak ada malam. Dan tidak akan ada malam jika tidak ada siang. Keduanya saling membutuhkan. Antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tidak saja sinergi tapi juga simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi, selamat atas diterbitkannya buku ini.

Jakarta, 23 September 2008

Ketua Komisi IV DPR RI



HZ Arifin Junaidi



Catatan Penulis

Era reformasi ditandai dengan makin terbukanya informasi. Kini nyaris tak ada sesuatu yang tabu di negeri ini. Tak ada yang harus ditutup-tutupi. Sekarang semuanya serba blak-blakan. Era keterbukaan ini makin menemukan momentumnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum yang telah diundangkan pada 30 April 2008 ini merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi. Sebab, keterbukaan merupakan salah satu ciri kehidupan berdemokrasi.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas. Semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tak terkecuali dengan Departemen Pertanian (Deptan) dan DPR RI. Mereka harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Inilah buah reformasi.

Di era reformasi, bandul kekuasaan bergeser dari pemerintah ke DPR, khususnya dalam hal legislasi. Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 (Naskah Asli) menyebutkan: Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen): Presiden berhak mengajukan

rancangan UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU. Pergeseran kekuasaan ini menarik untuk disimak dalam implementasinya di lapangan. Benarkah DPR kini lebih berkuasa?

Pasal 20A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD 1945 (Hasil Amandemen): Undang-Undang (UU) dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Sedangkan Pasal 23 UUD 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan: Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR. Bagaimana proses sebuah UU dilahirkan? Bagaimana pula Rancangan APBN ditetapkan? Bagaimana DPR mengawasi program-program pembangunan yang telah disepakati di Senayan?

Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS, mengatakan DPR telah membantunya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan juga untuk melihat apakah program Deptan berjalan apa tidak. Seperti diketahui, Departemen Pertanian dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan nasional memiliki partner di DPR RI. Salah satu mitra itu adalah Komisi IV yang antara lain membidangi Pertanian.

Buku bertajuk Sinergi Deptan–Komisi IV DPR RI yang ada di hadapan Anda ini merupakan upaya untuk merekam jejak-jejak hubungan sinergi antara Departemen Pertanian selaku lembaga eksekutif dengan Komisi IV DPR RI selaku lembaga legislatif. Kami berharap buku ini paling tidak bisa memberikan gambaran praktik penerapan peran, tanggung jawab, fungsi, dan sinergi antara Deptan

dengan Komisi IV DPR RI.

Terima kasih kepada Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS, Sekjen Departemen Pertanian Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, SpI, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Prof Dr Ir Zaenal Bachrudin, MS, dan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian Suprahtomo, SH MH MSi, yang telah menjadi narasumber penulisan buku ini.

Juga terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPR RI HZ Arifin Junaidi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir H Suswono, MMA, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH SE MS, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hj Mahsusoh Ujiati, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Drs H Mardjono, MM PhD, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Bintang Reformasi H Rusman HM Ali, SH, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Maruahal Silalahi, yang telah menjadi narasumber penulisan buku ini.

Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada Penghubung Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Sugiyarto, SSos, dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI Basuki Usdekiawan, SSos MSi, yang banyak membantu penulis.

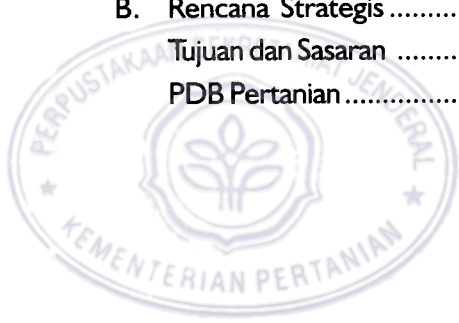
Bogor, 9 November 2008

Ir Rusdiono dan Ir Ahmad Soim



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Menteri Pertanian RI	v
Kata Pengantar Ketua Komisi IV DPR RI	vii
Catatan Penulis	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	i
A. Perlunya Sinergi	i
B. Pentingnya Pangan	3
BAB II	
TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEPTAN	13
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
B. Rencana Strategis	16
Tujuan dan Sasaran	18
PDB Pertanian	19



Provinsi Jambi. Menurut Komisi IV, upaya meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi itu menghadapi beberapa kendala. Antara lain, sarana dan prasarana pendukung belum optimal dalam mendukung pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan sarana produksi (khususnya pupuk) belum memenuhi kriteria tepat tempat, tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.

Sebelum itu, dalam pidato pengantarnya, Mentan antara lain mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk, beberapa langkah telah dilakukan. Misalnya, melakukan realokasi pupuk bersubsidi antarprovinsi, pemanfaatan cadangan pupuk urea, penambahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, mendorong peningkatan penggunaan pupuk majemuk, organik dan hayati serta memperkuat pengawasan dan meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan.

Demikianlah dinamika hubungan kerja antara Departemen Pertanian (Deptan) dengan Komisi IV DPR RI. Keduanya saling melengkapi. Saling bersinergi. Tidak hanya itu, Deptan dan Komisi IV bisa menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam bahasa Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi, Deptan dan Komisi IV merupakan dua hal yang bertolak belakang. Dua hal yang berbeda. Yang satu eksekutif, dan yang lainnya legislatif. Tapi, keduanya tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Seperti siang dan malam—keduanya berbeda 180 derajat—namun tidak akan ada siang jika tidak ada malam. Dan tidak akan ada malam jika tidak ada siang. “Keduanya saling membutuhkan,” ujar Arifin.

Karena itulah sambung Mentan, kerjasama Deptan dengan Komisi IV harus kuat. Agar apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Misalnya, keinginan untuk meningkatkan anggaran di bidang pertanian, hanya bisa terwujud melalui kerjasama dan sinergi yang kuat antara Deptan dengan Komisi IV. Bagaimana keduanya bisa menjelaskan kepada pihak-pihak terkait akan pentingnya pertanian bagi pembangunan bangsa.

Pasal 23 UUD 1945 Hasil Amandemen menyebutkan, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. “Jadi sebenarnya hak budget itu bukan hanya ada di DPR, hak budget itu bersama-sama, Pemerintah bersama-sama DPR” ujar Mentan.

Menurutnya, selama ini ada pemahaman yang salah seakan-akan hak Budget itu sepenuhnya ditentukan oleh DPR. Padahal, tidak mungkin DPR bisa menentukan keseluruhan Budget secara sendiri. Tapi dibahas bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR. Kalau misalnya ditemukan kelemahan dalam penyusunan anggaran Deptan, itu artinya Deptan dan Komisi IV harus meningkatkan lobi untuk meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa pertanian itu penting. Penting untuk mencukupi kebutuhan pangan.

B. Pentingnya Pangan

Dalam penjelasan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan: Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. “Pangan menjadi hak bagi setiap individu dan menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr H Bomer Pasaribu SH, SE, MS.

Berbicara soal pangan, mantan Menteri Tenaga Kerja RI, itu menawarkan konsep kedaulatan pangan. Bukan swasembada pangan. Kedaulatan pangan merupakan satu-satunya kedaulatan yang

melekat pada diri manusia. Baik secara individual maupun secara kolektif. Baik secara organisasional maupun tidak. “Kedaulatan pangan merupakan kedaulatan yang sudah menegara, yang tidak bisa dibandingkan dengan kedaulatan apapun. Sebab, tidak ada kehidupan tanpa pangan. Jadi, Kedaulatan pangan itu sudah *built in* dengan kehidupan manusia,” papar Bomer.

Bahkan, papar peraih gelar doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, kedaulatan pangan menempati prioritas pertama dibanding kedaulatan atau ketahanan militer, ekonomi, ketahanan sosial, politik, hukum, dan pemerintahan. Atau bahkan kedaulatan negara.

Sedangkan swasembada pangan adalah jika suatu negara mampu memproduksi setidaknya 90 persen dari kebutuhan pangannya. Tapi, di era globalisasi dan liberalisasi di mana batas antarnegara sudah mulai kabur, konsep swasembada pangan, lanjut Bomer, kini tak memadai lagi. Apalagi, dibarengi dengan tiga krisis besar yang mendera dunia saat ini: *global food crisis* (krisis pangan global), *global energy crisis* (krisis energi global), dan *global financial crisis* (krisis keuangan global). Serta krisis yang sudah terjadi sejak lama: *global climate crisis* atau *global warming crisis* (krisis pemanasan global). Begitu kuatnya ancaman-ancaman krisis ini, maka tingkat swasembada atau ketahanan pangan tidak lagi memadai kalau dibenarkan toleransi kekurangan 10 persen dari kebutuhan. “Karena itu saya selalu kampanye ke mana-mana. Mulai sekarang ini kita mesti menganut konsep kedaulatan pangan,” tandasnya.

Dengan konsep kedaulatan pangan, negara mesti mampu memproduksi 110-120 persen kebutuhan pangannya. Angka 110 persen itu untuk periode sampai tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan seterusnya, minimal 120 persen dari kebutuhan pangan. Artinya, kalau sekarang kita mempunyai kebutuhan pangan sekitar 32 juta ton beras, maka sampai tahun 2009 kita harus mempunyai produksi 35,2 juta ton. Dan pada tahun 2010 kita harus bisa menghasilkan sekitar 38,4 juta ton. Mengapa? Sebab dalam *global food*



Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi program utama pembangunan pertanian.

crisis sekarang ini pasar agak 'memaksa' untuk lebih mendahulukan kebutuhan dalam negerinya sendiri dalam rangka menjaga kedaulatan pangan.

Menurut anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar itu, sekarang setiap negara berupaya meningkatkan cadangan pangan nasionalnya. Contoh, Cina. Saat ini negeri itu memiliki 22,3 juta ton cadangan beras nasionalnya. Padahal biasanya cadangan nasional itu hanya 13-15 juta ton. Langkah ini diambil karena Cina ingin mengamankan kebutuhan nasionalnya. "Hampir semua negara mengamankan dulu kebutuhan nasionalnya. Kitapun harus seperti itu," tegas Bomer.

Karena setiap negara mengamankan dulu kebutuhan nasionalnya, maka beras di pasar internasional makin sulit diperoleh. Vietnam dan Thailand, misalnya, sudah mulai mengurangi ekspornya. Akibatnya, ketika Filipina membutuhkan 0,5 juta ton beras untuk menutupi kekurangannya, ia sulit memperolehnya. Karena

itulah kita mesti memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Kedaulatan pangan, sambung Anggota Komisi IV DPR RI, Drs H Mardjono, MM, PhD, merupakan masalah terbesar bangsa Indonesia saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka 63 tahun, namun belum mampu menciptakan kedaulatan pangan. Padahal, lanjutnya, merdeka adalah berdaulat. “Bagaimana bisa berdaulat kalau makan saja masih tergantung kepada bangsa lain? Sama seperti sebuah rumah tangga, bagaimana bisa dikatakan mandiri kalau makan saja, misalnya, masih tergantung pada mertua?” ujarnya.

Indonesia, kata Mardjono, sangat mungkin memiliki kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia adalah negara agraris dengan lahan luas. Tapi, “Karena salah pengelolaan, sampai sekarang kita bermasalah dalam hal kedaulatan pangan. Kita mempunyai UUD yang sangat menjamin bagi terpenuhinya kedaulatan pangan,” tandas pria kelahiran Banjarnegara, 20 April 1947.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan: Bumi dan air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Tapi UU ini kita khianati sendiri. Modal asing masuk dengan mudahnya,” papar Mardjono. Padahal, lanjutnya, kebun-kebun itu dulu direbut dengan darah dan perjuangan rakyat Indonesia. “Sekarang kita serahkan kembali kepada orang asing. Kita undang lagi ‘Belanda-belanda’ itu ke Indonesia,” kata peraih *doctor of philosophy in management*, *Washington International University, Registered in Pensylvania, USA*, itu.

Selain itu, negara tidak mempunyai politik pangan yang jelas. Seolah pangan itu gampang dibeli. Padahal tidak gampang membeli beras karena produsen beras lebih memilih mencukupi kebutuhannya sendiri. “Kita bicara soal bangsa lebih dari 200 juta jiwa. Jangan anggap sepele soal pangan,” ujarnya.

Menurut Mardjono, produksi pangan yang berkualitas dan mencukupi harus dikuasai negara. Bagaimana caranya? Pertama, UU-

nya harus jelas. Sejak tahun 1977, jutaan hektare lahan kehutanan beralih fungsi menjadi lahan nonkehutanan. Tapi, berapa yang diserahkan ke petani? Bahkan di Sumatera, transmigran yang mendapat jatah 2 ha, dibulldozer. Sebab Pemda memberi ijin kepada pengusaha untuk menanam sawit. Berapa tanah yang diberikan kepada rakyat? “Hampir tidak ada. Padahal kita sebenarnya mempunyai UU yang cukup bagus yaitu UU Pokok Agraria, tapi tidak dilaksanakan,” tandas Direktur PT Teras Bantala Adikarsa, Bekasi.

Sekjen Departemen Pertanian, Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, Sp.I, mengatakan suatu bangsa yang tidak tergantung 100 persen kepada bangsa lain berarti bangsa itu memiliki kedaulatan pangan. Tapi sebagai makhluk Allah, ketergantungan itu tidak mungkin dihindari. Allah itu menciptakan manusia saling tergantung satu sama lain. Suatu bangsa tak akan bisa mandiri sepenuhnya. “Kalau bisa mandiri sepenuhnya, ia akan arogan,” ujar Hasanuddin.

Jadi, lanjutnya, suatu bangsa seharusnya mengetahui bahwa ia tergantung kepada bangsa lain. Karena itu perdagangan komoditas antarnegara itu jangan dipersoalkan. “*Mind set* ini harus kita ubah. Jangan karena ada suatu negara mengimpor makanan lalu kita *mencak-mencak*,” tandasnya.

Yang tidak boleh, papar Hasanuddin, ketergantungan yang berlebih-lebihan kepada bangsa lain. Kalau berlebihan akan menjadi bangsa budak. “Kita akan menjadi bangsa peminta-minta.”

Karena itu, ketahanan pangan bagi suatu bangsa sangat penting. Pengalaman menunjukkan, bagaimana Perancis di zaman Napoleon dahulu berhasil menaklukkan Inggris yang menjajah negeri itu. Saat itu Perancis menguasai pertanian sehingga pangannya cukup tersedia. Sementara Inggris lebih mengurus industri tekstilnya. Dengan tekstil ia akan memiliki banyak uang dan bisa membeli pangan. Tapi saat perang berlangsung, ia diembargo sehingga Inggris tidak bisa membeli pangan. “Jadi, uang bukan jaminan untuk memperoleh pangan,” papar Hasanuddin.

Ketua Komisi IV DPR-RI, HZ Arifin Junaidi, menambahkan ketahanan pangan sangat penting karena itu berkaitan dengan ketahanan nasional. Kalau ketahanan pangan rapuh maka ketahanan nasional juga rapuh. “Kita ini bangsa pemakan beras, kalau sampai produksi beras nasional kurang dari kebutuhan nasional dan harus import, apalagi jika import itu besar, maka kita bisa didikte oleh negara lain,” ujarnya.

Sebagai contoh, Arifin menyebut soal ketergantungan kedelai kepada Amerika Serikat (AS). Pada awal tahun ini Indonesia mengalami gejala kekurangan kedelai. Kedelai sulit diperoleh. Padahal masyarakat Indonesia termasuk bangsa pemakan kedelai, seperti tempe, tahu, kecap, susu, dll. Tapi Indonesia tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhannya. Akibatnya, harus import.

Menurut mantan wartawan itu, kalau melihat konsumsi kedelai sebesar 10 kg per kapita per tahun, seharusnya Indonesia bisa memenuhi sendiri kebutuhan kedelainya. Tapi produksi kedelai tidak mencukupi kebutuhan nasional. Karena itu kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari import. Dan 70 persennya didatangkan dari AS. Jelas, ini bisa menyebabkan ketergantungan kita kepada negeri itu. “AS akan bisa mendikte kita. Dan ini sudah terjadi,” papar pria kelahiran Kendal, 17 Mei 1959. Saat itu AS memberi insentif kepada peng-import kedelai dari Indonesia dengan memberi kredit lunak.

Selain itu, luas lahan pertanian terus menerus mengalami penurunan. Kalau ini dibiarkan akan mengancam produksi pangan nasional. Karena itulah Komisi IV DPR RI sedang membahas UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Lahan pertanian kita, papar Arifin, tidak seproduktif dulu lagi. Produksi beras di tingkat petani, misalnya, cuma 4-5 ton per hektare. Kedelai cuma 1 ton per ha. Karena itulah ia mendukung kebijakan Deptan untuk mengalihkan pupuk anorganik ke pupuk organik karena hara tanah telah rusak sehingga produktivitas pertanian sangat rendah. “Karena itu sebagai ketua Komisi IV, saya sangat kecewa dengan

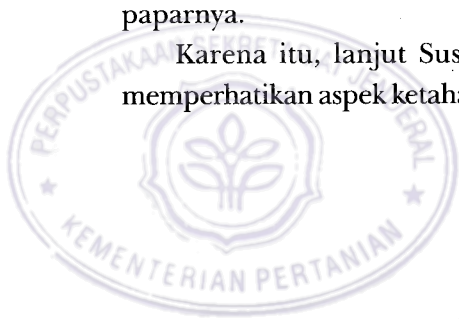
anggaran untuk pertanian yang teramat kecil,” tandasnya.

Tahun 2008, anggaran untuk Deptan masih 0,9 persen dari APBN. Untuk tahun 2009, anggaran Deptan naik. Tapi, persentase terhadap APBN turun menjadi 0,7 persen. Jika dihitung dengan subsidi untuk pupuk dan subsidi benih serta irigasi yang ada di Departemen PU, jumlah anggaran untuk pertanian sekitar Rp 60 triliun. Angka ini, menurut anggota Dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu, masih terlalu kecil. Di negara lain seperti Australia, anggaran untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan, 15-16 persen dari APBN. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 4 persen dari APBN.

Mentan Anton Apriyantono menambahkan, pangan bagi bangsa Indonesia sangat penting, karena itu kebutuhan primer. Selain itu, sebagian besar petani kita, sekitar 60 persen, adalah petani tanaman pangan. Mereka memiliki lahan yang sangat sempit. Di Jawa rata-rata hanya 0,3 hektare. Dengan pemilikan lahan yang sangat terbatas, tak heran jika banyak petani miskin. Padahal ‘tugas’ mereka cukup berat: menyediakan dan mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Karena itulah menurut Anton, harusnya harga pangan ada pada tingkat yang layak bagi usaha tani. Nilai tukar hasil-hasil pertanian harus tinggi. Agar tingkat kesejahteraan petani meningkat. Tapi, harga pangan yang terlalu tinggi akan menyulitkan sebagian penduduk Indonesia. “Ini memang kompleksitas persoalan pangan Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan petani,” papar alumnus IPB itu.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi IV, Ir H Suswono, MMA. Menurutnya, pangan merupakan masalah strategis. Persoalan pangan memiliki nilai politis sangat tinggi. “Jika pemerintah tidak bisa mengamankan ketahanan pangan, pemerintah bisa jatuh,” paparnya.

Karena itu, lanjut Suswono, siapapun yang berkuasa, harus memperhatikan aspek ketahanan pangan ini. Ketahanan pangan tidak



semata-mata terpenuhinya produksi dalam arti swasembada pangan, tapi yang lebih utama soal keterjangkauannya oleh masyarakat. “Apalah artinya kita bisa berswasembada jika masyarakat tidak bisa menjangkaunya. Rakyat tidak bisa membeli pangan. Jika itu yang terjadi, sesungguhnya pemerintah telah gagal,” ujarnya.

Menurut anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, keterjangkauan pangan oleh rakyat menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan rakyat. Tapi ironisnya, masyarakat miskin di negeri ini adalah mereka yang memproduksi pangan yakni petani. Dari 19,1 juta kepala keluarga penerima program Raskin (beras untuk warga miskin), sekitar 60 persennya petani. Karena itu, di samping meningkatkan produktivitas pertanian, kewajiban pemerintah bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani. Caranya dengan meningkatkan nilai tukar hasil-hasil pertanian. “Nilai tukar petani harus selalu ditingkatkan agar sumbangsih produksi mereka kepada pemerintah itu ada timbal baliknya berupa meningkatnya tingkat kesejahteraan petani,” papar Suswono.

Rekannya di Komisi IV DPR RI, Hj Mahsusoh Ujiati, menimpali pangan merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar manusia. Kalau suatu bangsa tercukupi kebutuhan pangannya, maka bangsa tersebut akan stabil kehidupannya, termasuk di bidang politik. “Bila pangan cukup, negara tidak terganggu oleh protes-protes karena perut lapar. Orang lapar mudah diprovokasi,” ujarnya.

Sebaliknya kalau pangan terganggu, misalnya terjadi defisit, maka konflik-konflik horisontal akan gampang muncul. Bahkan keamanan negara bisa terganggu karena demonstrasi akan marak di mana-mana. Jika ini terjadi negara akan kacau. Program-program pembangunan tidak akan jalan. Stabilitas terganggu sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga terganggu. Sebab, “Jika kebutuhan pangan saja tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan yang lain seperti sandang dan papan.”

Pangan telah menjadi komoditi politik, juga dikemukakan oleh

Maruahal Silalahi. Menurut anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu, di negara manapun, termasuk di Indonesia, pangan telah menjadi komoditi politik. “Pangan bisa menjadi alat untuk menekan suatu negara,” ujarnya.



Menurutnya, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan primer manusia. Dari ketiganya, yang paling vital kebutuhan pangan. Hal senada dikatakan Sekjen Departemen Pertanian, Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, Sp.I. Menurutnya, pangan sangat vital bagi sebuah bangsa. Sebuah bangsa akan sejahtera dan stabil kondisi sosial politiknya jika pangannya tersedia. Jumlahnya mencukupi dan harganya terjangkau masyarakat. “Jika pangan di suatu negara tersedia cukup banyak namun ada sebagian masyarakat yang tak bisa menjangkaunya, maka tujuan pangan itu belum tercapai,” katanya.

Menurut Hasanuddin, suatu bangsa disebut memiliki ketahanan pangan jika paling tidak 90 persen pangannya diproduksi sendiri. Dan pangan tidak cuma beras. Makan tidak harus nasi. Pangan tidak cuma karbohidrat. Tapi ada protein dan vitamin yang bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dll. “Kita harus mengedukasi cara makan bangsa yang selama ini terlalu tinggi karbohidratnya namun kurang protein dan vitamin,” jelasnya.

Pangan, lanjut Hasanuddin, haruslah berbasis pada makanan pokok yang ada di daerah itu. Orang Madura dan Gorontalo, misalnya, makanan pokoknya jagung. Sedangkan orang-orang Papua, Irian Jaya, Maluku, makanan pokoknya berbasis sagu. “Kalau ada saudara kita makan jagung atau nasi campur jagung, jangan diterawakan. Itu bukan makanan inferior. Bahkan gizinya bisa lebih tinggi



dari nasi. Orang yang makanan pokoknya berbasis singkong, jangan dikatakan miskin,” ujarnya.

“Teman-teman di media juga harus diedukasi. Mereka mengatakan kelaparan karena makan singkong. Cara pandang ini harus kita ubah. Makan itu bukan cuma beras. Sagu atau singkong itu juga makanan, jangan ditertawakan.”

Karena itulah Hasanuddin mengajak kita untuk kembali ke makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Sebab, itulah yang alamiah. Jangan mengubah makanan pokok masyarakat. “Jangan ajak saudara kita makan roti, sebab makanan pokok kita beras. Jika itu dilakukan, kita akan tergantung kepada bangsa lain,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Mentan Anton Apriyantono. Menurutnya, untuk makanan pokok, kita harus bisa berswasembada. Sedangkan pangan yang tidak menjadi makanan pokok, diupayakan untuk dikurangi dengan substitusi. Gandum misalnya bisa disubstitusi dengan casava. “Kita harus lebih menyukai produk-produk domestik,” paparnya.

Tapi, lanjut Anton, kita tidak bisa membatasi masalah kesukaan. Buah-buahan, misalnya, masih impor —walaupun jumlahnya tidak besar, impor buah dan sayuran di bawah 5 persen— karena masalah kesukaan. “Orang ingin makan anggur, makan apel, apa ya bisa dilarang! Yang bisa kita lakukan, oke kita impor apel, anggur, pir, kiwi, tapi kita harus bisa ekspor buah-buahan yang lain.”

Setiap negara, paparnya, memiliki agroekologis sendiri-sendiri. Gandum misalnya, cocoknya ditanam di negara-negara subtropis. Sedangkan padi dan sawit di daerah tropis. “Sekarang kita mau menanam sawit atau menanam gandum? Itu kan pilihan! Negara subtropis tidak bisa menanam sawit. Tapi kita juga mempunyai keterbatasan menanam gandum. Kalau pun bisa, ya di lahan-lahan tertentu saja. Tidak mungkin seluas di negeri subtropis. Mengapa kita harus memaksakan diri menanam gandum?”

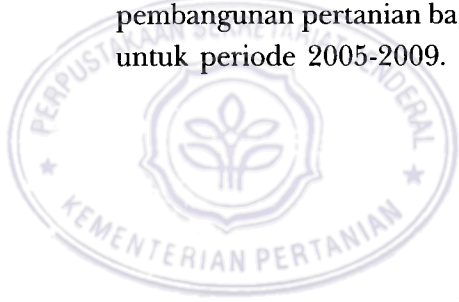
BAB II

TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEPTAN

Panca Yasa Pertanian adalah lima landasan yang mutlak diperhatikan dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan pertanian.

(Mentan Dr Ir Anton Apriyantono, MS)

Agenda pembangunan pertanian Kabinet Indonesia Bersatu periode 2005-2009 banyak mengalami penyesuaian. Penyesuaian dilakukan terkait agenda Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2005, dan konsep *Tripple Track Strategy* (*pro-growth*, *pro-employment*, dan *pro-poor*). Semua program Departemen Pertanian (Deptan) yang telah disesuaikan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 394/Kpts/ RC.120/ 11/2005 dan berlaku mulai 1 November 2005. Melalui Permentan tersebut Deptan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2005-2009. Renstra adalah acuan bagi perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian bagi seluruh jajaran di lingkungan Deptan untuk periode 2005-2009.



Penyesuaian kembali dilakukan setahun kemudian (2006). Pembaruan ini dilakukan terkait upaya Deptan melakukan berbagai terobosan dalam pembangunan pertanian. Terobosan dilakukan antara lain terkait telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; pengembangan pola padat karya pada kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian; percepatan peningkatan produksi pangan nasional melalui Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN) dan penataan perbenihan; revitalisasi perkebunan; perekrutan tenaga pendamping lapangan untuk penyuluhan pertanian; penyediaan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung infrastruktur perbenihan dan penyuluhan; Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Pengembangan Usaha Agribisnis di Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).

Terobosan tersebut membawa konsekuensi terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan dalam lingkup departemen yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Karena itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian No. 308/Kpts//RC.120/12/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 394/Kpts/ RC.120/11/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pertanian Tahun 2005-2009. Dengan perubahan Rencana Strategis ini diharapkan kegiatan pembangunan pertanian dapat lebih realistis sesuai dengan berbagai upaya terobosan yang dilakukan, serta dapat mengakomodasi tuntutan dinamika lingkungan strategis yang terjadi.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999 dan Inpres No. 7 Tahun 1999, Deptan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Deptan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deptan menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian; (2) pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; (3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan (5) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Kelembagaan Deptan terdiri dari: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air; (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (4.) Direktorat Jenderal Hortikultura; (5) Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Direktorat Jenderal Peternakan; (7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (8) Inspektorat Jenderal; (g) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; (11) Badan Ketahanan Pangan; (12) Badan Karantina Pertanian; dan (13) Staf Ahli.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan lahan dan air irigasi.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang



hortikultura.

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.

Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pertanian 2005-2009 memuat: (1) Ruh, visi, dan misi Deptan; (2) Tujuan dan sasaran;

(3) Kondisi saat ini dan yang diinginkan dari beberapa indikator pembangunan pertanian; (4) Analisis strategis tentang potensi, masalah dan tantangan pembangunan pertanian; (5) Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok Deptan tahun 2005-2009.

Ruh diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian nasional adalah karena didorong oleh semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh pemerintah yang bersih (*clean government*). Semangat penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh suatu pemerintahan yang bersih diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ruh merupakan nilai (*value*) dan semangat (*spirit*) yang melandasi pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan.

Bagi sektor pertanian yang obyek pembangunannya benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman, dan lingkungannya (*human activity system*), maka ruh pembangunan sangat diperlukan. Dengan demikian pembangunan pertanian tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan.

Ruh penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia adalah Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan, dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis), dan aspiratif.

Deptan sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian mempunyai Visi tahun 2005-2009, yaitu Menjadi Departemen yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam

pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai visi di atas, Deptan mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan; (3) Memfasilitasi terwujudnya ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan panganekaragaman konsumsi; (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional; (5) Memfasilitasi peningkatan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pertanian nasional adalah: (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani, (2) Meningkatkan kemandirian dan kesolidan kelembagaan dan organisasi tani melalui pembangunan SDM pertanian; (3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (4.) Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (5) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (6) Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan; (7) Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

- (1) Meningkatnya ketahanan pangan nasional, mencakup; (a) meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian, (b) berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10 persen dari produksi domestik, dan (c) meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan sesuai Pola Pangan Harapan
- (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, mencakup: (a) meningkatnya mutu produk primer pertanian,

- (b) meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian, (c) meningkatnya ekspor, dan (d) meningkatnya surplus perdagangan komoditas pertanian
- (3) Meningkatnya kesejahteraan petani, mencakup: (a) meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, (b) meningkatnya pendapatan dan Nilai Tukar Petani, (c) Meningkatnya lembaga usaha pertanian yang dikelola secara profesional, dan (d) menurunnya insiden kemiskinan di pedesaan; dan
- (4) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, mencakup: (a) meningkatnya praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*), (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian, (c) meningkatnya dan berkembangnya kearifan lokal (*local wisdom*) yang memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Keberhasilan pembangunan pertanian mencapai tujuannya dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain: (a) pertumbuhan PDB pertanian, (b) produksi komoditas pertanian, (c) kemandirian dan ketahanan pangan, (d) peningkatan ekspor, dan (e) kesejahteraan petani.

PDB Pertanian

Selama periode tahun 2000-2003 rata-rata laju pertumbuhan tahunan PDB sektor pertanian mencapai 1,83 persen. Jauh lebih tinggi dibanding periode krisis ekonomi (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen. Bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen.

Pada tahun 2004, PDB sektor pertanian termasuk perikanan dan kehutanan meningkat 4,06 persen. Sementara PDB sektor pertanian di luar perikanan dan kehutanan pada tahun 2004 tumbuh sebesar 4,02 persen. Subsektor tanaman bahan makanan tumbuh 3,70 persen, subsektor perkebunan tumbuh sebesar 2,21 persen dan subsektor peternakan tumbuh 4,66 persen. Pada tahun 2004, kondisi

iklim sangat mendukung peningkatan produksi pertanian, terutama tanaman pangan, di samping tidak adanya bencana (kekeringan, banjir, dan serangan hama) yang secara nyata mengganggu produksi pertanian.

Pada periode 2005-2009 pertumbuhan PDB sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) ditargetkan tumbuh rata-rata 3,79 persen per tahun. PDB subsektor tanaman pangan ditargetkan tumbuh rata-rata 1,74 persen, subsektor hortikultura 4,16 persen, subsektor perkebunan 6,30 persen, dan subsektor peternakan 4,38 persen per tahun.

Produksi Komoditas Pertanian

Salah satu kegiatan utama sektor pertanian adalah menghasilkan produksi komoditas pertanian primer, mencakup komoditas di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pada periode tahun 2000-2004, kinerja produksi komoditas tanaman pangan secara umum cukup baik. Produksi komoditas padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami peningkatan masing-masing 1,17; 3,61; 3,90; 3,20 dan 0,98 persen per tahun. Namun rata-rata laju pertumbuhan komoditas kedelai mengalami penurunan.

Produksi padi tahun 2004 sebesar 54,09 juta ton GKG (ATAP BPS), meningkat 3,74 persen dibanding tahun 2003 sebesar 52,14 juta ton. Pencapaian produksi padi tahun 2004 tersebut di atas sasaran yang ditetapkan yaitu 53 juta ton. Peningkatan produksi ini terutama dicapai melalui peningkatan luas panen yang mencapai 3,79 persen dari 11,49 juta hektare menjadi 11,92 juta hektare. Produktivitas padi menunjukkan penurunan (-0,04 %) dari 45,38 kuintal menjadi 45,36 kuintal per hektare.

Berikut Tabel kenaikan produksi beberapa jenis tanaman pangan:

Jenis Tanaman	Produksi 2003 (Juta Ton)	Produksi 2004 (Juta Ton)	Kenaikan Per Tahun (%)
Padi	52,14	54,09	3,74
Kedelai	0,67	0,72	7,73
Kacang tanah	0,78	0,84	6,62
Jagung	10,88	11,12	3,11
Ubi kayu	18,52	19,42	4,86
Ubi jalar	1,99	1,90	-4,50
Kacang hijau	0,33	0,31	-7,40

Keberhasilan produksi tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas kepada peningkatan produksi pangan dalam negeri dalam rangka menciptakan ketahanan pangan nasional. Adanya kondisi iklim yang menunjang produksi pertanian. Dan, tidak adanya bencana besar yang mengancam produksi. Sepanjang tahun 2004 dampak banjir dan kekeringan tidak signifikan. Di Jalur Pantura, kekeringan hanya menyebabkan terjadinya pergeseran musim tanam. Penerapan subsidi pupuk juga berperan pada peningkatan produksi padi dan produksi hampir semua komoditas tanaman pangan lainnya. Di samping itu, pemberlakuan kebijakan buka-tutup impor beras, yaitu melarang impor beras selama sebulan sebelum panen, selama panen, hingga dua bulan sesudah panen raya, telah berdampak positif terhadap pencapaian tingkat dan stabilitas harga di tingkat petani serta mampu memberi insentif bagi petani untuk menerapkan teknologi yang lebih baik.

Pada periode 2005-2009, produksi padi ditargetkan meningkat dari 55,03 juta ton pada tahun 2005 menjadi 63,52 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,51 persen per tahun. Pada tahun 2007 melalui upaya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) ditargetkan tambahan produksi setara dengan 2 juta ton

beras dan peningkatan produksi 5 persen per tahun sejak tahun 2008 sampai 2009. Target produksi berbagai jenis tanaman pangan untuk tahun 2009 sebagai berikut:

Jenis Tanaman	Produksi Tahun 2005	Target Produksi Tahun 2009	Kenaikan Per Tahun (%)
Padi	55,03 juta ton	63,52 juta ton	3,51
Jagung	12 juta ton	19,44 juta ton	11,58
Kedelai	777, 4 ribu ton	1,8 juta ton	20,61
Kacang tanah	835, 4 ribu ton	984,75 ribu ton	3,50
Ubi kayu	19,57 juta ton	19,90 juta ton	0,39
Ubi jalar	1,88 juta ton	1,91 juta ton	0,35
Kacang hijau	350 ribu ton	367 ribu ton	0,95

Peningkatan produksi tersebut ditempuh melalui : 1) Peningkatan produktivitas, 2) Perluasan areal, 3) Pengamanan produksi, dan 4) Pengembangan kelembagaan dan pembiayaan.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan pemberian benih unggul bermutu, pemupukan berimbang dan organik, pengairan, alsintan, perbaikan budidaya dan pengawalan/pendampingan. Perluasan areal dilakukan dengan cara ekstensifikasi melalui cetak sawah dan dengan cara intensifikasi melalui kegiatan optimalisasi lahan, pengembangan jaringan usahatani (JITUT), pengembangan jaringan Irigasi desa (JIDES), pengembangan tata air mikro (JAM) serta pengembangan pompanisasi embung/waduk dan kegiatan konservasi lainnya di lahan sawah (pasang surut, rawa, dan lebak). Pengamanan produksi dilakukan dengan memperhatikan dampak fenomena iklim, pengendalian OPT, dan pengamanan pascapanen. Kelembagaan dan pembiayaan dilakukan dengan pendekatan

Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP), Koperasi Tani (KOPTAN), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), kios saprodi, pelayanan penyuluhan, perbenihan, perlindungan dan kemitraan.

Krisis ekonomi tahun 1998 tidak membuat produksi sayuran mengalami kontraksi. Bahkan sebagian besar komoditas sayuran justru mengalami akselerasi pertumbuhan produksi. Pada tahun 2002-2003, komoditas sayuran telah kembali ke fase pertumbuhan tinggi. Produksi hortikultura pada tahun 2004 juga banyak mengalami kemajuan. Dibandingkan dengan produksi tahun 2003, produksi buah-buahan tahun 2004 meningkat 6 persen dari 13,55 juta ton menjadi 14,36 juta ton; tanaman obat meningkat 5,2 persen dari 0,22 juta ton menjadi 0,24 juta ton; tanaman hias meningkat 3,1 persen dari 115,7 juta tangkai menjadi 119,3 juta tangkai; dan sayuran meningkat 1,64 persen dari 8,57 juta ton menjadi 8,71 juta ton.

Target kenaikan produksi beberapa jenis hortikultura disajikan pada Tabel berikut:

Jenis Tanaman	Produksi Tahun 2005	Produksi Tahun 2009	Kenaikan Per Tahun (%)
Kentang	1,05 juta ton	1,28 juta ton	3,85
Cabe	1,10 juta ton	1,24 juta ton	7,10
Bawang merah	819 ribu ton	1,1 juta ton	7,65
Tomat	730 ribu ton	873 ribu ton	4,64
Rimpang	291 ribu ton	470 ribu ton	1,85
Durian	823 ribu ton	1,14 juta ton	8,41
Pepaya	549 ribu ton	666 ribu ton	1,02
Nanas	925 ribu ton	1,12 juta ton	10,06
Mangga	1,41 juta ton	1,81 ton	38,48



Upaya-upaya yang ditempuh untuk peningkatan produksi hortikultura antara lain: 1) Penumbuhan penangkar benih; 2) Penyediaan benih bermutu; 3) Pengaturan pola produksi; 4) Pembinaan dan penerapan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya dan berbasis *Good Agricultural Practices* (GAP); 5) Sosialisasi pengendalian Organisma Pengganggu Tanaman (OPT) berbasis Pengendalian Hama Terpadu (PHT); 6) Penguatan kelembagaan petani dan perbenihan; 7) Pengembangan kemitraan.

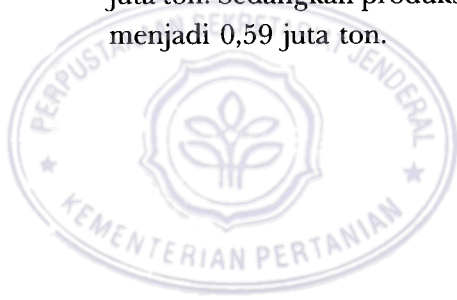
Pada periode 2005-2009, produksi komoditas perkebunan, yaitu kelapa sawit ditargetkan meningkat dari 14,34 juta ton pada tahun 2005 menjadi 19,44 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 8,30 persen per tahun. Berikut produksi dan target produksi beberapa komoditas perkebunan:

Jenis Tanaman	Produksi Tahun 2005	Produksi Tahun 2009	Kenaikan Per Tahun (%)
Karet	2,27 juta ton	2,62 juta ton	4,91
Kakao	748 ribu ton	881 ribu ton	5,00
Kopi	640 ribu ton	691 ribu ton	1,33
Kelapa	3,10 juta ton	3,31 juta ton	1,62
Lada	78 ribu ton	83 ribu ton	1,51
Tembakau	153 ribu ton	200 ribu ton	4,24
Tebu	2,24 juta ton	3,30 juta ton	10,24
Teh	167 ribu ton	170 ribu ton	0,39
Cengkeh	78 ribu ton	87 ribu ton	3,33
Jambu mete	135 ribu ton	160 ribu ton	4,09
Kapas	2 ribu ton	35 ribu ton	179
Jarak pagar	40 ton	1,02 ribu ton	300,59

Peningkatan produksi jarak pagar yang cukup tinggi berkaitan dengan program pemerintah dalam penyediaan bahan bakar nabati (BBN) sebagai substitusi parsial bahan bakar fosil.

Selama periode 2005-2009, penyediaan BBN diperkirakan mencapai 2 persen. Pengembangan tanaman penghasil biofuel seperti jarak pagar mencapai 1,05 juta ha, kelapa sawit 7,495 juta ha, kelapa 3,869 juta ha serta tebu 427 ribu ha. Peningkatan komoditas perkebunan ditempuh melalui upaya: 1) Rehabilitasi/ peremajaan dan pengembangan tanaman; 2) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani; 3) Penyediaan kredit program pembangunan perkebunan; 4) Pemberdayaan petani; dan 5) Pembinaan dan pengawalan. Untuk pengembangan komoditas penghasil biofuel seperti jarak pagar, juga dilakukan upaya-upaya seperti: pengembangan dan pemeriharaan serta pemurnian kebun induk.

Selama tahun 2004, populasi semua jenis ternak mengalami peningkatan dibanding tahun 2003, kecuali untuk ayam buras. Peningkatan tertinggi (di atas 5 persen) terjadi pada ternak babi yang naik 6,4 persen dari 6,15 juta ekor menjadi 6,56 juta ekor; diikuti oleh ternak kambing yang naik 5,4 persen dari 12,72 juta ekor menjadi 13,44 juta ekor; ayam pedaging naik 5,3 persen dari 847,74 juta ekor menjadi 895,11 juta ekor. Populasi sapi potong naik 2,1 persen dari 10,5 juta ekor menjadi 10,72 juta ekor; Populasi ayam buras turun 2 persen dari 277,35 juta ekor menjadi 271,85 juta ekor. Populasi ternak lainnya seperti sapi perah, kerbau, kuda, dan itik naik antara 2 - 4,7 persen. Sejalan dengan peningkatan populasi di atas, produksi daging, telur, dan susu pada tahun 2004 juga meningkat dibanding tahun 2003. Produksi telur meningkat pesat mencapai 7,2 persen dari 0,97 juta ton menjadi 1,05 juta ton. Produksi daging naik 3,1 persen dari 1,87Juta ton menjadi 1,93 juta ton. Sedangkan produksi susu naik 7,2 persen dari 0,55 juta ton menjadi 0,59 juta ton.



Subsektor peternakan, juga merupakan andalan utama sumber pertumbuhan tinggi sektor pertanian. Pada tahun 2003 subsektor peternakan sudah sepenuhnya pulih dari terpaan krisis tahun 1998-1999. Tingkat produksi seluruh komoditas peternakan sudah melampaui tingkat tertinggi periode sebelum krisis, kecuali untuk daging kuda. Pada tahun 2000-2003 laju peningkatan produksi ayam broiler dan petelur berturut-turut mencapai 23,4 dan 10,27 persen per tahun, padahal saat krisis ekonomi pernah mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu masing-masing 28,23 persen dan 8,92 persen per tahun.

Di subsektor peternakan, sepanjang tahun 2004 juga relatif tidak terjadi masalah yang besar, seperti flu burung yang terjadi pada tahun 2003 yang silam. Kejadian wabah antrax yang muncul dapat diatasi sehingga tidak menyebar. Masalah yang muncul pada tahun 2004 adalah adanya impor daging ilegal yang sangat merepotkan. Melalui kerjasama yang baik antara Ditjen Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Karantina Pertanian, masalah impor ilegal ini dapat ditangani secara maksimal.

Pada periode 2005-2009, produksi peternakan, yaitu daging sapi ditargetkan meningkat dari 391 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 441 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,01 persen per tahun. Target produksi untuk jenis daging lainnya disajikan pada Tabel berikut:



Jenis Daging	Produksi Tahun 2005	Produksi Tahun 2009	Kenaikan Per Tahun (%)
Kerbau	45,82 ribu ton	47,08 ribu ton	0,68
Kuda	1.600 ton	1.604 ton	0,08
Kambing	71,23 ribu ton	76,84 ribu ton	2,00
Domba	87,17 ribu ton	98,10 ribu ton	3,02
Babi	202 ribu ton	226 ribu ton	3,07
Unggas	1,52 juta ton	2,01 juta ton	7,61
Telur	1,14 juta ton	1,60 juta ton	8,74
Susu	657 ribu ton	971 ribu ton	10,25

Upaya- upaya yang ditempuh dalam pengembangan dan peningkatan produksi ternak antara lain melalui : 1) Perbaikan mutu dan penyediaan bibit ternak; 2) Penanganan/pengendalian penyakit ternak; 3) Pengembangan SDM dan kelembagan; 4) Pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal.

Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan merupakan aspek paling strategis bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar. Kemandirian dan ketahanan pangan terkait erat dengan kemandirian dan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Tantangan peningkatan kemandirian pangan berkaitan dengan permintaan kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraannya. Sementara dari sisi penyediaan, dihadapkan kepada permasalahan ketersediaan sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air. Di samping itu, kemandirian dan ketahanan

pangan juga berkaitan dengan upaya pendistribusian pangan dan konsumsi pangan masyarakat.

Selama periode 2000-2004, Indonesia tidak pernah mengalami masalah penyediaan pangan. Berdasarkan perhitungan rasio impor beberapa bahan pangan penting terhadap total penyediaan pangan menunjukkan bahwa ketergantungan impor bahan pangan terhadap total penyediaan, secara umum relatif kecil. Pada tahun 2004, ketergantungan terhadap impor yang berasal dari bahan pangan, berkisar antara 0 persen pada telur, ubi jalar, dan ubi kayu hingga 0,77 persen pada beras. Angka ketergantungan yang relatif tinggi adalah gula 21,79 persen, kedelai 60,98 persen, dan jagung 9,14 persen.

Dari sisi distribusi, masalah yang dihadapi berupa masalah fisik (kurangnya sarana dan prasarana serta tingginya biaya angkut) dan masalah kelembagaan pemasaran (lemahnya kelembagaan pemasaran di pedesaan). Masalah terkait distribusi ini menyebabkan pangan menjadi susah diakses dan tingginya harga pangan. Karena itu diperlukan pengembangan sarana transportasi, informasi, dan distribusi pangan (seperti fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian); serta penyempurnaan peraturan terkait distribusi pangan. Selain itu juga diperlukan pengembangan kelembagaan petani (yang di antaranya membantu petani dalam usaha ekonomi seperti pemasaran hasil pertanian) yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

Selama kurun 2005-2009, jumlah energi yang dikonsumsi penduduk diharapkan meningkat. Pada tahun 2005 jumlah energi yang dikonsumsi sebesar 1989 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2009 sebesar 1994 kkal/kapita/hari. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antarkelompok pangan. Selama lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan mutu gizi konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diindikasikan dengan meningkatnya skor mutu gizi pangan (PPH) dari 66,3 (1999)

menjadi 76,8 (2004). Selama periode 2005-2009, skor PPH juga diharapkan meningkat dari 78,9 pada tahun 2005 menjadi 87,3 pada tahun 2009.

Masalah strategis pangan yang juga terkait dengan kemandirian dan ketahanan pangan adalah terjadinya kasus kerawanan pangan yang erat hubungannya dengan kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Penduduk miskin memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Pada tahun 2004 terdapat 36,1 juta jiwa penduduk miskin. Pada tahun yang sama terdapat 1,56 juta jiwa penduduk yang sangat rawan pangan (konsumsi energinya kurang dari 70 persen angka kecukupan energi). Berdasarkan analisis parameter kerawanan pangan, telah disusun peta kerawanan pangan (*Food Insecurity Atlas/FIA*) dengan melakukan survei terhadap 265 kabupaten di tahun 2004. Hasil survei menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat kabupaten-kabupaten rawan pangan dengan katagori: (1) 40 kabupaten (15,09%) daerah agak rawan ;(2) 30 kabupaten (11,32%) daerah rawan pangan; (3) 30 kabupaten (11,32%) daerah sangat rawan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan stratus gizi yang rendah.

Secara umum kemandirian pangan nasional semakin mantap. Membaiknya kemandirian dan ketahanan pangan nasional juga diikuti oleh perbaikan ketahanan pangan di tingkat regional dan rumah tangga. Selama periode 2005-2009 konsumsi bahan pangan utama (beras, jagung, kedelai dan gula) diproyeksikan mengalami peningkatan 1,21-3,57 persen per tahun. Konsumsi rata-rata per tahun komoditas beras akan meningkat 1,21 persen; konsumsi jagung 3,01 persen; kedelai meningkat 1,74 persen; dan gula 3,57 persen. Dalam rangka pemantapan kemandirian dan ketahanan pangan , selain peningkatan produksi komoditas tersebut di atas, promosi

diversifikasi produksi dan konsumsi pangan juga perlu terus ditingkatkan.

Peningkatan Ekspor

Sektor pertanian juga dituntut berperan dalam perolehan devisa melalui pengembangan ekspor dan atau penekanan impor. Selama periode 1995-2004 kinerja neraca perdagangan (*balance of trade*) komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mengalami peningkatan secara konsisten. Rata-rata nilai ekspor pada periode sebelum krisis (1995-1997) mencapai 5,1 miliar dolar AS dengan nilai impor rata-rata 4,6 miliar dolar AS, sehingga surplus neraca perdagangan 0,5 juta dolar AS. Pada masa krisis (1998-1999) impor turun drastis sehingga neraca perdagangan mengalami surplus 1,4 miliar dolar AS. Pada periode pascakrisis (2000-2004) ekspor meningkat pesat sehingga neraca perdagangan meningkat dua kali lipat menjadi 2,2 miliar dolar AS.

Selama periode 2005-2009 nilai ekspor komoditas pertanian juga diproyeksikan meningkat dengan laju 17,82 persen per tahun, lebih tinggi dibanding laju nilai impor yang hanya mencapai 6,17 persen per tahun. Dengan kondisi demikian, neraca perdagangan diproyeksikan meningkat dari 7,3 miliar dolar AS pada tahun 2005 menjadi 10,97 miliar dolar AS pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata sebesar 23,96 persen per tahun. Total devisa bruto yang mampu disumbangkan sektor pertanian diproyeksikan meningkat dari 11,7 miliar dolar AS pada tahun 2005 menjadi 16,12 miliar dolar AS pada tahun 2009. Peningkatan ekspor berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing produk pertanian.

Beberapa komoditas ekspor pertanian di pasar dunia masih sering menemui hambatan, baik tarif maupun nontarif, seperti: keamanan pangan (batas maksimum residu/BMR pestisida, cemaran biologis, polutan, dsb), lingkungan, *automatic detention*, SPS, HACPP, persyaratan WTO, dll. Agar komoditas ekspor pertanian dapat

diterima di pasar dunia maka hambatan tersebut perlu diminimalisir.

Kesejahteraan Petani

Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan petani, antara lain pendapatan, tingkat upah dan daya beli yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP), serta terbukanya akses bagi setiap pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya produktif pertanian (modal, informasi, teknologi, lahan dan air).

Dari indikator pendapatan dapat diturunkan variabel produktivitas tenaga kerja pertanian yang dihitung dari nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan data resmi BPS, pada harga-harga konstan 1993, setelah menurun pada tahun 1998-1999, pendapatan tenaga kerja pertanian meningkat konsisten selama periode tahun 2000-2003 dengan nilai rata-rata di atas nilai periode sebelum krisis (1993-1997). Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani juga tecermin dari perkembangan nilai tukar petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar rumah tangga tani. Setelah anjlok sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, nilai tukar petani secara nasional menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2001 dan terus meningkat hingga tahun 2003.

Dalam tahun 2005-2009, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian ditargetkan meningkat dari Rp 4,76 juta pada tahun 2005 menjadi Rp 5,07 juta per kapita per tahun pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat sebesar 1,40 persen per tahun, dan Nilai Tukar Petani dapat meningkat dan berada di atas 100. Dengan kondisi ini diharapkan penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 18,90 persen pada tahun 2005 menjadi 15,02 persen pada tahun 2009.

Tenaga kerja di bidang pertanian (tanaman pangan,

kelestarian sumberdaya dan lingkungan pertanian, kerjasama dan advokasi dengan pihak terkait sangat diperlukan.

Analisis Strategis: Potensi, Masalah, dan Tantangan

Potensi

Sebagai negara tropis, keunggulan komparatif Indonesia adalah pertanian. Keunggulan tersebut merupakan dasar bagi terbangunnya keunggulan kompetitif nasional dan daerah. Apabila pembangunan nasional didasarkan kepada keunggulan yang dimiliki, diyakini pembangunan akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari sisi permintaan, prospek pertanian berkaitan dengan potensi pasar domestik dan internasional. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk-produk pertanian. Sampai saat ini, selain beras konsumsi per kapita produk-produk pertanian masih tergolong rendah, karena tingkat pendapatan per kapita masyarakat relatif masih rendah. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk disertai dengan peningkatan jumlah dan perubahan struktur penduduk, jumlah dan struktur konsumsi produk-produk pertanian akan meningkat pula. Peningkatan permintaan akan mengarah kepada produk-produk pertanian olahan, sehingga melalui pengembangan produk olahan (produk agroindustri) yang sesuai dengan permintaan pasar akan meningkatkan nilai tambah pertanian.

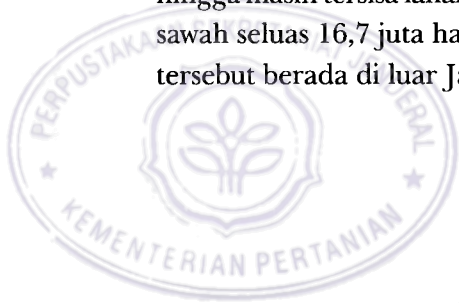
Di pasar internasional, peluang pasar produk pertanian semakin meningkat dengan berkembangnya kesadaran masyarakat internasional terhadap kelestarian lingkungan, yang berarti akan mendorong meningkatnya permintaan produk pertanian yang ramah lingkungan dan meninggalkan penggunaan produk-produk kimia turunan (produk sintetis) yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Secara historis Indonesia merupakan salah satu produsen utama

produk pertanian di dunia dan pengekspor penting komoditas pertanian seperti minyak sawit, karet alam, dan kakao. Sementara itu, peluang bagi komoditas pertanian lainnya untuk dapat berperan di pasar dunia sangat besar.

Peluang pengembangan pertanian berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Sampai saat ini tingkat penggunaan teknologi baik pra maupun pascapanen belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya senjang hasil antara produktivitas riil di tingkat usahatani dan produktivitas potensial yang secara rata-rata berkisar antara 20-50 persen. Rendahnya tingkat penggunaan teknologi ini terkait dengan berbagai keterbatasan seperti penguasaan lahan yang sempit, keterbatasan modal petani, rendahnya aksesibilitas terhadap sumber informasi teknologi, dan kurang tersedianya teknologi spesifik lokalita. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dapat dilihat dari contoh berikut:

- (1) Pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian masih belum optimal dan masih banyak tersedia lahan potensial yang belum dimanfaatkan seperti lahan rawa, gambut, dan pasang surut. Total daratan Indonesia seluas 188,2 juta ha. Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan baku, terdapat 100,8 uta ha lahan yang sesuai untuk pertanian baru yang terdiri dari 24,5 juta ha untuk lahan basah (sawah) dan 76,3 juta ha untuk lahan kering. Saat ini diperkirakan sekitar 64 juta ha yang sudah dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian masih terbuka peluang bagi perluasan areal pertanian. Upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi lahan yang ada, seperti pemanfaatan lahan lebak, rawa dan lahan pasang surut. Saat ini, lahan basah yang telah digunakan seluas 7,79 juta ha, sehingga masih tersisa lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan sawah seluas 16,7 juta ha. Seluruh lahan sawah yang berpotensi tersebut berada di luar Jawa dan apabila digunakan untuk padi



sawah akan mampu menyediakan tambahan produksi padi sebanyak 41,75 juta ton setiap tahunnya.

- (2) Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. Dari jutaan spesies, baru sekitar 6.000 spesies tanaman dan hewan yang telah dimanfaatkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan modal dan ketersediaan sarana pendukung investasi, serta rendahnya kualitas tenaga kerja pertanian.
- (3) Tingkat kehilangan hasil dan kerusakan pascapanen hasil-hasil pertanian masih cukup tinggi, yaitu berkisar 5-15 persen. Hal ini antara lain yang menyebabkan mutu produk pertanian masih rendah
- (4) Ekspor produk pertanian Indonesia pada umumnya masih dalam bentuk komoditas primer dan bukan dalam bentuk produk olahan akhir. Di samping memperlemah daya saing, produk pertanian di pasar ekspor dalam bentuk komoditas primer menyebabkan tingkat pendapatan petani juga rendah karena nilai tambah produk tidak dinikmati oleh petani.
- (5) Potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya kultural juga sangat erat terkait dengan pertanian. Kekuatan ini apabila dikelola secara baik, sinergis dan terfokus akan dapat menjadi motor penggerak (*prime mover*) pembangunan pertanian. Strategi pembangunan nasional yang tepat untuk mengenali potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya kultural adalah Strategi Pengarusutamaan Gender. Namun demikian, strategi ini belum dikenal baik dan diterapkan secara luas di sektor pertanian.

Keberadaan Departemen dengan sumberdaya manusia dan kelembagaan layanannya merupakan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan, terutama perannya sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan pertanian. Karena itu, hampir di setiap provinsi dan kabupaten/kota terdapat institusi yang menangani pembangunan pertanian. Demikian pula, untuk

mendukung inovasi teknologi pertanian, di setiap provinsi juga terdapat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Masalah

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Sepuluh di antaranya perlu segera diatasi, yaitu:

(1) Kepemilikan Lahan

Masalah dalam hal kepemilikan lahan terutama berkaitan dengan: (a) masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang berakibat pada semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan; (b) banyaknya lahan petani yang belum bersertifikat, akibat rumitnya proses birokrasi bagi petani dan terbatasnya dana untuk membiayainya; (c) menurunnya produktivitas lahan akibat praktik pertanian yang tidak sehat antara lain karena penggunaan pupuk dan bahan kimia secara berlebihan yang pada gilirannya menjadi salah satu faktor pemicu tingginya alih fungsi lahan; dan (d) banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian namun tidak mempunyai lahan.

(2) Birokrasi

Permasalahan dalam hal birokrasi pada dasarnya lebih terkait dengan aspek koordinasi karena banyaknya lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang pelaksanaannya di lapangan terkait dengan bidang pertanian. Selain itu, kebijakan otonomi yang telah memberi ruang bagi Daerah untuk menentukan sendiri jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintahannya, juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam koordinasi antara jajaran di tingkat Pusat dan Daerah terkait dengan struktur administrasi dan mekanisme kerja di lapangan. Hal ini telah berdampak pada lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

(3) Permodalan

Permodalan merupakan isu klasik bagi siapapun yang menjalankan usaha. Karena sifatnya yang khas, usaha di bidang pertanian khususnya yang dikelola oleh petani seyogyanya mendapatkan pelayanan permodalan yang khas pula dari sektor perbankan. Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani hingga saat ini belum mendapat perhatian dari sektor perbankan. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada lembaga asuransi yang mengembangkan sistem penjaminan untuk meminimalkan risiko usaha di bidang pertanian. Kondisi yang telah berlangsung lama ini telah memaksa petani untuk akrab dengan sistem ijon meskipun dirasakan menjerat.

(4) Keterampilan

Masalah keterampilan sesungguhnya terkait dengan terbatasnya akses petani kepada sumber informasi dan teknologi. Keterbatasan keterampilan petani juga dipengaruhi terbatasnya sumberdaya produktif yang dapat digunakan terkait dengan terbatasnya sarana komunikasi (telekomunikasi, audio visual), listrik, dan transportasi (jalan dan angkutan) yang dapat mendorong kreativitas petani dalam mengembangkan ataupun menerapkan teknologi baru.

(5) Teknologi

Permasalahan teknologi pertanian terutama dihubungkan dengan lemahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang antara lain ditandai dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia nonorganik yang berlebihan sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan. Selain itu, perkembangan teknologi seringkali menyebabkan terabaikannya kearifan budaya dan potensi sumberdaya alam yang pada dasarnya merupakan salah satu kekuatan lokal spesifik tersendiri.

(6) Mentalitas

Permasalahan mentalitas sesungguhnya terkait dengan sempitnya

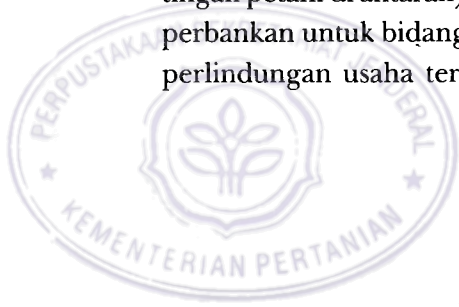
paradigma petani terhadap usaha di bidang pertanian yang ditekuninya. Di satu sisi, petani menggantungkan hidupnya dari berusaha tani, namun di sisi lain sebagian besar petani tidak bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya karena menganggap bertani sebagai tradisi yang diturunkan dan merasa “cukup” dengan hasil yang diperolehnya (subsisten).

(7) Organisasi Petani

Permasalahan dalam hal organisasi petani pada dasarnya dihubungkan dengan kurangnya kesadaran petani akan manfaat organisasi bagi pengembangan usaha pertanian yang dikelolanya. Ketertarikan petani untuk menggabungkan diri dalam suatu organisasi ataupun kelompok cenderung disebabkan oleh adanya unsur bantuan yang diberikan melalui kelompok. Organisasi petani yang ada pada umumnya memiliki ketergantungan pada pihak yang memberikan fasilitasi sehingga kurang mandiri dan terhenti aktivitasnya manakala tidak ada lagi bantuan.

(8) Kebijakan

Kebijakan antarsektor seringkali terkait dengan bidang pertanian sehingga berdampak pada terganggunya kegiatan berusaha tani, seperti halnya kebijakan mengenai pertanahan, infrastruktur, perdagangan, perlindungan hukum, dan lain-lain. Kebijakan pertanahan antara lain terkait dengan sertifikasi lahan, pengakuan hak ulayat, dan perencanaan tata ruang wilayah yang terkait dengan alih fungsi lahan. Kebijakan infrastruktur antara lain meliputi pembangunan irigasi, penyediaan sarana listrik, transportasi, serta komunikasi yang juga terkait dengan kebijakan otonomi daerah dan pembangunan nasional pada umumnya yang masih bersifat sektoral. Kebijakan pemerintah yang juga dirasakan belum berpihak pada kepentingan petani di antaranya adalah dalam hal penyediaan layanan perbankan untuk bidang pertanian, serta subsidi pertanian dan perlindungan usaha terutama terkait dengan kegiatan perda-



Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dan tersedia dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, sementara kemampuan daya beli rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatan. Dengan demikian maka peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan faktor kunci dari peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian juga berpeluang dalam penyediaan bahan baku industri. Penduduk Indonesia yang besar merupakan pangsa pasar untuk komoditas pertanian. Di satu sisi, letak geografis yang strategis dan besarnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan negara lain melihat sebagai potensi pasar. Di sisi lain, Indonesia berpeluang sebagai pemasok bahan baku industri berbasis pertanian baik dalam negeri maupun internasional. Upaya yang telah, sedang dan terus perlu dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penyediaan bahan baku industri adalah peningkatan produksi dan akses, perbaikan sistem distribusi, dan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pola pangan tertentu.

(3) Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

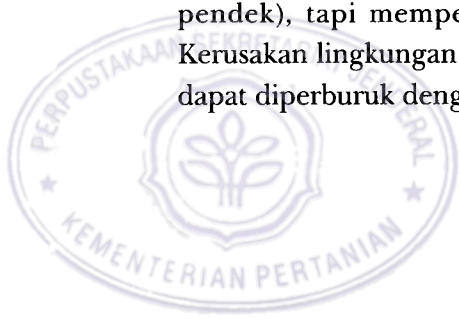
Pembangunan pertanian juga mempunyai kontribusi penting dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) pada tahun 2003 mencapai 42,23 persen dari total tenaga kerja nasional atau sekitar 36 juta orang. Jumlah peng-

angguran terbuka di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 11 juta orang atau 10,3 persen dari angkatan kerja. Kalau sektor pertanian mampu tumbuh 3 persen per tahun, maka sektor ini mampu menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 6 juta orang per tahun. Penyerapan ini akan lebih besar lagi apabila sektor pertanian yang diperhitungkan mencakup industri olahan dan jasa lainnya. Hal ini berarti bahwa dari aspek mengatasi pengangguran sektor pertanian sangat potensial walaupun di sisi lain, pendapatan tenaga kerja non-pertanian tiga kali lebih besar dibanding pertanian. Untuk menjawab tantangan ini, upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah pengembangan agro-industri di pedesaan dan pembukaan lahan pertanian baru terutama di luar Jawa.

(4) Operasionalisasi Pembangunan Berkelanjutan

Dalam membangun usaha pertanian yang berkelanjutan, harus ditunjang oleh kelestarian sumberdaya pertanian yang berkelanjutan. Untuk itu kegiatan pembangunan pertanian harus berlandaskan kepada azas berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya dan usaha pertanian melalui penerapan teknologi pertanian dan kelembagaan secara berkesinambungan bagi generasi kini dan masa depan. Kesenambungan usaha dapat diartikan bahwa usaha tani tersebut dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi petani dan keluarganya, sehingga pemilihan jenis komoditas dan usaha harus sesuai dengan potensi alam dan sosial budaya masyarakat, bernilai ekonomis, pasar tersedia dan produksi kontinyu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berlandaskan pada kelestarian lingkungan, maka pemilihan teknologi dan pengelolaannya tidak hanya didasarkan pada keuntungan sesaat (jangka pendek), tapi memperhitungkan dampak jangka panjang. Kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) misalnya, dapat diperburuk dengan pengelolaan lahan yang hanya untuk



meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek konservasi. Teknologi ramah lingkungan yang sudah dikembangkan dan telah digunakan, antara lain Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang pada dasarnya menekankan pada penggunaan *low external input*. Ke depan, upaya yang perlu ditempuh antara lain adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi GAP dan khusus pada daerah lahan kering (kritis dan DAS) upaya-upaya konservasi baik melalui dana pemerintah maupun partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

(5) Globalisasi Perdagangan dan Investasi

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada dinamika globalisasi yang semakin kuat, baik di bidang perdagangan, investasi, dan konsumsi. Dinamika tersebut merupakan masalah sekaligus peluang dalam pembangunan pertanian. Beberapa implikasi dari dinamika lingkungan internasional tersebut, adalah: (a) setiap negara harus meningkatkan daya saing produknya agar tidak tersisih oleh produk impor; di sisi lain kita dapat memanfaatkan pasar global yang semakin terbuka; dan (b) globalisasi di satu sisi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam negeri dalam hal keragaman, mutu dan keamanan produk pangan; di sisi lain, keragaman produk spesifik Indonesia (seperti tanaman hias, salak, manggis, dan produk olahan) merupakan potensi untuk memasuki pasar internasional.

(6) Terbangunnya Industri Hasil Pertanian Sampai Tingkat Desa

Selama ini wilayah pedesaan lebih banyak berfungsi sebagai pemasok bahan baku bagi industri yang umumnya berada di daerah perkotaan (urban). Hal ini berarti bahwa petani belum dapat menikmati nilai tambah produknya secara optimum. Potensi pengembangan agroindustri di pedesaan sangat besar mengingat sentra-sentra produksi pertanian berada di pedesaan,

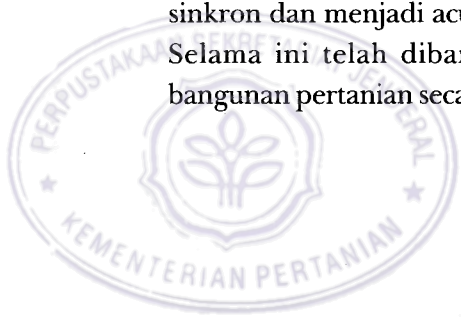
tenaga kerja yang melimpah, dan potensi pasar yang besar. Selama ini potensi agroindustri dan minat berinvestasi di pedesaan terkendala oleh keterbatasan infrastruktur termasuk perbankan. Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terbatas pada pemberian alat-alat/sarana yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Diseminasi teknologi agroindustri telah sering dilakukan, namun belum tepat sasaran.

Ke depan, fokus kegiatan untuk meraih peluang pengembangan agroindustri di pedesaan antara lain adalah: (a) di tingkat Pusat dan Daerah perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur; (b) mengajak investor melalui promosi dan fasilitas kerjasama kemitraan; (c) meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan petani.

(7) Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Sejalan Era Otonomi Daerah

Manajemen pembangunan pertanian di era otonomi daerah menuntut adanya keselarasan program antara Pusat dan Daerah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat lemah, terutama pada awal diberlakukannya otonomi daerah. Provinsi memiliki kewenangan dan dana namun tidak memiliki wilayah, sementara Kabupaten/Kota memiliki kewenangan tetapi dana terbatas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut adanya interelasi dan interdependensi antara program/kegiatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Implementasi kedua Undang-undang ini adalah bahwa program pembangunan yang ditetapkan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus sinkron dan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaannya.

Selama ini telah dibangun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang, di mana prioritas Provinsi



disusun berdasarkan Musyawarah Pembangunan Pertanian Daerah yang mengacu pada prioritas Kabupaten/Kota di wilayahnya. Demikian pula Pusat memfasilitasi pertemuan regional guna menyelaraskan prioritas lintas provinsi dengan prioritas nasional. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah hal ini tidak mudah dilakukan karena masih kentalnya euforia otonomi. Di masa mendatang, upaya ini masih perlu terus dilaksanakan sejalan dengan penyempurnaan manajemen pembangunan pertanian.

Ditingkat Pusat, perlu ditingkatkan koordinasi di dalam dan antar-Departemen. Penguatan koordinasi di dalam Departemen menuntut penjabaran tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas di setiap unit kerja Eselon I, disesuaikan dengan tuntutan dinamika pembangunan. Dalam rangka penguatan koordinasi antar-Departemen, perlu dilakukan pengembangan jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral dan sidang kabinet. Advokasi kepentingan pembangunan pertanian akan lebih efektif bila dikoordinasikan dengan baik oleh Bappenas, Menko Perekonomian dan Menko Kesejahteraan Rakyat.

(8) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tuntutan masyarakat terhadap *good governance* dan kuatnya komitmen pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu merupakan momentum yang sangat tepat untuk mewujudkan tujuan di atas. *Good governance* dicirikan, antara lain keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kendala utama penyelenggaraan *good governance* adalah praktik KKN yang hingga kini masih menjadi masalah kronis. Upaya pengawasan internal dan eksternal telah banyak dilakukan namun belum efektif. Perlu disadari bahwa permasalahan KKN yang mendasar berada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem

rekrutmen dan penjenjangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta moral individu aparat. Sebab itu, penghapusan KKN harus diawali dengan perubahan secara radikal pada setiap sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Strategi

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2009 disusun berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu visi RPJMN yang menjadi landasan dalam penyusunan Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian adalah: “ terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan”.

Pencapaian sasaran pembangunan pertanian akan di tempuh melalui berbagai Strategi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok Strategi, yaitu (a) Memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui PancaYasa; dan (b) Akselerasi pembangunan pertanian. Penjelasan mengenai kedua kelompok Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Strategi yang memperkokoh fondasi pembangunan pertanian ini terdiri dari:

- a. Penyediaan/perbaikan infrastruktur termasuk sistem perbenihan/ perbibitan dan riset. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam bentuk penyediaan/perbaikan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani, tata air mikro, jalan usaha tani, dan lain-lain;
- b. Penguatan kelembagaan. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam wujud pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), dan lain-lain;
- c. Perbaikan sistem penyuluhan. Secara garis besar Strategi ini akan dituangkan dalam bentuk peningkatan kemampuan tenaga

- penyuluh, penyediaan dan penguatan sarana penyuluhan, rekrutmen tenaga dan penataan kelembagaan penyuluhan, pengembangan berbagai metode penyuluhan (magang sekolah lapang, diklat petani, dan lain-lain);
- d. Penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di perbankan. Secara garis besar Strategi ini akan dituangkan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP), fasilitasi uang muka alsintan, fasilitasi skim pelayanan pembiayaan pertanian, dan lain-lain;
 - e. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian. Secara garis besar Strategi ini akan dituangkan dalam bentuk stabilisasi harga produk primer pertanian melalui Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Pertanian (DPM-LUEP), peningkatan kegiatan pascapanen dan pengolahan, mekanisasi pascapanen, pengembangan pasar tani, dan lain-lain.

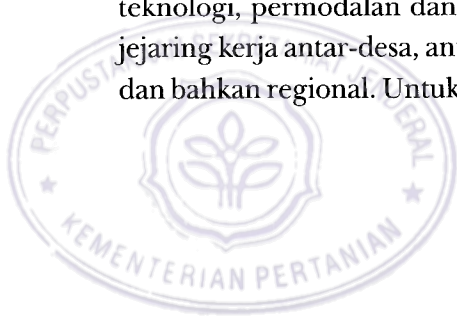
Dalam rangka akselerasi pembangunan pertanian, dilakukan berbagai strategi, yaitu (a) melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat; (b) padanan satu desa-satu komoditas-satu penyuluh; (c) sinergisme seluruh potensi sumberdaya; (d) fokus komoditas; (e) perencanaan berdasarkan *master plan* dan *road map*; (f) penguatan Sistem Monitoring dan Data Base; dan (g) pengarusutamaan gender.

Perencanaan wilayah yang komprehensif ini harus dengan mengikutkan partisipasi komponen masyarakat (Ormas, Organisasi Petani, PerguruanTinggi, dll), mengingat masyarakatlah yang lebih tahu apa sesungguhnya kebutuhan mereka. Membangun masyarakat di sebuah kawasan pertanian tentu saja harus dimulai dari penguasaan data dan informasi di masing-masing desa, yaitu yang menyangkut kekuatan, kelemahan, kesempatan danantisipasi terhadap ancaman dari sistem yang akan kita bangun. Bagaimana

mungkin kita dapat merencanakan pembangunan pertanian dengan baik apabila kita tidak menguasai permasalahan fundamental yang menyebabkan sebuah desa tertinggal, tidak menarik dan penduduknya miskin. Artinya, pengembangan data base pertanian ini harus kita bangun sesegera mungkin. Misalnya: bagaimana kondisi infrastruktur pertaniannya termasuk kelembagaan perbenihan, kelembagaan riset maupun kelembagaan pertanian lainnya, kondisi kelompok tani/gabungan kelompok taninya, sistem penyuluhannya termasuk perhatian kepada penyuluhnya, sistem pembiayaan pertaniannya, serta kondisi pasarnya. Lima hal inilah yang perlu kita bedah sebelum menentukan strategi pembangunan pertanian yang spesifik di sebuah wilayah. Kita perlu menyesuaikan semua fungsi tersebut dengan kondisi geografis sebuah wilayah pertanian, baik dari sisi letak maupun bentuk topografinya.

Berdasarkan pengalaman pembangunan pertanian selama ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan pertanian memerlukan pendekatan wilayah sebagai basis penanganan persoalan. Wilayah pertanian yang seharusnya dijadikan basis pembangunan adalah wilayah administratif desa guna menjamin berjalannya prinsip-prinsip manajemen efektif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga ke pengawasannya. Walaupun berbagai kajian membuktikan pentingnya sistem *agro-forestry* yang menerapkan ragam komoditas dalam satu hamparan untuk mencapai diversifikasi dan keamanan berusaha, namun di dalam sebuah wilayah pertanian desa diperlukan kesepakatan untuk menentukan satu komoditas unggulan yang dapat diusahakan secara terpadu, komprehensif, efisien dan produktif.

Petani dan peternak perlu memiliki organisasi ekonomi yang kuat guna memperjuangkan kepentingan mereka terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar. Untuk itu diperlukan penguatan jejaring kerja antar-desa, antarkabupaten, hingga ke tingkat nasional dan bahkan regional. Untuk mewujudkan visi ini petani memerlukan



tenaga pendampingan mengingat waktu petani untuk menangani hal-hal lain di luar usaha taninya sangatlah terbatas. Untuk keperluan ini, peran penyuluh perlu diperkuat dan diperluas. Dengan pendekatan tersebut, maka kita akan bermuara pada strategi Padanan SATU DESA-SATU KOMODITAS-SATU PENYULUH yang diyakini dapat membantu terwujudnya pertanian modern yang ditangani secara profesional dengan mengedepankan kepentingan petani untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang semakin baik.

Pembangunan pertanian memerlukan sumberdaya, baik berupa modal, teknologi dan SDM. Berbagai sumberdaya tersebut tersebar di lingkungan instansi sektoral pemerintah, baik yang berada di kantor pusat maupun daerah. Sementara di luar lingkup institusi pemerintah, potensi sumberdaya untuk mendukung pembangunan pertanian juga tersebar baik antarpusat dan daerah maupun antarperusahaan swasta dan masyarakat kebanyakan. Semua potensi sumberdaya ini perlu disinergikan secara harmonis untuk bisa mengembangkan kegiatan pembangunan pertanian pada lokasi yang tepat agar memiliki daya dobrak yang lebih besar dibandingkan apabila sumberdaya pembangunan pertanian tersebut digunakan secara parsial oleh masing-masing pihak yang menguasai sumberdaya pertanian.

Dengan beragam jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan pilihan fokus penanganan komoditas pertanian pada tingkat nasional yang dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, peternak, maupun masyarakat konsumen pertanian dalam kurun waktu tersebut. Dari sekian banyak komoditas pertanian yang diusahakan petani dan peternak, terdapat lima komoditas pangan yang menjadi fokus perhatian di tingkat nasional, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Kelima pangan utama tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, masing-masing: swasembada padi berkelanjutan, swasembada jagung 2007-2008, swasembada kedelai 2015, swasembada gula 2009 dan kecukupan daging sapi tahun 2010. Dalam jangka panjang,

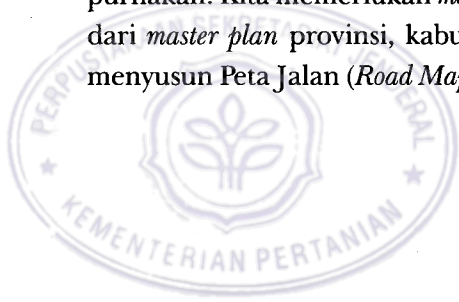
apabila memungkinkan juga diarahkan untuk ekspor.

Komoditas yang akan dikembangkan secara intensif melalui program dan kegiatan pembangunan pertanian difokuskan pada komoditas yang dikategorikan sebagai komoditas strategis nasional yang meliputi:

- (a) Tanaman pangan: padi, kedelai, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah;
- (b) Hortikultura: kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang, dan jeruk;
- (c) Perkebunan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh (tanaman obat); serta
- (d) Peternakan: sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik (unggas).

Di tingkat lokal/kabupaten/provinsi pengembangan diarahkan pada pengembangan ketahanan pangan lokal. Karena itu potensi-potensi karbohidrat lokal yang erat kaitannya dengan budaya lokal menjadi fokus penanganan spesifik bagi wilayah yang bersangkutan, seperti komoditas: pisang, umbi-umbian, dan sagu. Selain itu, dalam revitalisasi pertanian juga dikembangkan komoditas-komoditas spesifik lain yang dibutuhkan untuk menunjang program nasional, seperti jarak pagar untuk bahan baku bio-energi.

Implementasi dari strategi tersebut adalah dengan cara menuangkan segala pikiran, gagasan dan harapan yang berasal dari pendapat seluruh pelaku pembangunan pertanian setempat ke dalam sebuah *master plan* yang dilengkapi dengan *road map* yang jelas agar kita dapat mengukur sampai di mana pembangunan pertanian di suatu wilayah telah berhasil dilakukan, dan apa-apa yang perlu disempurnakan. Kita memerlukan *master plan* pembangunan wilayah mulai dari *master plan* provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa, serta menyusun Peta Jalan (*Road Map*) untuk mencapai visi pertanian yang



disepakati di dalam *master plan* yang disusun. Tanpa *master plan* maka perencanaan tahunan yang kita lakukan akan menjadi parsial dan tidak utuh, dan seringkali menjadi tidak mengena sama sekali dan bahkan tidak menyentuh kepentingan kelompok sasaran atau masyarakat pertanian di desa yang hendak kita bangun.

Pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan memerlukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan. *Master Plan* yang telah disusun bukanlah harga mati yang tabu untuk diubah. Sebaliknya kapan saja dapat dilakukan revisi apabila diperlukan, asalkan dilakukan dengan metode yang benar dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan internasional. Pengumpulan data dan informasi tentang ukuran-ukuran keberhasilan sangat penting kita miliki. Saat ini sangat jarang kita memiliki ukuran-ukuran ini. Data menyangkut produktivitas, harga komoditas, biaya usaha tani yang dikaitkan dengan ongkos tenaga kerja dan harga input, pendapatan petani, sangat sulit kita peroleh dan kalau pun ada tingkat akurasiya masih sangat rendah. Karena itu, para Kepala Daerah perlu memperhatikan betapa pentingnya memiliki ukuran-ukuran ini guna menjadi alat untuk mengetahui sampai di mana sasaran-sasaran yang kita tetapkan dapat dicapai, dan apa yang menjadi kendala utama pencapaiannya.

Pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani mengisyaratkan pada pentingnya peningkatan produksi komoditas pertanian berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Pada kenyataannya di lapangan, pelaku usaha di sektor pertanian adalah mereka yang berusia dewasa dan muda baik laki-laki maupun perempuan. Merujuk kepada berbagai hasil kajian sosial diketahui bahwa aspirasi, permasalahan, kebutuhan, dan pengalaman dari setiap unsur pelaku usaha di sektor pertanian bersifat spesifik antardaerah karena terkait dengan tatanan sosial budaya yang berlaku pada masyarakat yang

bersangkutan. Penerapan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional penting guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian.

Sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian perlu dipahami oleh seluruh fasilitator pembangunan pertanian, khususnya para penentu kebijakan mulai dari tingkat pejabat selaku pengambil keputusan, hingga kepada petugas pelaksana di lapangan. Strategi ini menegaskan tentang pentingnya aspek sosial budaya, sebagai salah satu kekuatan karakteristik spesifik lokalita untuk dimasukkan ke dalam arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional seiring dengan aspek ekonomi sehingga aspek sosial budaya menjadi landasan pertimbangan dalam memberikan fasilitasi pembangunan. Pemahaman tentang strategi ini mengisyaratkan pentingnya ketersediaan data sumberdaya manusia pelaku pembangunan pertanian (petani dan aparat) yang disajikan terpilah menurut jenis kelamin. Melalui strategi ini diharapkan fasilitasi pemerintah dapat diterima manfaatnya oleh setiap unsur pelaku usaha di bidang pertanian, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda yang akibat pengaruh sosial budaya memiliki aspirasi, permasalahan, kebutuhan dan pengalaman yang bersifat khas antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Departemen Pertanian, melainkan sebagian besar kebijakan strategis tersebut berada dalam kewenangan di luar Departemen Pertanian. Beberapa kebijakan operasional yang berada dalam kewenangan dan perlu penanganan dari Departemen Pertanian adalah:

- (1) Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, disertai penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya.

- (4) Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (a) memperjuangkan konsep *Strategic Product* (SP) dalam forum WTO; (b) penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.
- (5) Kebijakan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama petani di pedesaan.
- (6) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
- (7) Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.
- (8) Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.
- (9) Mendorong perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.

Program Utama dan Pendukung

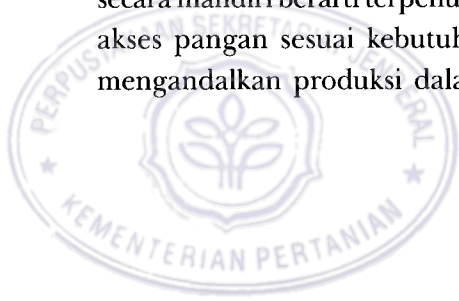
Departemen Pertanian telah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian tahun 2005-2009, yaitu; (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Di samping ketiga program utama tersebut, terdapat dua program pendukung, yaitu; (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; dan (5) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan.

Tujuan program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah agar masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat, dan halal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan ini diarahkan pada: (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan (c) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.

Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan, dan impor untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan. Untuk impor ini, diharapkan tidak lebih dari 10 persen. Distribusi pangan dilakukan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan antarwilayah dan antarwaktu, yang memungkinkan masyarakat seluruh pelosok dapat mengakses pangan secara fisik dan ekonomi.

Konsumsi pangan dibangun dengan meningkatkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan yang cukup melalui kegiatan ekonomi produktifnya, baik dari usaha agribisnis pangan atau dari usaha lainnya, yang memungkinkan masyarakat menghasilkan pendapatan untuk pangan. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang.

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Pembangunan desa mandiri pangan dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri berarti terpenuhinya pasokan pangan dan terjaminnya akses pangan sesuai kebutuhan bagi seluruh masyarakat dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan kemampuan daya beli



masyarakat.

Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk memfasilitasi: (a) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (b) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara bertujuan untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah: (a) meningkatnya manajemen pemerintahan yang dapat mendukung peningkatan kinerja Departemen Pertanian dan para pegawainya, dan (b) meningkatnya penerapan prinsip *good governance* di Departemen Pertanian.

Kegiatan Pokok

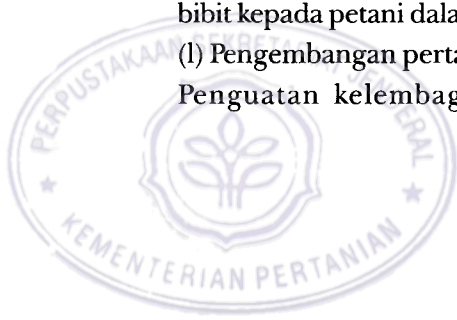
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pokok: (a) Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan; (b) Stabilisasi

harga komoditas primer melalui DPM-LUEP; (c) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan; (d) Pengendalian organisme tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina, dan peningkatan keamanan pangan; (e) Pengembangan pembibitan sapi; (f) Peningkatan kegiatan pascapanen dan pengolahan lahan; (g) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung dan restrukturisasi perunggasan; (h) Mekanisasi kegiatan produksi pertanian primer; (i) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produksi pertanian serta pengembangan kawasan; (j) Penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan; (k) Penguatan kelembagaan perbenihan/pembibitan dalam mendukung ketahanan pangan; (l) Perbaikan mekanisme subsidi pupuk; (m) Pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rawan pangan dan kelembagaan ketahanan pangan.

2. Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis akan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pokok: (a) Pengembangan kegiatan pemasaran komoditas pertanian; (b) Pengembangan bahan baku bio-energi; (c) Pengembangan desa mandiri energi; (d) Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA); (e) Pengembangan agroindustri pedesaan; (f) Pengembangan pertanian terpadu, tanaman, ternak, kompos dan bio-gas; (g) Peremajaan tanaman perkebunan rakyat; (h) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung agribisnis; (i) Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pascapanen dalam mendukung pengembangan agribisnis; (j) Pengembangan fasilitasi pelayanan agroindustri terpadu; (k) Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis; (l) Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup; (m) Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung



pengembangan agribisnis; (n) Penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis; (o) Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan kepada petani.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani akan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pokok: (a) Pembentukan dan pengaktifan kelompok tani dan Gapoktan; (b) Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3; (c) Pengembangan kegiatan magang sekolah lapang pertanian; (d) Peningkatan sistem penyuluhan dan sumberdaya manusia pertanian; (e) Bantuan langsung masyarakat untuk keringanan investasi pertanian (BLM-KIP); (f) Pengembangan kegiatan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis; (g) Penerapan dan pemantapan prinsip *good governance*, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan (termasuk dana dekonsentrasi untuk pendamping Proyek IFAD-READ, dan pembiayaan inpres terkait seperti Inpres No.2 tahun 2007/tentang Lahan Gambut); (h) Peningkatan pengarus-utamaan gender.

C. Panca Yasa Pertanian

Paca Yasa Pertanian adalah strategi terobosan sebagai pilihan prioritas dalam melakukan pembangunan pertanian. Panca Yasa Pertanian dirumuskan untuk mengatasi begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat pertanian yang begitu pelik. Mulai persoalan skala pemilikan lahan yang sempit, infrastruktur yang kurang memadai, manajemen usaha agribisnis/pertanian yang masih tradisional dan individual, kurangnya pemberdayaan petani, keterbatasan informasi pasar dan iptek, hingga persoalan pembiayaan usaha agribisnis.

Dengan Panca Yasa Pertanian berbagai persoalan yang begitu

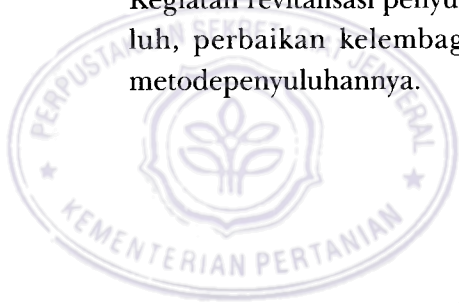
banyak dan pelik di pertanian bisa disederhanakan dengan hanya lima prioritas pemecahan. Panca Yasa Pertanian adalah lima landasan yang mutlak diperhatikan dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan pertanian. “Bila lima landasan ini bisa dipenuhi, maka upaya pembangunan pertanian sudah bisa dibilang bagus,” kata Mentan Anton Apriyantono.

Pertama, Perbaikan Infrastruktur Pertanian. Meliputi upaya-upaya perbaikan saluran irigasi, sistem pengairan, dan pengolahan lahan yang efektif, pembukaan lahan baru, perbaikan jalan usaha tani, penyediaan sarana produksi pertanian yang cukup, pengembangan riset dan inovasi pertanian, serta upaya rintisan membuat kebijakan untuk mendukung reforma agraria dan penciptaan lahan pertanian abadi.

Penanganan masalah-masalah tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian melainkan perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dengan departemen lain maupun dengan pemerintah daerah.

Kedua, Penguatan Kelembagaan Petani. Antara lain dengan membentuk dan memberdayakan kelompok tani-kelompok tani (poktan) dan gabungan poktan (gapoktan) untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) petani. Melalui poktan dan gapoktan, petani dibina dengan informasi dan fasilitas untuk peningkatan produktivitas, perbaikan mutu dan penanganan pascapanen, serta dukungan manajemen usaha tani yang lebih modern.

Ketiga, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Revitalisasi penyuluhan mutlak dilakukan karena eksistensi penyuluh relatif terpinggirkan atau kurang mendapat prioritas pada era otonomi daerah. Upaya ini mendapat payung hukum dengan hadirnya UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kegiatan revitalisasi penyuluhan di antaranya: penambahan penyuluh, perbaikan kelembagaan penyuluhan dan program serta metode penyuluhannya.



Keempat, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Penguatan kelembagaan petani akan terasa tumpul bila para petani khususnya petani kecil tidak bisa mengakses pendanaan yang adil dan saling menguntungkan. Untuk itu, Departemen Pertanian memberikan bantuan langsung masyarakat untuk keringanan investasi pertanian (BLM-KIP), bantuan dana penguatan modal usaha kelompok (PUMK) seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), dan fasilitasi sistem pelayanan pembiayaan pertanian seperti Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kelima, Pengembangan Pasar dan Pemasaran Hasil Pertanian. Termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya peningkatan mutu dan nilai tambah melalui pengenalan teknologi pascapanen dan pengembangan industri olahan hasil pertanian, upaya mediasi dan promosi pemasaran dengan membuka akses dan fasilitasi pemasaran. Melalui Poktan dan Gapoktan petani dibina hingga memiliki akses informasi pasar dan penguasaan manajemen usaha tani. Pembinaan juga diberikan dengan paparan informasi tentang analisa *supply-demand*, perkiraan harga, preferensi konsumen, dan berbagai kebijakan pemasaran lainnya. Jika proses ini sukses nantinya diharapkan tercipta *corporate farming* dengan petani sebagai pemilik saham utamanya.

D. Revitalisasi Pertanian

Revitalisasi pertanian merupakan salah satu jalan dari tiga jalan untuk operasionalisasi program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu yang menggunakan strategi tiga jalur (*triple track strategy*) yang berazas *pro-growth*, *pro-employment* dan *pro-poor*. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut yakni dengan: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 % per tahun melalui percepatan

investasi dan ekspor; (2) pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Departemen Pertanian telah menjabarkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2005-2009 (baca sub-bab Rencana Strategis). Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengibaratkan revitalisasi pertanian ini bagaikan mengumpulkan kembali puing-puing yang berserakan menjadi bangunan yang kokoh yang mempunyai fungsi. “Dulu pembangunan pertanian bisa dikatakan programnya sudah bagus. Kemudian terjadi kemunduran, lalu dibangkitkan lagi sekarang ini. Dulu penyuluhan pernah bagus, tapi kemudian kendor, kini coba dibangun lagi, sarana fisiknya, operasionalnya, jumlah penyuluhnya. Itulah makna dari revitalisasi,” ujar Anton. Dulu Indonesia pernah swasembada, sekarang kita kembali swasembada. “Itu kan revitalisasi,” tambahnya.

Dalam dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005) disebutkan: Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual; dalam arti menyegarkan kembali vitalitas; memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian *at all cost* dengan cara-cara yang *top-down* sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana; tapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh *stakeholder* dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekadar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum

mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan *way of life* dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel.

Revitalisasi pertanian antara lain diarahkan untuk meningkatkan: (a) kemampuan produksi beras dalam negeri sebesar 90-95 persen dari kebutuhan; (b) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (c) ketersediaan pangan asal ternak; (d) nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan (e) produksi dan ekspor komoditas pertanian.

Dokumen RPPK yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan strategi umum dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, yakni sebagai berikut: (a) Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN; (b) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; (c) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan; (d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian; (e) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; (f) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; (g) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian

Arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang adalah: (a) Membangun basis bagi partisipasi petani; (b) Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian; (c) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas; (d) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian; (e) Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna; (f) Mewujudkan sistem inovasi pertanian; (g) Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani; (h)

Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diverdifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan; (i) Mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan; (j) Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh; (k) Menerapkan praktik pertanian dan manufaktur yang baik; dan (l) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

Diakui, ada banyak kebijakan dan strategi yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada di berbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan pengembangan ketahanan pangan.

Untuk itu ada beberapa kebijakan strategis yang dipandang oleh Kementerian Koordinator Perekonomian perlu ditekankan dan memerlukan penanganan segera adalah:

- a. Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dan suku bunga riil positif.
- b. Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya.
- c. Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga

keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya.

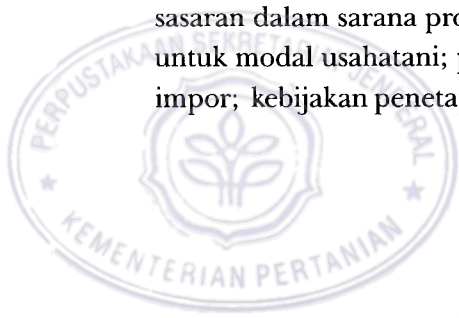
- d. Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (a) memperjuangkan konsep *Strategic Product* (SP) dalam forum WTO; (b) penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.
- e. Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
- f. Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.
- g. Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.
- h. Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.

Sedangkan beberapa kebijakan yang langsung terkait dengan sektor pertanian dan dalam kewenangan atau memerlukan masukan dari Departemen Pertanian yakni:

- a. Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, diarahkan untuk menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai disertai penerapan *reward and punishment* secara konsisten.
- b. Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, diarahkan untuk: peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan

dan manajemen pembangunan pertanian; peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan pertanian; penyelarasan pembangunan pertanian antarsektor dan wilayah.

- c. Kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan diarahkan untuk: peningkatan investasi swasta; penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan; kebijakan pewilayahan komoditas; dan penataan sistem pewarisan lahan pertanian.
- d. Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian diarahkan untuk: menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian; peningkatan peran serta masyarakat; peningkatan kompetensi dan moral aparatur pertanian; penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani; dan pengembangan kelembagaan petani.
- e. Kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diarahkan untuk: pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian; pengembangan lembaga keuangan pedesaan; pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran.
- f. Kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna diarahkan untuk: merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna; mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian spesifik lokasi; pengembangan produk berdaya saing; penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan iptek pertanian; dan percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penjangkaran umpan balik inovasi pertanian.
- g. Kebijakan dalam meningkatkan promosi dan proteksi komoditas pertanian, diarahkan untuk: menyusun kebijakan subsidi tepat sasaran dalam sarana produksi, harga output, dan bunga kredit untuk modal usahatani; peningkatan ekspor dan pengendalian impor; kebijakan penetapan tarif impor dan pengaturan impor;



peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha; perbaikan kualitas dan standardisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil; dan penguatan sistem pemasaran dan perlindungan usaha.



BAB III

FUNGSI LEMBAGA LEGISLATIF

"DPR membantu kita untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan juga untuk melihat apakah program kita berjalan apa tidak."

(Menteri Pertanian Anton Apriyantono)

A. Fungsi Legislasi

Pasal 20A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD 1945 (Hasil Amandemen): Undang-Undang (UU) dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, titik berat pembuat atau pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun di era reformasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen), pembentuk UU bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *"DPR memegang kekuasaan membentuk UU"*. Dengan kata lain, pemegang kendali pembuatan UU adalah DPR. Karena itu, kini DPR berkewajiban menyusun program legislasi nasional

(Prolegnas), dan menyusun perencanaan, analisis, evaluasi, yang didukung oleh penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan. Sedangkan Presiden (Pemerintah) sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen), hanya *berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR*.

UUD 1945 (Hasil Amandemen) juga menyebutkan, selain DPR dan Presiden, DPD juga disebut sebagai lembaga pembuat UU. Karena itu pembentuk UU sesungguhnya ada tiga lembaga yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Namun demikian, legislator utamanya adalah DPR.

Pasal 22D UUD 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bahkan Pasal itu menyebutkan, DPD ikut membahas RUU berkenaan dengan masalah-masalah di atas, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan satu lagi, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai hal-hal tersebut di atas. Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Namun dalam buku ini kita hanya menyorot peran DPR, khususnya Komisi IV, dan Pemerintah (dalam hal ini Departemen Pertanian) dalam pembuatan UU. Dalam pembentukan UU, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, lembaga pembentuk UU. Dalam hal ini lembaga atau pejabat negara yaitu DPR, DPD, dan Presiden. *Kedua*, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ini termasuk pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Ketiga*,

substansi yang akan diatur dalam UU. Jika salah satu komponen utama pembuatan UU ini tidak berjalan dengan baik, maka UU atau produk hukum yang dihasilkannya produk hukum yang cacat. Produk hukum yang dapat dibatalkan melalui uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Agus Ngadino, SH MH, dalam artikel bertajuk *Refleksi 62 tahun DPR RI* (29 Agustus 2007), menyebutkan di era reformasi bandul kekuasaan bergeser dari pemerintah ke DPR, khususnya dalam hal legislasi. Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 (Naskah Asli) menyebutkan: Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen): Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen) disebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU.



Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.

“Dengan adanya perubahan tersebut maka kedudukan DPR jelas merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan fungsi inisiatif di bidang legislasi yang dimiliki Presiden tidak menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan utama di bidang ini. Perubahan ini sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 dengan sungguh-sungguh menerapkan sistem pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” ujar alumnus S2 Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, dan Anggota *Parliament Watch Indonesia (Parwi) Provinsi Jambi*.

Menurutnya, pada prinsipnya Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan utama dalam pembuatan UU. “Kalaupun Presiden diberi hak mengajukan RUU, hak itu tidak memberikan kedudukan kepadanya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, melainkan sekadar memberikan hak kepadanya untuk mengambil inisiatif karena kebutuhan untuk mengatur suatu kebijakan publik. Presiden dapat mengambil prakarsa untuk menyusun RUU tersebut dan kemudian mengajukannya kepada DPR,” papar Agus.

Meski pemerintah bisa berinisiatif mengajukan RUU kepada DPR, namun saat ini inisiatif lebih banyak datang dari Dewan. Sebab, “Dari pengalaman kita selama ini, ketika inisiatif membuat UU itu datang dari pemerintah, pembahasan UU itu jadi berlarut-larut. Debatnya panjang dan jarang sekali inisiatif pemerintah itu berjalan mulus,” aku Sekjen Departemen Pertanian Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, SpI. Ia menduga, kalau sebuah RUU hadir karena inisiatif DPR tentu ada kebanggaan kelembagaan, sehingga DPR ingin sesegera mungkin menyelesaikannya.

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi, menampikinya. Ia menjelaskan, kalau sebuah UU itu inisiatif pemerintah, maka DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) harus dari DPR. Pembuatan DIM ini biasanya lama karena di Komisi IV ada 10 fraksi. “DPR ini lembaga politik, yang ada di sini orang-orang partai politik (Parpol) yang memiliki urusan macam-macam,” katanya.

Sebaliknya, jika UU itu inisiatif DPR, maka DIM-nya dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden bisa menunjuk departemen/ lembaga yang terkait dengan UU tersebut, untuk menyiapkan DIM. UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, misalnya, setidaknya mencakup tiga departemen: Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Kehutanan. “Dengan tiga departemen saja lama, apalagi di sini 10 fraksi. Masukan dari fraksi-fraksi agak susah,” tandas Arifin. Ia lalu menyebut contoh RUU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. “Masukan dari fraksi-fraksi belum, nanti habis lebaran akan kita bahas. Seharusnya ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah melalui pimpinan DPR untuk memperoleh Ampres,” paparnya. Dengan Ampres atau Surat Presiden ini Presiden akan menunjuk departemen atau lembaga yang akan mewakili pemerintah. Karena ini lahan berkelanjutan, wakil pemerintah bisa saja tidak hanya Deptan, tapi juga BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan mungkin juga melibatkan Depdagri (Departemen Dalam Negeri). “Atau bisa saja Ampresnya menunjuk Mentan sebagai koordinator,” terang Arifin.

Di era Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS, DPR periode 2004-2009 ini telah menghasilkan dua UU: UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan traktat internasional tentang Sumberdaya Genetik. Selain itu, DPR kini sedang membahas UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan), serta UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. “Itu semua atas inisiatif Dewan, tapi pemerintah banyak memberikan masukan,” ujar Hasanuddin.

Arifin Junaidi berharap pada akhir tahun ini RUU Nakeswan dan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Migrasi Ikan, dapat diselesaikan. Sedangkan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), serta RUU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan diharapkan selesai pada akhir masa jabatan DPR periode ini. “Kita

sudah sampaikan kepada Baleg (Badan Legislasi),” ujar mantan wartawan itu.

Lalu, berapa lama proses pembuatan sebuah UU? Tidak ada batasan waktu memang. UU tentang Pornografi, misalnya, membutuhkan waktu hampir lima tahun. Sedangkan UU di bidang pertanian, paling lama cuma satu tahun seperti UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. “Tidak ada batasan waktu berapa lama membuat UU. Tapi kurang lebih satu tahun sejak penyusunan sampai pengesahannya sebagai UU,” jelas Arifin.

Lamanya masa pembahasan sebuah UU, lanjutnya, seringkali disebabkan terbatasnya anggaran. Saat Panitia Kerja (Panja) UU Nakeswan bersiap berangkat ke Kopo untuk membahas RUU ini, misalnya, mereka diberi kabar oleh Sekjen bahwa anggarannya sudah habis. “Kita lalu kompromi dengan Deptan bagaimana agar Deptan ikut membiayai supaya pembahasan UU tersebut bisa cepat,” kata Arifin.

Kendala lain, masukan dari fraksi-fraksi saat RUU masih berupa naskah akademis terlambat. Misalnya RUU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, masukan dari salah satu fraksi terlambat disampaikan. “Setelah lama kita tunggu-tunggu, mereka akhirnya berkata, ‘oke kami ditinggal saja’. Kenapa tidak *ngomong* dari dulu. Kalau dari dulu *ngomong*, enam bulan lalu sudah kita selesaikan,” tandas Arifin. Meskipun Ketua Komisi IV, tapi Arifin mengaku tidak bisa menginstruksikan anggotanya untuk mengikuti kemauannya. “Lain dengan instansi pemerintah, kami tidak bisa menegur fraksi.”

Selain itu, adanya materi-materi krusial seringkali juga menyebabkan pembahasan RUU lama. Hambatan lain berupa perkembangan politik, misalnya UU tentang Pornografi. Seringkali gonjangan politik memerlukan energi ekstra untuk menyelesaikannya, dan ini berakibat pada tertundanya pembahasan sebuah RUU.

Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH,SE,MS, menambahkan pembahasan UU membutuhkan waktu

lama karena sulit. Sebuah UU, lanjutnya, memerlukan kajian akademis, studi proyeksi, dan *forecasting study* yang sangat luas. Dan seringkali DPR tak mampu melakukan itu karena beberapa kendala. Misalnya, keterbatasan dana, dan keterbatasan pakar. “Jadi, jangan harapkan anggota DPR bisa mengerjakan itu semua,” ujarnya.

Karena itulah, kata Bomer, suatu RUU memerlukan waktu lama sejak dirancang hingga pengesahannya menjadi UU. Misalnya seperti UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dan UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. “Semuanya memerlukan pembahasan yang lama. Tapi saya berharap sebelum berakhirnya masa sidang yang sekarang ini semua UU itu bisa selesai,” papar doktor lulusan Institut Pertanian Bogor itu.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat tujuh hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Jika RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Maka segala peraturan yang ada di dalam UU itupun berlaku.

UU biasanya melahirkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain, sebagai aturan operasionalnya. Paling lambat satu tahun sejak UU tersebut disahkan, peraturan-peraturan operasional itu harus sudah ada. Namun, seringkali aturan ini tak ditepati. PP dari UU No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ditandatangani tahun 2006, misalnya, sampai sekarang belum ada. “Ini menjadi kendala dalam pelaksanaan UU yang telah disahkan oleh DPR,” ujar Arifin.

Mengapa UU diperlukan? Menurut UU No.10 tahun 2004, UU dalam hirarkhi perundangan di Indonesia berada di bawah UUD 1945. Karena itulah UU memiliki kekuatan hukum yang cukup signifikan. Kekuatan hukum yang pasti. “Payung hukum itu harus ada untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat,” jelas Arifin.

UU No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, misalnya, dibutuhkan karena sekarang ini penyuluh pertanian (juga perikanan dan kehutanan) semakin langka. Padahal kehadiran mereka sangat diperlukan. Penyuluh bisa menjadi agen perubahan atau motivator di tengah-tengah masyarakat. Terbatasnya jumlah penyuluh membuat motivasi masyarakat untuk bekerja di bidang pertanian menjadi menurun. Akibatnya, tenaga di bidang pertanian semakin langka. Yang ada cuma orang-orang tua dan ibu-ibu. Yang muda-muda, pria maupun wanita, lebih senang menjadi buruh pabrik atau pergi ke luar negeri. Padahal di luar negeri, di Malaysia, misalnya, mereka juga bekerja di bidang pertanian. Misalnya bekerja di perkebunan sawit atau karet.

Kehadiran UU di bidang pertanian, menurut Bomer Pasaribu sebagai *public policy* yang memberikan kepastian untuk bertani, berusaha, dan bekerja. Dengan adanya UU No.16 tahun 2006, misalnya, penyuluhan tidak boleh ditelantarkan. Begitupun dengan lahan-lahan pertanian tidak boleh ditelantarkan jika ada UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang kini sedang dalam pembahasan.

Inisiatif pembuatan UU bisa datang dari DPR atau dari Presiden/pemerintah. Berikut contoh UU inisiatif pemerintah: Pemerintah menilai UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibuat tahun 1967 sudah tidak memadai lagi. Karena itu UU tersebut perlu disempurnakan atau dibuat UU yang baru.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian, Suprahtomo, SH,MH,MSi, menyebutkan UU tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan perlu disempurnakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, karena sudah ketinggalan zaman. *Kedua*, UU ini tidak memiliki sanksi pidana. Sanksi pidananya diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP). Semuanya ada lima PP. Menurut kaidah hukum, papir Suprahtomo, sanksi pidana pada PP tidak bisa digunakan untuk menghukumi. Dengan kata lain, sanksi pidana harus dengan norma undang undang. *Ketiga*, UU ini tidak mempunyai sikap. Politik hukumnya tidak jelas. “UU itu ambivalen,” ujarnya.

Selain itu, dari segi substansi, UU ini juga memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, UU ini mengatur impor hanya untuk bibit. Padahal kenyataannya daging, dan bahkan jeroan pun sudah diimpor. Artinya, UU 1967 itu sudah tidak memenuhi kebutuhan. *Kedua*, yang boleh diekspor hanya hewan yang dikastrasi (dikebiri). Namun dalam UU ini tidak ada penjelasan soal hewan yang dikastrasi itu. *Ketiga*, masalah obat hewan yang sangat penting, hanya diatur bahwa untuk menanggulangi penyakit diperlukan obat hewan. Bahan baku obat hewan juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. “Karena itu maka dilakukan koordinasi antara Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan,” kata Suprahtomo.

Menurutnya, substansi sebuah UU harus diatur secara komprehensif menurut paradigma sekarang. Perlu dibuatkan definisi peternakan, sistem agribisnis peternakan, kesehatan hewan, dll. Sistem kesehatan hewan nasional harus dimulai dari penanggulangan penyakitnya sampai kepada kesejahteraan hewannya. “Itulah pendekatan kesisteman.”

Kalau substansinya sudah komprehensif, sudah lengkap, maka materi ini dipresentasikan kepada DPR. Jika DPR setuju maka dijadikanlah program legislasi nasional (Prolegnas) menurut UU No.20 tahun 2004. “Kalau sudah masuk, kita menyediakan anggaran,” kata Suprahtomo. Karena Prolegnas itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR, maka terjadilah harmonisasi program-program legislasi antara pemerintah dengan DPR. Setelah itu disusunlah naskah akademis.



Naskah akademis ini setidaknya bisa menjawab esensi, urgensi, dan argumentasi, serta konsekuensi pengaturannya.

Selanjutnya dilakukan pembahasan antardepartemen untuk disinkronkan. Ada pembahasan dengan Departemen Perdagangan. Misal, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, dll. Kemudian ada pembahasan dengan Departemen Kesehatan. Misal, soal flu burung. Masalah unggasnya urusan Deptan. Tapi, masalah orang yang terkena flu burung menjadi urusan Depkes. Selain itu ada pembahasan dengan Departemen Perindustrian. Misal, soal pakan. Pakan menjadi urusan Departemen Perindustrian. Begitu juga soal perijinan usahanya. Di samping itu UU ini disesuaikan dengan aturan mengenai otonomi daerah dan era globalisasi. “Ini semua kita sinkronkan,” terang Suprahtomo.

Setelah disinkronkan, dibentuklah panitia antardepartemen. Sesudah disetujui lalu diparaf oleh masing-masing Menteri yang terlibat dalam pembahasan. Menteri kemudian mengirim surat kepada Presiden. Isinya permohonan ijin atas prakarsa untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan. Setelah itu Presiden mengirim surat kepada DPR. Isinya, Presiden meminta agar draf UU prakarsa pemerintah ini dibahas bersama DPR. Biasanya Presiden menunjuk wakil pemerintah, misalnya, dalam hal ini Menteri Pertanian.

DPR kemudian membahas draf UU yang diajukan oleh pemerintah. Draft ini lalu dibawa ke Sidang Paripurna, apakah perlu dibuat panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja), atau langsung ke Komisi. Setelah di Komisi, misalnya, lalu ada keterangan pemerintah dan pandangan fraksi-fraksi. Dari sini dibuatlah DIM (daftar inventarisasi masalah). Berdasarkan DIM itulah pembahasan dilakukan. DIM demi DIM, kalimat demi kalimat dipelajari. Masing-masing DIM menunjuk Panja dan menunjuk Tim Perumus untuk sinkronisasi. Tim Perumus lalu melaporkan ke Panja. Panja

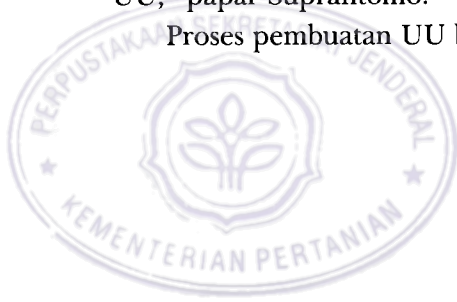
melaporkan ke Komisi. Komisi melaporkan kepada Sidang Paripurna. Sidang ini dihadiri Menteri-menteri yang terkait. Setiap fraksi akan memberikan komentar terhadap RUU tersebut, kemudian pemerintah menanggapi. Draf final RUU kemudian dikirim ke Presiden untuk diundangkan. Kalau dalam 30 hari Presiden belum tanda tangan, otomatis RUU itu menjadi UU. Semua aturan yang ada di dalamnya mulai berlaku.

Pembuatan UU juga bisa atas inisiatif DPR. Beberapa anggota DPR mengusulkan UU kepada fraksi. Atau beberapa fraksi mengajukan kepada Komisi. Setelah disetujui Komisi, usulan masuk ke Badan Legislasi (Baleg). Sesudah dibahas di Baleg, kemudian dikirim ke Sidang Paripurna. Jika disetujui, DPR biasanya mengundang narasumber. Baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lainnya. Kemudian RUU dibawa ke Paripurna. Jika disetujui, RUU bisa diteruskan.

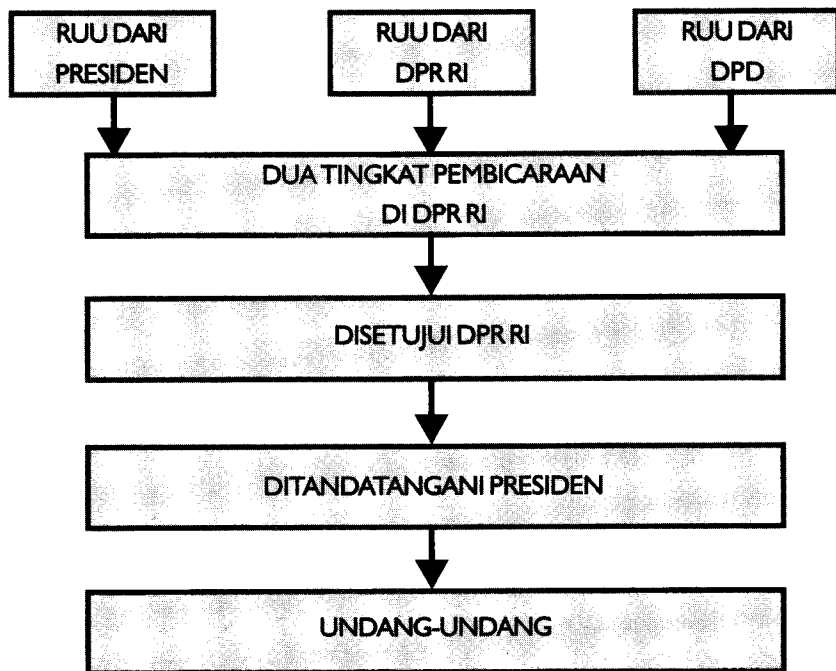
Pimpinan DPR lalu mengirim surat ke Presiden. Isinya, DPR mempunyai prakarsa pembuatan UU. Presiden membalas surat itu. Isinya, untuk membahas UU tersebut Presiden menunjuk Menteri untuk mewakilinya. Contoh UU atas inisiatif DPR, misalnya: UU No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Suprahtomo mengatakan, RUU atas prakarsa pemerintah biasanya alot pembahasannya. Ini karena anggota Dewan membutuhkan waktu untuk memahami substansi dan filosofi di balik rumusan RUU itu. Sebaliknya, RUU atas inisiatif DPR karena dari awal mereka sudah terlibat, pembahasannya relatif lebih mudah. Sebab, mereka sudah mengerti substansi dan filosofi aturannya. “Kalau UU inisiatif dari pemerintah, mereka kan belum pernah diajak membahas. Mereka ikut terlibat ketika sudah menjadi rancangan UU,” papar Suprahtomo.

Proses pembuatan UU bisa disarikan sebagai berikut:



Proses Pembuatan Undang-Undang



B. Budgeting

Pasal 23 UUD 1945 (Hasil Amandemen) menyebutkan: Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Penyusunan RAPBN dimulai dengan pembicaraan pendahuluan. Biasanya pada pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN tahun berikutnya, yaitu: Asumsi dasar ekonomi makro (pertumbuhan

ekonomi, inflasi, tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), nilai tukar, harga minyak, produksi minyak); Kebijakan dalam bidang penerimaan negara; Kebijakan dalam bidang pengeluaran negara; dan Kebijakan Defisit dan Pembiayaannya.

Pada Mei-Juni akan ada pembahasan bersama antara DPR c.q. Panitia Anggaran DPR-RI dengan pemerintah c.q. Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN menjadi dasar penyusunan RUU APBN beserta Nota Keuangannya (Pembicaraan Tingkat I). Pada 16 Agustus Presiden akan menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta Nota Keuangan-nya dalam Rapat Paripurna DPR.

Fraksi-Fraksi di DPR kemudian menyampaikan pendapatnya (Pandangan Umum) atas RUU APBN beserta Nota Keuangan-nya. Pemerintah kemudian menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN beserta Nota Keuangan-nya.

Selanjutnya pada September-Oktober digelar pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangannya antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI. Kemudian pada akhir Oktober, ada Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta Nota Keuangan-nya; Laporan Panitia Anggaran atas Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan RUU APBN); Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU APBN; Pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN; dan Pengambilan Keputusan atas RUU APBN. UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan DPR mengambil keputusan RUU APBN selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBN yang disetujui DPR dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah dapat melakukan pengeluaran sebagaimana APBN tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan tahun anggaran baru APBN dimulai 1 Januari.

Untuk penyusunan anggaran di Deptan, pada pembicaraan pendahuluan di awal tahun, Komisi IV biasanya meminta Deptan untuk menyampaikan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Misal, untuk anggaran tahun 2010, maka pembicaraan pendahuluan itu dilakukan di awal tahun 2009. Di awal 2009 ini juga Komisi IV menanyakan realisasi anggaran Deptan tahun 2008. Berapa persen anggaran yang sudah terealisasi. Dan apa sasaran untuk tahun 2010. “Dari sini kita bisa menentukan berapa besar anggaran untuk Deptan,” terang Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi. Setelah itu angka ini masuk ke Departemen Keuangan dan Bappenas. Dari sini akan ada yang namanya pagu indikatif. Ini yang kemudian dibahas oleh DPR. Dalam pembahasannya, bisa saja DPR tidak setuju dengan besaran angka pada pagu indikatif ini. Misal, DPR meminta anggaran itu dinaikkan jumlahnya. Setelah itu turun pagu sementara. Dan Komisi IV kembali membahasnya.

Setelah pagu sementara dibuatlah RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga). Pembahasan RKA-KL ini biasanya digelar pada bulan September. RKA-KL Deptan untuk tahun 2009, misalnya, dibahas pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, 18 September 2008. Pada Raker itu Komisi IV menyetujui Pagu Sementara RKA-KL tahun 2009 Deptan sebesar Rp 8.424.007.608.000 (8,4 triliun) dengan sumber dana dari: Rupiah murni (Rp 7.746.572.557.000), PHLN (Rp 644.981.273.000), dan PNBPN (Rp 32.453.778.000).

Setelah itu pembahasan Satuan Tiga, pada bulan Oktober-November. Jika Satuan Tiga telah disetujui oleh DPR, maka bulan Januari (tahun berikutnya) anggaran itu bisa dimulai.

Berikut Rancangan Alokasi APBN 2009 Deptan:



A. Alokasi Per Program

No.	Program	Anggaran (Rp.000)
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	3.257.471.000
2	Pengembangan Agribisnis	582.835.572
3	Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.188.845.853
4	Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara	24.880.000
5	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1.373.975.184
	Total	8.424.007.608

B. Alokasi Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.000)	%
Belanja Pegawai Mengikat	902.091.118	10,7
Belanja Barang Mengikat	352.153.093	4,2
Belanja Barang tidak Mengikat	3.790.738.855	45,0
Belanja Modal	830.564.499	9,9
Belanja Sosial	2.548.460.043	30,3
Total	8.424.007.608	100

Keterangan:

- **Belanja Barang tidak Mengikat** sebagian besar berupa barang (saprodi) untuk petani sebagai modal kerja bagi petani untuk menjalankan usaha dan biaya operasional penyuluh, insentif petugas lapang (mantri tani, pengamat OPT, dan pengawas benih)
- **Belanja Modal** yaitu pembangunan sarana prasarana yang menghasilkan aset tetap seperti pembangunan kantor penyuluh-

an pertanian, pompa alat pengolah kompos, rumah kompos, sarana laboratorium, dll

- **Belanja Sosial** yaitu berupa transfer uang langsung ke kelompok tani antara lain PUAP, padat karya untuk perbaikan irigasi dan jalan usaha tani, LM3, pengembangan unit layanan IB pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran ternak, penyediaan energi alternatif melalui pemanfaatan limbah ternak, penguatan kelembagaan distribusi pangan, demonstrasi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

C. Alokasi Pusat dan Daerah

Uraian	Pagu (Rp.000)	%
Pusat	2.054.036.480	24,4
Daerah	6.369.971.128	75,6
Total	8.424.007.608	100

D. Rekap Anggaran Per Jenis Belanja APBN 2009 (Pagu Sementara), dan Rekap Anggaran Per Sumber Pembiayaan APBN 2009, disajikan dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

E. Pagu Anggaran Indikatif vs Sementara APBN 2009

No.	Jenis Biaya	Pagu Indikatif	Pagu Sementara
1	Rupiah Murni	7.709.790,90	7.746.572.557,00
2	PHLN	645.012,00	644.981.273,00
3	PNBP	30.443,00	32.453.778,00
	Total	8.385.245,90	8.424.007.608,00

Anggaran untuk Deptan, menurut sejumlah anggota Dewan, relatif kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan yang mencapai 20 persen APBN. Tahun 2008, anggaran untuk Deptan hanya 0,9 persen dari APBN. Sedangkan untuk tahun 2009, kendati nominalnya naik, tapi persentase terhadap APBN turun menjadi 0,7 persen. Kalau ditotal dengan subsidi, pengairan, kehutanan, serta Departemen Kelautan dan Perikanan, jumlahnya hanya sekitar 4 persen APBN. Bandingkan dengan di negeri lain seperti Australia yang bisa mencapai 15-16 persen APBN. “Sebagai ketua Komisi IV, saya sangat kecewa dengan anggaran yang disediakan untuk pertanian yang teramat kecil,” ujar Arifin Junaidi.

Menurutnya, untuk anggaran Deptan tahun 2009, Komisi IV sebenarnya menetapkan Rp 12 triliun. Tapi pemerintah hanya sanggup Rp 8,7 triliun. “Ketika teman-teman tidak menyetujui 8,7 triliun, saya sebagai ketua dilematis juga. Kalau tidak disetujui, bisa saja Presiden dalam pidato nota keuangan memberi status *blank*, tak ada anggarannya, untuk Deptan. Pilih mana *blank* atau anggaran kecil? Saya punya prinsip: Apa yang tidak bisa kita ambil semua, jangan kemudian ditinggalkan semua. Karena itu 8,7 triliun kita setuju,” papar Arifin.

Hak *budgeting* menurut konstitusi ada di DPR. Bukan di pemerintah. Tapi dalam praktik, DPR seringkali mengikuti keinginan pemerintah. “Seringkali teman-teman di Komisi IV bertanya, sampai sejauhmana sebenarnya hak *budgeting* kita. Kita sudah menetapkan *budget*, tapi yang ditetapkan *kok budget* yang dibuat oleh pemerintah,” katanya.

Karena itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa itu tak setuju dengan pendapat yang mengatakan: Di era reformasi ini kekuasaan lebih berat ke DPR. Menurutnya, bandul kekuasaan tetap lebih berat ke eksekutif. Bukan ke lembaga legislatif. Dengan kata lain, tidak ada pergeseran kekuasaan. “Ibarat lirik lagu, ‘Aku masih seperti yang dulu’. Ini pengalaman saya di Komisi IV,” paparnya.

Kekecewaan juga diungkap Bomer Pasaribu. Menurutnya, anggaran pertanian belum memadai. Padahal sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari pertanian. “Dibanding anggaran pendidikan yang mencapai Rp 224 triliun, anggaran pertanian yang hanya Rp 8,5 triliun itu tak ada artinya,” tegasnya.

Hal senada dikatakan rekan Bomer di Komisi IV, Drs H Mardjono, MM, PhD. Menurutnya, kalau pertanian menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia, maka seharusnya anggaran untuk pertanian sama dengan pendidikan. “Kalau anggaran untuk pendidikan dimasukkan dalam UUD sebesar 20 persen, mengapa untuk pertanian tidak? Bisakah orang mendidik dan pintar tapi perutnya lapar?” katanya.

Rendahnya anggaran pertanian juga dikeluhkan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Menurutnya anggaran pertanian tidak bisa besar karena tidak mudah untuk menentukan prioritas pembangunan. APBN ‘terkurus’ untuk bidang pendidikan —yang dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen) ditetapkan sebesar 20 persen APBN—, membayar utang, dan subsidi seperti BBM. Belum lagi prioritas untuk kesehatan dan infrastruktur. “Kalau 20 persen sudah diambil ke sana, yang lain dapat apa?” ujar Anton.

Anton bahkan berpendapat, yang 20 persen itu mestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena ia akan menunjang semua bidang. “Ini barangkali yang perlu dibicarakan lagi. UUD itu bahkan mungkin perlu kita gugat juga, jangan hanya pendidikan yang ditetapkan 20 persen, kenapa pertanian tidak 10 persen, misalnya.”

Meski demikian Anton mengingatkan, anggaran pembangunan pertanian itu tidak hanya ada di Deptan. Tapi juga ada di Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain itu juga ada subsidi untuk pupuk ada benih. Jadi, “Kalau kita lihat anggaran pertanian seluruhnya, sesungguhnya itu tidak jelek. Tapi mestinya memang bisa lebih besar

dari itu,” ujar Mentan.

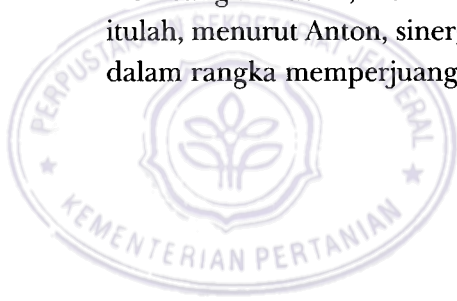
Menurutnya, anggaran pertanian idealnya 10 persen APBN. Ini kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan. Tapi buru-buru Anton menambahkan, yang lebih penting sesungguhnya programnya. Bukan jumlah anggarannya. Sebab, APBN itu hanyalah salah satu sumber, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar. “Itu yang dibutuhkan dari APBN yang tidak bisa dicover dari yang lain,” papar Anton.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar termasuk untuk penelitian masih kurang. Pembangunan, lanjut Anton, pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dan pemerintah menyediakan infrastruktur dasarnya. “Jadi, kita harus pandai-pandai memanfaatkan anggaran yang ada.”

Demikian juga pengeluaran untuk subsidi, harus benar-benar selektif. Mana subsidi yang betul-betul diperlukan, dan mana subsidi yang bisa dialihkan. Sebagai contoh, subsidi pupuk untuk tahun 2009 bisa mencapai Rp 20 triliun. Subsidi ini bisa dikaji ulang. Misal, sebagian atau bahkan seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. “Pupuk tidak disubsidi itu suatu pilihan. Saya cenderung lebih baik membangun infrastruktur, sebab itu langgeng,” terang Anton.

Kalaupun ada subsidi pupuk, ujarnya, subsidi diprioritaskan untuk petani kecil atau penggarap yang luas lahannya maksimum dua hektare. “Kita akan melangkah ke sana sehingga yang disubsidi benar-benar *selected*,” kata Anton.

Selama ini, akunya, Deptan sudah berusaha selektif dalam memberikan subsidi. Tapi ini tak gampang. “Kita berusaha makin *selected*, sehingga kalau anggaran subsidi 20 triliun untuk pupuk, sebagiannya, 10 atau 15 triliun, untuk infrastruktur, kita bisa membangun waduk, membangun irigasi. Ini suatu pilihan.” Karena itulah, menurut Anton, sinergi Deptan dengan Komisi IV harus kuat dalam rangka memperjuangkan sektor pertanian.



C. Pengawasan

Semua program yang telah ditetapkan dalam RKA-KL, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), maupun dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) harus diawasi oleh DPR agar capaian target-target yang sudah ditetapkan itu bisa dipenuhi pada penghujung tahun yang bersangkutan. Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi, menyebutkan sesuai dengan fungsi DPR, pengawasan bisa dilakukan melalui beberapa hal. *Pertama*, melalui Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon 1 Departemen Pertanian. Melalui rapat-rapat ini Komisi IV bisa menanyakan kepada pemerintah tentang pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah dibicarakan saat Raker atau RDP.

Kedua, melalui Kunjungan Kerja (Kunker) pada masa reses. Dari kunjungan ini akan ditemukan persoalan-persoalan yang ada dalam pelaksanaan program-program pembangunan. DPR akan mendengar langsung dari masyarakat, apa persoalan yang muncul di lapangan. Hasil temuan itu nantinya akan disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui pertanyaan tertulis dan Menteri menjawab secara tertulis pula. Dan biasanya pada saat Rapat Kerja atau RDP, hasil-hasil temuan itu ditanyakan kembali.

Ketiga, pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan kerja perorangan. Pada masa reses, anggota Dewan pulang ke daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Hasil temuan atau aspirasi ini akan disampaikan kepada Menteri atau pejabat eselon 1. Kunker Perorangan itu hanya di lingkup daerah pemilihan.

Keempat, dari masyarakat yang datang langsung menyampaikan aspirasi atau beraudiensi dengan anggota Dewan di Gedung DPR RI. Anggota Dewan lalu meneruskan aspirasi atau temuan ini kepada Menteri saat Raker. DPR mengingatkan Menteri akan hal-hal yang tak sesuai dengan apa yang telah diputuskan bersama saat Raker.



Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sulawesi Selatan, salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Kelima, pengawasan melalui Kunjungan Lapangan (Kunlap). Kunlap ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang datang ke DPR. Kunlap juga bisa dilakukan karena DPR mendeteksi adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan. Misalnya, DPR mendeteksi harga pupuk bersubsidi melambung tinggi. Untuk memastikannya anggota DPR lalu mengadakan Kunlap. Di lapangan, DPR akan melihat ketersediaan pupuk, distribusinya, harga jual, dll.

Atau DPR mendeteksi ada penyimpanan program Raskin (beras untuk orang miskin). Misalnya, per keluarga tidak menerima 15 kg, tapi 10 kg. Atau satu kg tidak ditebus dengan harga Rp 1.600, tapi Rp 2.000. Semua hasil temuan ini akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat eselon 1. Bahkan jika dianggap perlu, DPR bisa memanggil atau mengundang Menteri untuk melakukan Raker. Kunlap bisa dilakukan kapan saja, tidak menunggu masa reses.

Arifin menyebutkan, Kunjungan Kerja maupun Kunjungan Lapangan merupakan agenda Komisi. Sedangkan Kunjungan Kerja



Perorangan merupakan kunjungan pribadi di daerah pemilihan. Kunjungan kerja pada masa reses. “Di sana kita bisa menemui masyarakat atau bisa langsung mengonfrontir dengan instansi pemerintah. Misal soal Raskin, Bulog mengatakan sudah menyalurkan Raskin dengan baik, setiap kepala keluarga (KK) memperoleh 15 kg. Tapi saat kita tanyakan kepada masyarakat, mereka mengatakan hanya menerima 4 kg dengan harga Rp 2.000 per kg. Jadi kita melakukan cek dan recek. Hasil temuan ini kita bawa ke Raker,” ujarnya.

Kunjungan kerja atau kunjungan lapangan, prinsipnya juga seperti itu. Kunker yang dilakukan pada masa reses itu berkenaan dengan tugas Komisi IV secara keseluruhan. Karena itulah saat Kunker, Komisi IV berurusan dengan masalah pertanian, perikanan, kehutanan, dan pangan. Seperti diketahui, Komisi IV bermitra dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog (urusan Pangan). “Semua fraksi terlibat dalam Kunker,” papar Arifin.

Kunlap dilakukan secara *case by case*. Kunjungan karena ada kasus tertentu. Untuk ini Komisi IV biasanya mengirim tim 4-5 orang. “Kalau masalah pupuk, ya kita urus soal pupuk saja. Tidak urusan Komisi IV secara keseluruhan. Masalah Raskin ya Raskin saja, masalah *illegal fishing* ya *illegal fishing* saja.”

Bomer Pasaribu menambahkan, terlalu banyak yang harus diawasi oleh Komisi IV. Misalnya, penggunaan anggaran yang ada di pertanian, perikanan dan kehutanan, untuk menjamin prioritas pangan. Pemberian subsidi seperti subsidi untuk pupuk dan benih, serta pembangunan infrastruktur, juga harus diawasi pelaksanaannya. Termasuk pencetakan-pencetakan sawah baru.

Pengawasan ketat, papar Bomer, juga dilakukan untuk anggaran penelitian dan pengembangan (litbang). Sebab litbang ini salah satu yang paling lemah di Indonesia. Hasil-hasil litbang yang diaplikasikan secara konkret masih kurang. Karena itu, “Untuk mengawal pelaksanaan ini, Dewan harus mau menjadi pengawasnya. Pengawasan

yang dilakukan oleh DPR sampai ke daerah karena pertanian itu banyak di daerah-daerah,” ujar Bomer.

Pengawasan, timpal Arifin, juga dilakukan untuk bidang legislasi. Misalnya, Komisi IV selalu bertanya kepada Deptan mengapa Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, belum ada. “Setiap Rapat Kerja dengan Mentan selalu saja ada anggota yang menanyakan soal itu. Ini bagian dari pengawasan,” paparnya.



Ketahanan pangan menjadi perhatian serius para anggota Komisi IV DPR RI saat mengadakan kunjungan lapang.

D. Masa Sidang dan Jenis Rapat

Tahun Sidang DPR RI dimulai pada 16 Agustus dan diakhiri pada 15 Agustus tahun berikutnya. Jika 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, Masa Reses ditiadakan.

Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR. Sedangkan Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.

Acara pokok pada hari permulaan Tahun Sidang adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Jika Presiden berhalangan hadir, Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan. Isinya terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan, dan masalah-masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang. Sedangkan di ujung Tahun Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan. Isinya terutama menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa Reses berikutnya, dan masalah-masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang.

Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang. Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan pidato penutupan. Isinya terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan



Menteri Pertanian Anton Apriyantono memaparkan program-program pembangunan pertanian saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI.

DPR yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.

DPR mengenal enam jenis rapat. Setiap rapat mempunyai tujuan, ruang lingkup, dan jangkauannya sendiri. Rapat-rapat tersebut adalah Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, serta rapat masing-masing alat kelengkapan DPR.

Rapat Paripurna adalah rapat seluruh anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Rapat ini merupakan forum tertinggi dalam tugas dan wewenang DPR.

Rapat Paripurna Luar Biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses atas permintaan Presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR, dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah, atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang Anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.

Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus, dengan Pemerintah (dalam hal ini Presiden atau Menteri/pimpinan lembaga

setingkat Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya) atas undangan Pimpinan DPR. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran atau pimpinan Panitia Khusus.

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Subkomisi, Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus.

Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara Subkomisi, Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus.

E. Tidak Asal Berkunjung dan Bertanya

Pada masa reses anggota Komisi IV DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Pada 2-6 November 2008 lalu, misalnya, Komisi IV mengadakan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada masa reses sebelumnya, reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008, tepatnya pada 20-24 Juli 2008, mereka mengunjungi Provinsi Papua Barat. Kunjungan kerja ini dipimpin oleh HZ Arifin Junaidi. Sementara rombongan yang lain, 3-7 Agustus 2008, mengunjungi Kalimantan Timur (dipimpin oleh Ir H Suswono, MMA). Pada tanggal yang sama juga ada kunjungan kerja ke Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Drs Ismail Tajudin.

Menurut Suswono saat kunjungan kerja itu Komisi IV biasanya bertemu dengan pemerintah daerah. Bertemu dengan kelompok masyarakat sasaran program seperti petani, nelayan, dan penyuluh. “Kami berdialog dengan mereka. Mendengarkan laporan secara formal apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan,” ujarnya.

Tak jarang, papar Suswono, saat kunjungan ke lapangan itu ditemukan sejumlah pelanggaran. Ia misalnya pernah menemukan Raskin (beras untuk warga miskin) menumpuk di salah satu gudang di Brebes. Atau temuan 200 ton menir di gudang Bulog. “Bagaimana ada menir bisa masuk ke gudang Bulog. Ini kita laporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Temuan lainnya, penimbunan pupuk bersubsidi. “Dia bukan distributor atau toko resmi, tapi dia menimbun pupuk dalam jumlah yang banyak. Ini juga kita laporkan langsung ke aparat hukum.”

Temuan serupa juga dialami Ketua Komisi IV, HZ Arifin Junaidi. Menurut ketentuan, setiap kepala keluarga (KK) memperoleh jatah



Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, awal November 2008. Kunjungan dilakukan pada masa reses.

15 kg Raskin. Setiap kilogramnya ditebus seharga Rp 1.600. Program Raskin diperuntukkan bagi 19,7 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Namun, di suatu daerah, Arifin pernah menemukan seorang kepala desa membagikan Raskin untuk seluruharganya. Miskin maupun kaya. Setiap warga cuma memperoleh 4 kg (bukan 15 kg). Bukan karena mereka tidak mampu membeli 15 kg. “Itu kebijakan kepala desa. Daripada diprotes atau didemo warga, lebih baik ia membagikan Raskin untuk seluruh warga,” ujar Arifin. Sementara di tempat lain, satu kg Raskin dijual Rp 2.000 (bukan Rp 1.600).

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Bomer Pasaribu, menuturkan, ia memiliki catatan perkembangan program pembangunan di bidang pertanian. Baik yang dilaporkan secara khusus oleh pemerintah, maupun laporan berbagai pihak seperti LSM dan masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang ia jadikan bekal saat mengadakan kunjungan kerja.

Selain itu, ia juga berbekal ‘kamus’ RKP-RKP di bidang pertanian. Dengan kamus ini ia bisa melakukan cek dan recek atas program-program pembangunan yang telah dibahas dan disepakati saat Raker dengan Mentan. “Dalam kenyataannya di lapangan, ada program yang sudah dijalankan, tapi ada yang tidak. Ini tentu menjadi catatan kita,” papar Bomer.

Sementara itu Hj. Mahsusoh Ujiati, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kerap mengadakan kunjungan perorangan (pribadi) ke daerah pemilihannya. Di sana ia bertemu dengan konstituennya. “Kita mengadakan pertemuan dengan kelompok tani di Magetan. Banyak sekali usulan dari mereka,” ujar Mahsusoh.

Hasil-hasil temuan anggota Komisi IV saat mengadakan kunjungan kerja itu nantinya akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. Atau menanyakannya secara langsung kepada Menteri saat ada Raker.

BAB IV

MEMBANGUN PERTANIAN, OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN GLOBAL

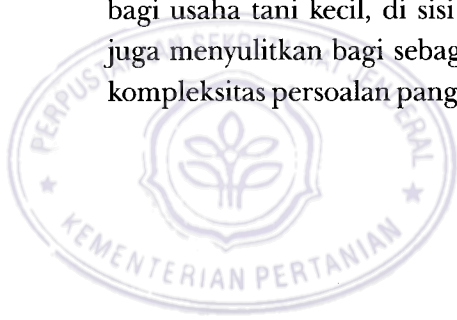
“Sepanjang itu tidak melanggar aturan ya kita akomodasi karena yang penting pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jalan itu bisa melalui mana saja.”

(Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS)

Ada kompleksitas dalam membangun pertanian dan dalam menyejahterakan petaninya. Di satu sisi, pertanian harus bisa meningkatkan produksi berbagai produk pertanian. Di sisi lain petani produsennya pun perlu disejahterakan. Itulah tantangan terbesar dalam membangun pertanian.

Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS, mengatakan di satu sisi petani-petani Indonesia harus bisa mencukupi kebutuhan pangan bangsanya, sementara di sisi lain pemilikan lahan mereka sangat terbatas. Mereka akhirnya miskin.

“Di satu sisi harusnya harga pangan pada tingkat yang layak bagi usaha tani kecil, di sisi lain harga pangan yang terlalu tinggi juga menyulitkan bagi sebagian penduduk Indonesia. Ini memang kompleksitas persoalan pangan Indonesia dikaitkan dengan kesejah-



teraan petani,” tambah suami Ir Rossi Rozanna Septimurti Apriyantono, MKes.

A. Membangun Pertanian

Diperlukan dana/anggaran, komitmen, kreativitas, kemampuan manajemen serta lobi-lobi dalam membangun pertanian, khususnya untuk bisa mengatasi kompleksitasnya. Penentuan skala prioritas kegiatan, petani dan wilayah sasaran menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Bagi Mentan anggaran pembangunan pertanian selama ini tidaklah jelek, walau mestinya bisa lebih besar lagi. “Anggaran untuk pembangunan pertanian itu *not to bad*, tetapi harusnya bisa lebih besar dari itu, karena ini kan hajat hidupnya lebih dari separuh penduduk Indonesia,” katanya.

Anggaran pertanian tahun 2008 sebesar Rp 8,306 triliun. Di luar itu, masih ada dana untuk pembangunan pertanian yang berada di departemen lain. Antara lain anggaran dalam bentuk subsidi pupuk, benih dan bunga kredit di Departemen Keuangan, nilainya sekitar Rp 25,6 triliun. Dana untuk dukungan pembangunan infrastruktur pertanian di Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 5,5 triliun. Juga ada dana di Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 7,2 triliun dan di Kementerian lainnya seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang nilainya sekitar Rp 2,2 triliun.

Pada tahun 2009, APBN untuk pertanian direncanakan naik sebesar Rp 118,5 miliar atau naik 1,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Deptan pada tahun 2008. Jadi, RAPBN Departemen Pertanian untuk tahun 2009 sebesar Rp 8,424 triliun atau sekitar 0,2 persen dari PDB Nasional.

Idealnya, anggaran untuk Deptan menurut Mentan Anton adalah

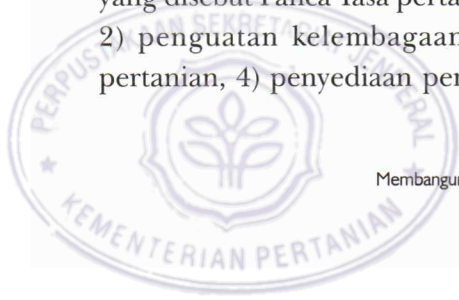


APBN untuk pembangunan pertanian terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Salah satunya untuk pencetakan sawah baru.

10 persen dari total APBN. “Idealnya anggaran Deptan itu sepuluh persen, kalau kita ingin leluasa, ingin mengentaskan kemiskinan,” tambah doktor lulusan Kimia Pangan Universitas Reading, Inggris ini.

Meski demikian Anton Apriyantono tidak mempersoalkan besarnya anggaran Deptan itu. Baginya berapapun anggarannya, yang penting adalah programnya. APBN hanyalah salah satu sumber dana untuk membangun. APBN terutama digunakan dalam membangun infrastruktur dasar yang tidak bisa dicover dari yang lain dan prioritas kegiatan dalam meningkatkan produksi pertanian, mutu dan daya saingnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan anggaran yang ada itulah penentuan prioritas dalam membangun pertanian dilakukan. Mentan memilih menetapkan untuk membangun fondasi pertanian Indonesia melalui lima pilar yang disebut Panca Yasa pertanian, yakni: 1) infrastruktur pertanian, 2) penguatan kelembagaan petani, 3) revitalisasi penyuluhan pertanian, 4) penyediaan pembiayaan, dan 5) jaminan pemasaran.



“Dengan lima pilar ini saja, kalau bisa penuh sudah bagus,” katanya.

Selain APBN, Deptan juga mendorong masuknya dana investasi pertanian dari swasta dan masyarakat. Karena pembangunan itu pada dasarnya merekalah yang melaksanakan dan pemerintah menyediakan infrastruktur dasar. “Jadi pandai-pandainya memanfaatkan anggaran yang ada saja,” urainya.

Bahkan katanya, kalau masih memungkinkan untuk berpikir kembali dana subsidi pun bisa direalokasikan. Menurutnyanya harus dipikirkan kembali mana subsidi yang memang betul-betul diperlukan dan mana yang sebetulnya bisa dialihkan. Persoalannya, pada saat sekarang ini Indonesia pada kondisi yang secara relatif status quo karena ada hajat politik yang besar tahun 2009, sehingga Anton mengaku belum bisa membuat suatu perubahan yang besar. “Kita harapkan perubahan besar itu bisa terjadi pada 2010,” katanya.

Sebagai contoh, lanjut Anton, ada pilihan bagi Indonesia memberikan subsidi pupuk yang besarnya bisa sampai Rp 20 triliun untuk tahun 2009, tapi setengahnya, tiga perempatnya atau seluruhnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pupuk tidak lagi disubsidi. “Itu suatu pilihan. Ini suatu hal yang perlu dikaji secara serius,” katanya. Bagi Anton lebih baik membangun infrastruktur karena itu langgeng. Hanya dia sadar akan ada gejolak sebagai dampak dari pilihan itu, makanya perlu dikaji secara serius.

Kreativitas dalam membangun pertanian pun diperlukan. Di antaranya untuk mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan. Contohnya, distribusi pupuk bersubsidi yang sampai sekarang pun hasilnya belum seperti yang diharapkan, yakni petani belum bisa menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, mulai 1 Januari 2009, pemerintah telah menetapkan penyalurannya melalui sistem tertutup yakni langsung ke kelompok tani. Mekanismenya, petani dalam kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK adalah semacam proposal kelompok tani berisi

antara lain tentang berapa pupuk yang dibutuhkan, berapa luas ia menanam, dan berapa dana yang dibutuhkannya. Sembari program ini berjalan, Mentan juga telah menetapkan prioritas yang diberikan subsidi yakni hanya untuk petani kecil saja atau yang luas lahannya maksimum dua hektare.

Lobi-lobi juga perlu dilakukan. Soalnya, dalam menyusun anggaran pembangunan Departemen Pertanian harus merembugnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya itu. Sampai kepada penentuan program, sasaran petani dan wilayahnya seringkali harus dikompromikan dengan Komisi IV DPR RI. Sebab, DPR mempunyai hak untuk membuat anggaran yakni hak budget. Deptan dan Komisi IV pun masih harus melakukan lobi dan meyakinkan pihak terkait bahwa pertanian penting sehingga kue anggaran pertanian bisa dinaikkan.

Dalam proses penentuan APBN itu menurut Mentan memerlukan pembicaraan-pembicaraan yang bukan hanya formal. Tapi perlu pembicaraan-pembicaraan informal, atau pendekatan personal. “Saya kira itu sebagai yang lumrah di dalam proses bernegara. Dan hal seperti itu bukan hanya terjadi di negara kita,” tandasnya.

Lobi adalah istilah untuk pembicaraan-pembicaraan informal. Terkadang untuk itu perlu melalui proses yang panjang dan berliku. Curiga akan adanya maksud tertentu (*vasted interest*) tidak jarang muncul dalam lobi di forum informal maupun formal. Prinsip yang dipegang Mentan adalah hanya memegang komitmen untuk ingin memperbaiki keadaan pertanian dan petani Indonesia. “Kita tidak ada *vasted* di sana, walaupun kadang-kadang ada juga kecurigaan,” ungkapanya.

Banyak contoh kecurigaan dari kalangan DPR terhadap Deptan. Misalnya pada waktu merekrut sekitar 26 ribu penyuluh honorer sampai tahun 2009, juga untuk program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di 11 ribu desa pada tahun 2008. “Kadang-kadang kita dicurigai apakah ini politisasi, PKS-sasi?,” ungkap Anton

Apriyantono.

Di situlah perlunya lobi dan penjelasan. Untuk itu lanjut Mentan, forumnya tidak cukup hanya forum formal, hingga akhirnya mereka yakin bahwa Deptan tulus bahwa dalam masalah-masalah yang dicurigai itu tidak ada unsur politisasi. Hanya dia juga mengakui bahwa kemungkinan ada yang memanfaatkan itu bisa saja, namun Deptan berusaha dan berupaya untuk menekan agar hal itu tidak terjadi. Dan yang terjadi kemudian, malah semua ingin sama-sama memanfaatkan dalam arti untuk tujuan yang baik. “Sepanjang itu tidak melanggar aturan ya kita akomodasi karena yang penting pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jalan itu bisa melalui mana saja,” katanya.

Ada tiga kunci yang dipegang Mentan untuk menghilangkan kecurigaan. Pertama-tama, lanjutnya, program pembangunan harus dimulai dari niat yang bersih. Selain itu, program yang dirancang bukan untuk kepentingan politik atau untuk golongan tertentu. Program-program harus betul-betul dirancang untuk memperbaiki kondisi masyarakat. “Kalau kita yakin bersih, tulus, tinggal bagaimana kemudian memberikan penjelasan,” ungkapnya.

Penjelasan itulah kunci yang kedua untuk menghilangkan kecurigaan. Untuk memberikan penjelasan prosesnya panjang dan tidak cukup di forum formal. Yang ketiga, kita buktikan di lapangan, bahwa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. “Dan alhamdulillah itulah kuncinya kenapa kemudian terjadi kerjasama yang baik, akhirnya mereka mendukung,” papar Mentan.

Memang, sebuah program pembangunan pertanian selalu direncanakan dengan baik. Apalagi sudah ada Undang Undang yang mengaturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertanian Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, SpI, mengatakan program pembangunan pertanian dibuat mengikuti aturan UU tentang Sistem Perencanaan Nasional. Bahwa perencanaan itu dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Untuk pertanian namanya

musrenbangtan atau musyawarah perencanaan pembangunan pertanian. Yakni, musyawarah membuat program dimulai dari kecamatan. Program-program dari kecamatan naik ke kabupaten, dari kabupaten lalu ke tingkat provinsi dan lalu berjenjang ke tingkat nasional.

Setelah program ditentukan, lalu dilihat berapa biayanya. Juga dilihat, relevansinya untuk mencapai sasaran-sasaran produksi, sasaran pendapatan, sasaran produk domestik bruto, sasaran berkembangnya nilai tambah. “Setelah kita tetapkan sasarannya, lalu kita bagi-bagi tugas,” tambah doktor sosial budaya pertanian lulusan Prancis ini. Misalnya, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ditentukan berapa persen peran petaninya, peran investor swasta berapa persen. Juga ditentukan, besar porsi atau peran pemerintah. Dan di bidang apa?

Ada *guide line* yang menjadi pegangan pemerintah pusat dalam musyawarah perencanaan pembangunan pertanian. Sesuai dengan tugasnya, pemerintah pusat membuat pedoman kriteria standar prosedur, lalu disosialisasikan ke bawah. “Misalnya, misinya seperti ini, sasarannya seperti ini, konsentrasi utama kita seperti ini, lalu kami minta bantuan kabupaten seperti ini, maka kabupaten akan merancang musrenbangtan,” ungkap Hasanuddin.

Usulan program dari daerah biasanya banyak masuk ke Departemen Pertanian. Pada sisi lain, Departemen Pertanian sudah memiliki Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah juga memiliki rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun (RPJM), rencana pembangunan jangka panjang sampai 2025. Juga ada rencana tahunan yang disebut rencana kerja pemerintah (RKP). Dalam RKP itu ditetapkan rumusan sasaran-sasaran pembangunan termasuk sasaran pertanian. RKP pertanian itulah yang tiap tahun dipresentasikan Deptan kepada Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja (Raker).

Meski pemerintah pusat sudah menetapkan arah pembangunan pertanian, karena daerah boleh mengusulkan dan meminta,

kecenderungannya pemerintah daerah (Pemda) mengajukan usulan yang sebesar-besarnya. Karena itulah maka usulan itu di Deptan dipilah-pilah, mana yang sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan tentu saja kepentingan daerah. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu tak bisa dipisahkan. Hanya perlu filter. Setelah klop, akhirnya ketemu pagu indikatif anggaran. Misalnya, pagu indikatif Deptan itu Rp 10 triliun. Setelah dirinci ke program anggaran usulan daerah, bila ternyata tidak masuk maka dilakukan pemilihan berdasarkan prioritas. “Ini adalah politik anggaran dari sisi pemerintah,” tambah Hasanuddin Ibrahim yang pernah menjadi Direktur Tanaman Semusim Ditjen Perkebunan tahun 2001.

Bahan itulah yang dibawa Raker dengan Komisi IV DPR RI. Biasanya bisa selesai dalam tiga atau empat kali Raker. Pada Raker terakhir, sebelum UU APBN disahkan, sebelum RUU APBN diajukan pemerintah ke DPR, Deptan diberi pagu definitif yang sudah tidak bisa ‘digoyang-goyang’ lagi. Kalaupun ada perubahan, itu masih di dalam pagu definitif itu sendiri, misalnya melalui diskusi Deptan dengan mitra kerjanya di DPR. “Mereka bisa berdebat, masing-masing membawa aspirasi daerah atau aspirasi nasional. Setelah digodok dan ditemukan titik temu maka jadilah RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga),” jelasnya.

Bahan itu selanjutnya dibahas di Departemen Keuangan. Depkeu merapikan program-program tersebut dari sisi administratif keuangan. Departemen Keuangan tidak bisa mengacak-acak lagi program kegiatan tersebut. “Komitmennya seperti itu.” Depkeu dan Deptan hanya membahas dari sisi akuntansi, mata anggaran kegiatannya, misalnya: Depkeu mengatakan ini bukan Tupoksi Anda. Tidak boleh Deptan misalnya mengurus subsidi. Sebab, ini domain Depkeu. “Maka itu dicoret diganti dengan yang lain, tapi dengan nilai yang sama. Atau dipecah menjadi kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan pembahasan kita saat Raker dengan DPR,” ungkap Hasanuddin.

Jadi semua anggaran program pembangunan pertanian harus

dengan persetujuan DPR. “Kita hanya membuat program kegiatan, lalu mengusulkan anggaran (budget) kepada DPR dan DPR-lah yang menentukan,” jelasnya. DPR bisa setuju atau tidak, mengatakan terlalu kecil atau terlalu besar. Itulah yang disebut politik anggaran. Misalnya Jawa terlalu besar, Sumatera kurang ini, dll. Itu semua domainnya DPR RI. Karena itu pemerintah harus mengusulkan anggaran yang logis.

Untuk pelaksanaannya, RKA-KL itu disahkan menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pengorganisasian manajemen pembangunan pun digulirkan. Dalam ilmu manajemen yang paling sederhana adalah menggunakan metode POAC (*Planing-Organizing-Actuating-Controling*). Setelah pengorganisasian dilakukan, lalu dijelaskan ke daerah-daerah. Misalnya yang ini harus tender, yang ini harus dilatih, dll. Setelah itu dilaksanakan tendernya, pelatihan, dll.

B. Monev Pemerintah

Kontrol (*controlling*) dari pemerintah dilakukan setelah program pembangunan pertanian dilaksanakan. “Kami juga melakukan pengawasan dan evaluasi,” tambah Sekjen Deptan. Evaluasi dimulai dengan membuat laporan-laporan, antara lain membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berdasarkan PP No.39, pemerintah diwajibkan membuat laporan yang disebut dengan Form C. Pada form ini misalnya disebutkan dalam triwulan ini berapa persen program yang terealisasi. Selain itu, ada monitoring dari data statistik dan laporan-laporan lainnya.

Salah satu data statistik yang bisa digunakan untuk monitoring dan evaluasi (monev) adalah data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga statistik milik pemerintah ini mengeluarkan data-data yang di antaranya berkaitan dengan kinerja pembangunan pertanian, di antaranya adalah data tentang produksi pertanian, PDB pertanian, ekspor-impor pertanian, dan nilai tukar

petani.

Pada 3 November 2008, BPS misalnya merilis Angka Ramalan III (ARAM III) 2008 produksi nasional padi, jagung dan kedelai. BPS memperkirakan produksi padi nasional 2008 akan mencapai 60,28 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik 5,46 persen dibanding angka produksi 2007. Lonjakan tajam terjadi di produksi jagung dan kedelai. Produksi jagung nasional diperkirakan mencapai 15,86 juta ton atau naik 19,36 persen dibanding capaian produksi tahun lalu. Sementara itu, produksi kedelai diperkirakan mencapai 761,21 ribu ton atau naik 28,47 persen dibanding capaian tahun lalu.

ARAM III 2008 adalah angka perkiraan produksi setahun dengan perhitungan realisasi panen antara periode Januari-Agustus 2008 ditambah ramalan produksi periode September – Desember 2008. Dari pengalaman sebelumnya, angka tetap (ATAP) biasanya lebih besar dari ARAM III maupun angka sementara (ASEM). Dengan ARAM I-III, ASEM dan ATAP itu, Deptan bisa melakukan sejumlah upaya untuk mencapai dan mengamankan target produksi pertanian nasional.

Tabel Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 2005 - 2008

Tahun	Padi	Kenaikan	Jagung	Kenaikan	Kedelai	Kenaikan
Produksi (Juta Ton)		(%)	(Juta ton)	(%)	(Ribu Ton)	(%)
2005	54,15	0,11	12,5	11,61	806	11,41
2006	54,45	0,55	11,6	-7,20	747,6	-7,25
2007	57,16	4,98	13,3	14,66	592,5	-20,75
2008*)	60,28	5,46	15,86	19,25	761,2	28,47

*) ARAM III BPS 2008

Sedangkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), BPS pada 14 Agustus 2008 melaporkan pada Semester I PDB pertanian tumbuh 5,3 persen. Pada semester yang sama, PDB sektor pertambangan dan penggalian minus 1,4 dan PDB sektor industri pengolahan tumbuh 4,1. Sedangkan, pada triwulan II 2008, sektor pertanian termasuk dua besar penghasil nilai tambah baru, yakni mencapai Rp 180,6 triliun atau 14,7 persen dari total PDB nasional yang mencapai Rp 1.230,9 triliun.

Bersamaan dengan tumbuh tingginya PDB pertanian tersebut, BPS juga melaporkan ekspor hasil pertanian pada periode Januari – Juni 2008 meningkat 50,13 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada 6 Oktober 2008, BPS kembali melaporkan ekspor hasil pertanian periode Januari–Agustus 2008 meningkat 44,01 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sampai Agustus 2008, nilai ekspor sektor pertanian meningkat dari 2.283,6 juta dolar menjadi 3.288,5 juta dolar.

Adapun untuk melakukan pengawasan secara langsung semua program pembangunan dengan jumlah pegawai Deptan sekarang ini menurut Sekjen Deptan tidak mungkin bisa dilakukan. Karena itu, wakil pemerintah di daerah yaitu gubernur dan aparatnya, diharapkan bisa membantu melakukan monitoring dan evaluasi di daerahnya masing-masing. Pengalaman selama ini, mungkin saja ada gubernur yang merekonstruksi program yang ada. Misalnya, “Pak, program ini *nggak* cocok dengan daerah ini”, dsb.

Selain itu, juga ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Pemeriksaan internal Deptan dilakukan dengan metode *sampling*, mengingat luasnya daerah Indonesia. Indonesia memiliki 440 kabupaten dengan satuan kerja (satker) 3.000 lebih.



C. Tantangan Di Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah di bidang pertanian sudah berjalan dan masih terus dievaluasi. Salah satu tantangan adanya otonomi daerah adalah munculnya institusi pertanian di daerah yang beragam dan berbeda dengan yang ada di pemerintah pusat. Beragamnya institusi pertanian di daerah ini mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian secara nasional. Selain itu, juga terasa adanya kelambanan arus pelaporan kegiatan program pembangunan dari daerah ke pusat. Juga ada persoalan berkaitan dengan kemampuan daerah yang beragam dalam membiayai pembangunan pertaniannya.

Salah satu hasil evaluasi yang dilakukan Deptan menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono adalah adanya keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) di daerah, khususnya di kabupaten. Dengan jumlah dan mutu SDM yang ada Pemda harus menangani sekian banyak program dari Departemen Pertanian.

Ke depan Deptan tengah mempertimbangkan untuk menyederhanakan program program pembangunan pertanian agar tidak terlalu banyak. Satu dinas di daerah misalnya bisa melayani beberapa departemen dan melayani beberapa eselon I. Bila dihitung untuk menjalankan program-program tersebut akan diperlukan banyak satker (satuan kerja/pejabat yang ditunjuk untuk menangani pencairan dan pertanggungjawaban anggaran). “Bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada,” tambah Anton Apriyantono. Padahal mereka juga punya program APBD, program pembangunan pertanian khas daerahnya sendiri.

Di samping penyederhanaan program, Deptan juga memberikan pembimbingan yang intensif ke daerah sampai sistem otonomi daerah ini bisa berjalan dengan baik.

Langkah lain yang perlu dilakukan dalam era otonomi daerah ini adalah pemerintah pusat akan memberikan supervisi dan monitoring. Di Deptan misalnya ada pejabat yang ditugasi bertanggung jawab untuk sepervisi dan monitoring per kabupaten. “Kita juga

sudah ada supervisi untuk realisasi program, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tapi ini akan kita lakukan terus,” kata Anton. Tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah pusat untuk juga memberikan bantuan dalam menyusun *grand strategy* dalam pembangunan pertanian di daerah.

Dalam hal pendanaan pembangunan pertanian di daerah, kemampuan daerah berbeda-beda. “Pada umumnya, dana tugas pembantuan di bidang pertanian yang ada di daerah dan dana alokasi khusus (DAK) itu relatif lebih besar yang dikucurkan dari pemerintah pusat ketimbang yang berasal dari APBD,” ungkap Hasanuddin Ibrahim.

Hal itu terjadi umumnya, APBD terkait dengan kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD (pendapatan asli daerah). Daerah yang kaya (kaya tambang dan banyak industri), cenderung besar PAD-nya. Sebaliknya daerah yang tidak punya cukup kekayaan tambang, PAD-nya umumnya rendah. Dan hasil analisa Deptan, sebagian besar kabupaten/kota belum mampu menyediakan anggaran yang cukup di bidang pertanian.

D. Tantangan di Era Globalisasi

Era globalisasi telah membawa semua negara untuk membuka pasar dalam negerinya. Di era ini, setiap produk pertanian mau tidak mau harus bersaing dengan produk-produk pertanian dari negara lain. Globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Ada banyak tantangan di era ini. Di antaranya Departemen Pertanian harus bisa meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan daya saingnya. Produk pertanian Indonesia akan bisa bersaing bila bisa diproduksi secara efisien dan ditingkatkan nilai tambahnya.

Kalau diteliti, produk-produk pertanian Indonesia menurut Mentan banyak yang bisa bersaing. Produk-produk perkebunan hampir seluruhnya kompetitif walaupun ada dinamika. Gula misal-

nya, termasuk produk perkebunan yang belum siap bersaing. Produk pangan, pada saat sekarang bisa kompetitif. Beras petani lebih murah bila dibandingkan harga beras internasional. “Kalau kita mau, bisa ekspor, hanya kita tahan, karena kita tidak ingin di dalam negeri kekurangan,” ungkap Mentan. Jagung pun bisa bersaing, hanya kedelai yang belum bisa bersaing.

Untuk produk-produk hortikultura tropis Mentan menilai memiliki *competitive advantage*. Produk-produk itu potensial untuk didorong masuk ke pasaran ekspor. Buah manggis dan salak misalnya sudah bisa masuk langsung ke Cina. Semula hanya bisa dijual ke Taiwan, dari sini baru masuk ke Cina.

Mentan tidak sependapat bila dikatakan Indonesia masuk dalam perangkap pangan (*food trap*) di era saat ini. Sebab, tidak ada satu bangsa pun di era global yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan segala jenis pangannya. Apalagi, lahan pangan yang dimiliki Indonesia tidaklah mungkin untuk menanam segala macam tanaman, termasuk untuk menanam tanaman subtropis seperti gandum.

“Kalau kita memahaminya secara utuh persoalan-persoalan itu, saya yakin kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa kita tidak perlu memenuhi segala macam kebutuhan pangan itu dari dalam negeri, karena tidak mungkin,” urainya.

Ada produk pertanian yang memang menjadi nilai tambah komparatif negara lain, seperti komoditi subtropis, gandum contohnya, lalu buah-buahan sub tropis, sayuran subtropis yang tidak bisa dicegah impornya. “Bukannya Indonesia tidak mampu untuk memproduksi sendiri, bisa saja, tapi bila dipaksakan akan mengalahkan yang lain. Misalnya kalau dipaksakan menanam gandum, maka kesempatan untuk menanam padi, singkong, sawit atau lainnya bisa berkurang,” papar Anton.

Karena itu di era sekarang ini, menurut Mentan kebijakan yang tepat adalah: *Pertama* kita harus bisa swasembada untuk pangan-pangan pokok. *Kedua*, pangan yang tidak pokok diminimalkan

impornya dengan substitusi dan juga dengan lebih menyukai produk-produk domestik, serta menggenjot ekspor produk pertanian.

Untuk kebutuhan pokok, Indonesia belum bisa memenuhi sendiri semuanya. Tapi produksi berbagai produk pangan nasional sudah berhasil ditingkatkan. Untuk beras sudah bisa swasembada. Jagung, tahun ini ada kemungkinan bisa dipenuhi dalam negeri. Gula untuk konsumsi sudah bisa dipenuhi dalam negeri, tinggal gula untuk industri yang masih impor. Daging sapi, Indonesia masih mengimpor 30 persen dari kebutuhan. Kedelai masih impor sekitar 40-60 persen dari kebutuhan. “Tapi daging ayam, telur, kita sudah. Kentang kita sudah mulai ekspor. Biji-bijian lain sudah bisa dicukupi dalam negeri, termasuk umbi-umbian singkong, kacang-kacangan, kacang tanah dan lain-lain,” tambah Mentan.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Prof Zaenal Bachruddin mengatakan agar kemampuan ekspor pertanian Indonesia berkelanjutan maka pendekatan pengelolaan pertanian harus agroindustri dari hulu sampai hilir. Di era ini, agroindustri yang dikembangkan memerlukan sentuhan teknologi dan finansial yang cukup. Dan pada saat yang sama perlu mengangkat kesejahteraan petani. “Untuk itu, yang perlu ditata adalah membangun kemitraan petani dan investor,” urainya.

Bukan hanya kemitraan, perlindungan kepada petani juga diperlukan, misalnya harga jual gabah atau beras petani. Dengan produksi padi yang terus meningkat, gejolak harga beras di pasaran dunia akan sangat berpengaruh pada kinerja produksi padi di dalam negeri. Ketika harga beras jatuh di pasaran dunia, maka bila tidak ada perlindungan harga beras di dalam negeri, beras impor akan kembali membanjiri pasar Indonesia. Pada sisi lain, agar produksi beras bisa terus dinaikkan, menurut Dirjen Tanaman Pangan, Ir Sutarto Alimoeso, perlu ada subsidi ekspor bila harga beras di luar negeri lebih murah.

Indonesia pun tidak bisa mengandalkan pangan pokoknya pada

misalnya rekayasa genetika. Teknologi dan produk bioteknologi sudah ada. Cuma penerapannya masih perlu ditimbang-timbang. Jangan sampai kalau misalnya benih hasil rekayasa genetika diijinkan sekarang- sekarang ini, terjadi penguasaan perdagangan benih hanya oleh sebagian kecil perusahaan multinasional.

“Bukan kita antiteknologi, tidak, riset kita untuk menghasilkan benih-benih unggul hasil rekayasa genetika tetap jalan, tapi belum kita ijin tanam rekayasa genetika untuk tujuan komersial karena pertimbangan sosial ekonomi atau kalau kita sudah siap bersaing dengan sehat. Sementara kita masih punya alternatif teknologi hibrida yang cukup bagus,” jelas Mentan.

Untuk peraturan yang terkait dengan produk biogenetik/rekayasa genetika menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Deptan Suprahtomo, SH MH MSi, sudah diperbolehkan. Posisi Indonesia dalam hal produk rekayasa genetika adalah membolehkan dengan pendekatan kehati-hatian. Di dunia ini ada tiga posisi negara terkait dengan produk ini: 1) negara yang menerima, 2) negara yang menolak, dan 3) negara yang menerima dengan kehati-hatian.

Kegundahan Mentan belum mengizinkan tanaman transgenik untuk keperluan komersial menurut Suprahtomo adalah sikap yang bijaksana. Dia mencontohkan sudah ada pengalaman Indonesia ketika menggunakan kapas transgenik Bt, yakni dipermasalahkan oleh 6 LSM besar di meja hijau. Namun akhirnya Deptan menang sampai kasasi, karena memang aturan sudah membolehkan.

Bioteknologi menurut Suprahtomo adalah suatu keniscayaan/kepastian. Sebab dunia tidak bertambah besar, tapi yang makan makin hari makin banyak. OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) juga semakin banyak. Selain itu, juga ada tuntutan konsumen pada kualitas produk pertanian. Untuk beras misalnya, konsumen menginginkan bukan hanya tinggi produksinya, tapi juga wangi dan pulen. Tuntutan-tuntutan ini bisa dipenuhi dengan bantuan bioteknologi.

Untuk diketahui, bioteknologi memang lebih unggul dibanding teknologi informasi. Sebab, sebaik-baiknya teknologi informasi tidak bisa menyimpan bau dan rasa. Tapi dengan bioteknologi, kita bisa menyimpan bau dan rasa.

Ke depan bioteknologi adalah peradaban tersendiri. Prof Sunaryati Hartono mengatakan perkembangan peradaban dunia bisa dibagi menjadi lima tahap. Tahapan pertama, nomaden. Pada peradaban ini manusia hanya membakar dan mengejar hewan atau mancing untuk dimakan. Dia berpindah-pindah hidupnya. Tahapan kedua, agraris, di era ini manusia sudah mulai menetap. Tahapan ketiga, industri yang mengolah bahan baku. Tahapan keempat, peradaban teknologi informasi, dan ini sudah terjadi. Tahapan kelima, peradaban bioteknologi. Di abad bioteknologi tersebut, bioteknologi bisa diabdikan untuk pangan, penyembuhan penyakit, tapi bisa juga untuk keperluan tindak kejahatan seperti pembuatan senjata biologi, anthrax misalnya. Benarkah akan demikian? Wallahu a'lam.



BAB V

KAPITA SELEKTA

“Rakyat sekarang ini tidak bisa dianggap bodoh, diatur-atur agar bisa ngomong sesuai dengan permintaan kita.”

(Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi)

Interaksi antara Departemen Pertanian (Deptan) dengan Komisi IV DPR RI kerap menyisakan kisah-kisah menarik di antara keduanya. Baik secara personal maupun kelembagaan. Kisah-kisah itu terkadang muncul saat rapat berlangsung, baik saat Raker (Rapat Kerja) Komisi IV dengan Menteri Pertanian, maupun saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pejabat eselon I Deptan. Begitupun saat mereka mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke daerah-daerah, baik untuk melakukan monitoring maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan yang telah ditetapkan, kerap ditemukan hal-hal menarik. “Orang-orang di Deptan itu *kecelek* (tertipu) dengan saya,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, HZ Arifin Junaidi. Apa maksudnya?

Berikut pengalaman menarik beberapa pejabat Deptan dan Komisi IV DPR.



HZ Arifin Junaidi

Ketua Komisi IV DPR RI

Fraksi Kebangkitan Bangsa

Saya selalu memisahkan tugas-tugas di Komisi IV dengan tugas-tugas di luar Komisi IV. Seringkali orang-orang Departemen Pertanian itu merasa terkaget-kaget dengan saya. Ketika rapat-rapat di ruang Komisi itu, mereka mengenal saya sebagai orang yang vokal, tapi di luar itu saya bisa bercanda. Saya memperoleh informasi bahwa orang-orang Departemen itu merasa *kecelek* dengan saya. Ketika saya terpilih sebagai ketua Komisi, mereka beranggapan, “Pak Arifin ini orangnya vokal dan keras, tapi ternyata ketika menjadi ketua Komisi, Pak Arifin itu ternyata lebih akomodatif.” Mereka merasa *surprise*. Informasi ini yang paling menarik bagi saya.

Dari kunjungan kerja ke berbagai daerah, saya juga menemukan banyak kisah menarik. Saya berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya banyak menemukan pelaksanaan program pembangunan di lapangan tidak sebagaimana yang dirancang di Senayan. Apa yang kami putuskan dalam rapat di Komisi IV ternyata sangat jauh berbeda dengan pelaksanaannya di daerah. Misalnya program bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Menurut ketentuan, setiap kepala keluarga (KK) memperoleh jatah 15 kilogram (kg). Setiap 1 kg harus ditebus seharga Rp 1.600.

Program Raskin ditujukan untuk 19,7 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Di suatu daerah, misalnya, kepala desa *nggak* mau ambil risiko diprotes oleh warganya sehingga Raskin dibagikan kepada seluruh warga. Akibatnya, setiap KK cuma memperoleh 4 kg. Bukan karena mereka *nggak* mampu menebus 15 kg, tapi itu kebijakan kepala desa: daripada diprotes atau didemo warga, akhirnya

disamaratakan.

Atau di daerah lain, 1 kg Raskin dijual Rp 2.000. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan itu semua menyalahi ketentuan. Di sini ada kearifan lokal: yang Rp 400 itu ternyata untuk transportasi, di mana kita di sini tidak pernah menghitungnya karena Rp 1.600 itu sudah termasuk transport termasuk di daerah *remote* atau daerah yang jauh. Jadi ternyata pelaksanaan satu program di lapangan itu bisa berbeda-beda.

Dan seringkali yang lebih menarik, rakyat sekarang ini tidak bisa dianggap bodoh, diatur-aturlah agar bisa *ngomong* sesuai dengan permintaan kita. Mereka bisa omong apa adanya yang bisa membuat merah telinga para pejabat. Jadi sekarang tidak bisa seperti dulu lagi. Kita seringkali sok pintar, padahal rakyat jauh lebih pintar.



Dr Ir Anton Apriyantono, MS

Menteri Pertanian

Kadang kadang secara personal ada juga satu, dua orang anggota Komisi IV yang menyakitkan [sembari tersenyum]. Tapi, ya sudahlah. Saya memahami saja bahwa itu sifatnya personal, dan saya ambil hikmahnya. Kadang-kadang memang ada yang *ngomongnya ngawur*, keterlaluhan. Namun secara umum mereka sportif. Kritiknya sebagian besar benar. Kami berterima kasih kepada mereka karena dengan cara begitu kami bisa memperbaiki apa-apa yang masih kurang.

Secara umum, hubungan kami dengan mereka baik. Kami sangat terbuka. Saya sering datang ke rumah mereka untuk silaturahmi.

[Sembari tertawa] kadang-kadang mereka 'bertengkar' sendiri.

Di antara mereka juga terjadi saling adu argumentasi. Lucu ya!

Pembahasan UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), dulu cukup seru dan alot. Begitu pula pembahasan program rekrutmen penyuluh dan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). Pembahasannya cukup lama.

Ada kekhawatiran di antara rekan-rekan di Komisi IV, bahwa program PUAP ini nanti dipolitisasi karena menjelang pemilu 2009. Namun setelah mereka mengetahui bahwa kami memang tulus dalam menjalankan program itu, kekhawatiran itu kini tak ada lagi. Malah ada yang berminat dan ingin berpartisipasi. Saya katakan *welcome* sepanjang memenuhi kriteria. Kami akan merasa terbantu kalau misalnya mereka juga ikut memilihkan desa sasaran. Ayo, kita kerjakan bersama-sama.

Sebagian kalangan mengatakan bahwa program PUAP ini merupakan program unggulan pada kondisi sekarang. Ini karena PUAP menyediakan pembiayaan, yang mana sekarang ini sulit mencari bantuan/pinjaman dari perbankan.

Ada 11 ribu desa menyediakan pembiayaan yang relatif ringan. Dari mereka untuk mereka. Walaupun per desanya tidak besar, tapi ini akan sangat membantu terutama untuk desa terpencil.



Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH, SE, MS
Anggota Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Golkar

Saat mengadakan kunjungan kerja ke daerah, saya banyak menemukan hal-hal menarik. *Pertama*, dengan adanya program revitalisasi pertanian, orang-orang membayangkan irigasi tambah bagus. Namun yang mereka temukan irigasi

ternyata tambah jelek. Dengan revitalisasi pertanian, infrastruktur pertanian seperti bendungan akan bertambah, yang lama menjadi baru. Tapi yang ada *kok* malah makin jelek.

Kedua, saya berasumsi pupuk bersubsidi itu ada di lapangan. Nyatanya, bukan hanya pupuk bersubsidi yang hilang, pupuk yang nonsubsidipun hilang di pasaran. Ini membuat petani sangat menderita. Saya berharap di masa mendatang pemerintah harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pupuk ini. Walaupun dari sisi lain bahan baku pupuk ini energi, tapi ke depan industri pupuk, pabrik pupuk, harus ditambah sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan jaminan sumberdaya energi yang tersedia tidak dijual murah seperti sekarang ini, hanya 3 dolar dalam 40 tahun.

Yang tak kalah penting adalah keluhan petani yang sulit memperoleh, misalnya, PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Penyebabnya, karena kurang pemanduan. Inilah pentingnya kita memperbesar anggaran untuk penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian idealnya ada di setiap desa. Keluhan-keluhan seperti ini ditemukan hampir di seluruh Indonesia.

Petani merindukan peningkatan produksi padinya. Karena itu begitu ada yang memperkenalkan padi super toy yang katanya produksinya tinggi, mereka ramai-ramai menanamnya. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang dikatakan. Ini tentu saja mengecewakan mereka.





Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, Sp.I
Sekjen Departemen Pertanian

Ini adalah tahun keempat kami berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI. Tentu ada suka duka. Pada tahun-tahun pertama kita memang belum mengenal medan. Teman-teman dari Komisi IV, terutama anggota-anggota Dewan yang masih baru, atau pertama kali menjadi anggota Dewan, baru belajar. Kadang-kadang kami melihat, karena baru taraf belajar, perundang-undangan belum dikuasai benar. Begitupun dengan pemerintah, kami juga baru menjabat. Peraturan perundangan belum kami kuasai semuanya. Karena itu kami kadang-kadang keluar dari peraturan, atau melanggar peraturan. Namun, *alhamdulillah* tidak ada yang fatal dan masih bisa dikembalikan ke jalur yang sebenarnya. Itu semata karena ketidaktahuan kami.

Di zaman reformasi ini ada eforia di kalangan teman-teman anggota DPR. Sehingga mereka menempatkan posisinya di atas pemerintah. Padahal berdasarkan UU, DPR itu mitra sejajar pemerintah. Meski begitu pemerintah sangat senang sebab kritik-kritik yang dilontarkan anggota Dewan itu walaupun pedas adalah kritik-kritik yang membangun. Hasil temuan mereka di lapangan memang harus kami tidak lanjut.

Dalam rapat kerja itu terjadi diskusi yang tidak seimbang. Jika seluruh anggota Komisi IV boleh bicara, maka di pihak pemerintah yang boleh bicara satu mulut saja, yaitu Menteri saja. Ini satu lawan berapa? Jadi kami dikeroyok. Tapi kita memang belum menemukan metodologi yang lebih baik.

Tahun kedua kita mulai saling memahami peran masing-masing.

Kita sudah mengetahui batas-batasnya. Kendati masih ada bagian yang tak tertangani, misalnya tugas Dewan untuk membuat UU, seringkali tercetus anggota Dewan itu bertanya kepada pemerintah: Mana UU tentang ini? Lho, yang bikin UU itu *kan* bukan pemerintah. Yang membuat UU itu DPR. Pemerintah itu namanya eksekutif. Artinya eksekutor, melaksanakan apa yang diinginkan Dewan. Mereka yang membuat UU dan mengatur. Tahun-tahun pertama itu yang terjadi. Pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi cetusan seperti itu.

Pada tahun-tahun pertama DPR itu tahunnya hanya fungsi anggaran. Fungsi pengawasan dan fungsi membuat UU kurang. Sekarang sudah bagus. Fungsi membuat UU dalam Badan Legislasi (Baleg) itu sudah mulai meningkat kinerjanya. Fungsi pengawasan juga mulai membaik. Teman-teman Komisi IV sudah mulai memahami betapa pentingnya fungsi pengawasan. Itu tidak kalah pentingnya dengan fungsi perencanaan anggaran program kegiatan. Pembuatan UU ternyata juga perlu. Dari tahun ke tahun pemahaman ini berkembang. Sampai tahun keempat ini saya melihat ada saling pengertian yang sangat mendalam.



Ny Hj Mahsusoh Ujiati

Anggota Komisi IV DPR RI

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Setiap kali saya mengadakan kunjungan ke daerah-daerah ada saja hal-hal menarik yang berkesan. Sekarang ini, dalam era keterbukaan, kita bisa menyampaikan apa adanya. Yang bisa kita lihat dan bisa dirasakan. Hasil-hasil te-

muan di lapangan itu saya sampaikan kepada Departemen Pertanian. Departemen menerimanya dengan bagus. Ada beberapa temuan yang ditindaklanjuti. Tapi ada juga yang tidak ditindaklanjuti meski kita bolak balik menyampaikannya.

Ada pula perubahan-perubahan definitif yang terjadi tanpa kita ketahui. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi di waktu-waktu yang akan datang.

Apapun, saya rasa kerjasama Komisi IV dengan Departemen Pertanian sudah cukup bagus. Bahkan dibanding dengan mitra-mitranya yang lain, hubungan Komisi IV dengan mitra kerjanya yang paling akrab, ya dengan Departemen Pertanian ini.

Hal yang juga sangat berkesan saat saya bertemu dengan petani. Dengan wajah berseri seri, mereka mengatakan terima kasih. “Bu, benihnya sudah kami terima.” Ada benih jagung, padi, dan kedelai. Petani yang selama ini tidak pernah menggugat, kini mereka tidak segan-segan bicara.

Atau ada petani menelepon saya. Dengan suara yang sangat riang ia mengatakan, “Matur suwun Bu, benihnya *sampun dateng*.” Seperti obat, saya senang sekali mendengarnya. Apa yang kami upayakan tidak sia-sia. Jadi tidak semua anggota DPR memiliki citra negatif sebagaimana yang selama ini banyak diberitakan di televisi.

Saya lebih senang menemui petani dan nelayan secara langsung. Kalau kunjungan ke perusahaan-perusahaan tidak terlalu. Sebab, mereka *kan* sudah pintar-pintar. Tanpa kami pun, mereka sudah bisa jalan. Modal cukup, teknologi cukup. Yang perlu itu menemui para petani.

Saya pernah menyerahkan bantuan traktor kepada kelompok tani di Ngawi, Jawa Timur. Bantuan itu diangkut dengan mobil bak. Waktu acara penyerahan bantuan diumumkan bahwa pemberian traktor akan diserahkan oleh Ibu Mahsusoh kepada kelompok tani. Saya lihat petani sangat senang. Saya juga senang.

Tapi tak semua kunjungan ke daerah itu menyenangkan. Yang

memprihatinkan, setiap tahun ada uang dari APBN untuk pembelian alat-alat pertanian. Saya penasaran, ke mana alat-alat pertanian itu. BPK pernah menemukan pengadaan barang-barang itu sudah ditenderkan tapi barangnya masih di rekanan. Mengapa ini sampai ditunda?



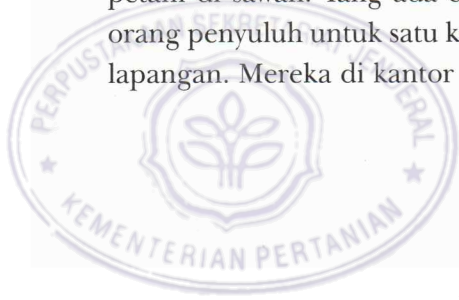
Drs H Mardjono, MM, PhD

Anggota Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan

Teman-teman di Departemen Pertanian itu berstatus birokrasi. Sedangkan kami di Komisi IV adalah politisi. Keduanya pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bicara soal teknis pertanian seperti bagaimana cara bercocok tanam, tapi kita bicara soal politik pertanian, sehingga kita saling mengisi.

Yang banyak ditemukan di lapangan: Petani dari dulu tetap miskin. Lahan pertanian sangat kurang, kalau hujan banjir, kalau kemarau kekeringan. Sarana pertanian sudah sangat rusak. Tak ada pembangunan irigasi belakangan ini. Perawatannyapun sangat tergantung kepada pemerintah. Pada waktu panen harga komoditi pertanian jatuh, saat menanam harga pupuk mahal. Itu semua dikeluhkan oleh petani.

Kalau bicara soal pertanian, petani seolah dibiarkan sendiri. Jarang sekali kami lihat ada pegawai pertanian yang mendampingi petani di sawah. Yang ada cuma penyuluh. Itupun baru saja. Satu orang penyuluh untuk satu kecamatan. Pegawai pertanian tak ada di lapangan. Mereka di kantor semua.





H Rusman HM Ali, SH

Anggota Komisi IV DPR RI

Fraksi Partai Bintang Reformasi

Kalau saya berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat petani atau nelayan, saya senang bukan main. Ini yang paling mengesankan buat saya. Contoh, Kalimantan Barat itu sangat terkenal dengan jeruk Pontianak. Hasil produksinya bagus, tapi kendala ada pada pemasaran.

Harga jeruk cenderung turun di saat produksi berlimpah. Sebaliknya kalau kita gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya sangat kecewa. Tugas DPR kan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Yang banyak ditemukan di lapangan, misalnya keluhan soal pemasaran jeruk dan percontakan sawah baru. Kadang-kadang irigasinya tidak ada. Masalahnya, jaringan sekunder itu ada di PU (Komisi V) sedangkan yang kecil-kecil, jaringan tersier ada di Deputan (Komisi IV). Terkadang kedua jaringan ini tidak bertemu. Deputan buat di sini, PU buat di sana. Tidak ketemu. Ini harus dipikirkan solusinya. Saya menyarankan agar dana-dana untuk pembangunan irigasi serahkan saja ke Deputan. Tapi memang sulit mengintegrasikan ini. Sebab, masing-masing ngotot dengan programnya.





Ir H Suswono, MMA

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Saya gembira manakala di lapangan menemukan program pembangunan sampai di masyarakat. Dan masyarakat meresponnya dengan baik. Mereka gembira memperoleh bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, kalau saya menemukan hak-hak masyarakat tidak sampai kepada mereka, karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari program itu, saya sedih. *Kok* ada oknum yang tega kepada petani dan nelayan yang sudah bekerja keras. Bantuan dari pemerintah tidak mereka terima. Bantuan diterima oleh orang lain, yang lalu menyewakannya kepada mereka. Sungguh menyedihkan! Aparat kita belum amanah. Tugas pemerintah untuk mengawasinya.

Saya selalau berdialog dengan petani. Mereka mengapresiasi program-program pembangunan yang didukung oleh Deptan. Petani puas. Harga gabah di atas HPP, produktivitas pertaniannya meningkat yang menyebabkan pendapatan mereka juga meningkat, dan mereka memperoleh bantuan untuk menghilangkan *loses*.

Deptan berhasil melaksanakan program-programnya dengan baik. Presiden mengatakan kita swasembada pangan. Saya optimis, Indonesia sebagai negara agraris masih bisa diandalkan.





Maruahal Silalahi

Anggota Komisi IV DPR RI
Fraksi Partai Demokrat

Anggota DPR memang harus kritis. Tapi harus tahu caranya. Menurut saya, dalam menyampaikan aspirasi jangan terlalu kasar. Jangan menyinggung perasaan. Saya, misalnya, menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Mentan dengan bahasa yang sudah saya olah. “Pak

Menteri, di kampung saya begini, begini.”

Tapi tak ada salahnya kita menyampaikan aspirasi dengan kalimat sesuai aslinya. Dengan kalimat seperti yang kita dengar langsung dari masyarakat. Kalau aspirasi itu benar, Menteri tidak akan tersinggung. Sebab, apapun ia akan cek ke lapangan. Tidak jarang saya pergi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Deptan ke lapangan. Tidak harus selalu dengan Menteri atau Dirjen, karena pekerjaan mereka banyak. Bisa juga dengan direktur. Tak jadi soal. Yang penting rakyat melihat saya mampu mendatangkan pejabat dari Deptan. Bukan soal siapa orangnya. Petani senang jika yang mereka tuntut langsung bisa diselesaikan.

Petani banyak yang menanyakan soal pupuk. Pupuk sulit didapat. Tapi saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sebab, pabrik pupuk kita memang belum mampu mencukupi kebutuhan petani. Saya salut dengan pemerintah SBY dan Mentannya, Pak Anton.





Prof Dr Ir Zaenal Bachrudin, MS

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian

Kami merespon temuan-temuan anggota Dewan untuk menuju kinerja yang lebih baik. Saya pernah diminta mengingatkan masalah terpal agar dilakukan monitoring dengan cermat dan waktu tender. Mereka ingin terlibat. Saya menyambut positif keinginan itu. Mereka ingin bersama-sama ke lapangan untuk bertemu dengan petani. Tak jadi soal sepanjang hal itu memenuhi syarat. Dengan kata lain, daerah-daerah yang kita beri program harus mempunyai persyaratan yang sesuai. Bahkan untuk LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) kita verifikasi di lapangan.

Program LM3 harus kita kawal. Mereka perlu didampingi. Memang ini membutuhkan biaya besar. Tak tak masalah, karena itu sangat menentukan keberhasilan LM3. Pengawasan tidak harus langsung oleh Deptan. Kita, misalnya, bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat atau dengan LSM.



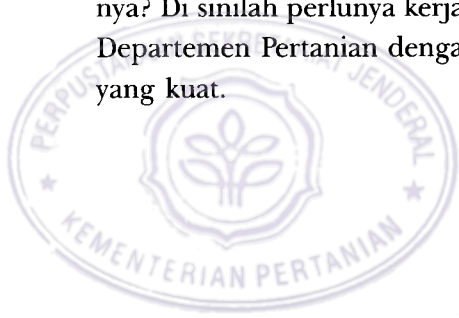
BAB VI

PENUTUP

“Hubungan Departemen Pertanian dengan Komisi IV sangat bagus. Tapi karena ada perbedaan posisi antara eksekutif dan kami di legislatif, maka ada saja perbedaan-perbedaan pandangan.”

(Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH,SE,MS)

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain: Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Temuan-temuan anggota DPR, baik yang mereka peroleh saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah maupun masukan dari masyarakat yang datang menyampaikan aspirasinya, akan disampaikan kepada pemerintah. Komisi IV tentu menyampaikannya ke Departemen yang menjadi mitra kerjanya. Misalnya kepada Departemen Pertanian. Bagaimana DPR menyampaikan hasil temuannya dan bagaimana Departemen Pertanian menindaklanjutinya? Di sinilah perlunya kerjasama dan hubungan yang baik antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV sehingga tercipta sinergi yang kuat.



Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, walau melalui proses yang panjang dan berliku, hubungan Deptan dengan Komisi IV DPR RI sangat baik. “Hubungan kita dengan DPR cukup *happy*. Mereka sangat mendukung program-program kita,” ujarnya.

Tujuan dari program-program Deptan, kata Menteri Pertanian, dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan. Membuat petani lebih sejahtera. Meski pihaknya tidak memiliki kepentingan (*vested interest*), tapi kadang-kadang muncul kecurigaan dari beberapa anggota DPR. Program perekrutan penyuluh pertanian, atau program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), misalnya dicurigai sebagai program partai. Tak jarang, program-program Departemen Pertanian dicurigai sebagai program partai, program bermuatan politik. Namun setelah Anton menjelaskan bahwa ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang bisa diikuti oleh siapa saja, barulah kecurigaan itu hilang.

Menurut Anton, untuk menghilangkan kecurigaan ini tak cukup hanya dengan pertemuan-pertemuan formal antara Deptan dengan Komisi IV. Tidak cukup hanya melalui Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tapi ada juga forum-forum silaturahmi, forum-forum informal yang dapat dimanfaatkan untuk membangun saling pengertian.

“Melalui pertemuan-pertemuan itu akhirnya mereka yakin bahwa kita bekerja dengan tulus. Bahwa program Deptan itu tidak mengandung unsur politik. Jika di lapangan ada yang memanfaatkannya, ya bisa saja. Tapi kita kan tidak menutup mata. Kita berusaha untuk menekan hal-hal itu. Yang terjadi malah semua ingin sama-sama memanfaatkan dalam arti tujuan yang baik. Kita sangat terbuka,” tandas Anton.

Lebih jauh ia menjelaskan langkah-langkah Deptan untuk meredam kecurigaan anggota Dewan. Pertama, program-program pembangunan memang dirancang untuk kepentingan masyarakat. Untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk

kepentingan politik atau golongan tertentu. Kedua, memberikan penjelasan kepada anggota Dewan. Tak hanya di forum-forum formal. Tapi juga informal, silaturahmi, dan pendekatan personal. “Saya kira itu sebagai hal yang lumrah di dalam proses bernegara,” ujar Mentan. Ketiga, kita buktikan di lapangan, bahwa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. “Alhamdulillah itulah kuncinya kenapa kemudian terjadi kerjasama dan sinergi yang baik antara Deptan dengan Komisi IV,” terang Anton.

Deptan, papar Anton, sangat akomodatif terhadap *concern* anggota Dewan. “Saya katakan sepanjang itu tidak melanggar aturan, ya kita akomodasi. Yang penting tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Sebab, tujuan itu bisa melalui jalan mana saja. Kita bertemu dan menghilangkan kecurigaan-kecurigaan. Akhirnya kita sepakat untuk bersama-sama,” papar Anton.

Walaupun demikian, ucap Anton, pihaknya tidak menutup sikap kritis dari DPR. Bahkan, ia berterima kasih atas segala kritik yang disampaikan oleh anggota Dewan. Sebab, kritikan itu akan dijadikan bahan untuk memperbaiki program-program pembangunan yang akan datang. Apalagi, pengawasan Deptan terhadap proyek-proyek pembangunan di daerah sangat terbatas. Dengan kata lain, Deptan membutuhkan bantuan pengawasan dari pihak lain, termasuk DPR. “Kita terbantu untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Juga untuk melihat kinerja program yang kita jalankan. Apakah program itu berjalan atau tidak!” ujar Mentan.

Ia merasakan, dukungan DPR itu bisa membantunya dalam menilai program-program pembangunan yang sedang berjalan. “Di mana kekurangannya, sampai *nggak* ke masyarakat. DPR ikut memantau itu. Kita tidak menutup mata, apapun yang kita lakukan tentu banyak hal yang harus disempurnakan, dan DPR sangat membantu kita,” katanya.

Sementara itu Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH,SE,MS dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, hubungan Deptan dengan Komisi IV



sangat bagus. Tapi karena ada perbedaan posisi antara eksekutif dan legislatif, maka ada saja perbedaan-perbedaan pandangan di antara mereka. Kadangkala rekan-rekannya di Komisi IV menempatkan diri sebagai oposisi. Kebijakan pemerintah dikritik habis-habisan. Dalam pengalokasian anggaran, misalnya, ia berpendapat anggaran untuk penyuluhan dan pembangunan infrastruktur pertanian seharusnya menjadi prioritas. “Tapi, ada anggota Dewan yang berpendapat berbeda.”

Perbedaan juga kerap muncul dalam memberikan pandangan terhadap program-program RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) yang sudah dipaparkan oleh Deptan. “Tapi, pro-kontra itu hal biasa,” ujar Bomer.

Drs H Mardjono, MM, PhD, menambahkan, hubungan Komisi IV dengan mitra kerjanya (Deptan), kadang-kadang bisa menjadi lawan tanding. “Ibarat main badminton, kita akan bermain bagus kalau lawannya juga bermain bagus. Kita harus tahu kapan kita kritis. Kapan kita harus *saklek*,” ujar anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Hal senada dikatakan Maruahal Silalahi. Menurut anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, sinergi antara Deptan dengan Komisi IV sangat bagus. “Menurut saya sih sudah bagus, tetapi bagi orang lain belum tentu,” paparnya. Namun yang pasti, katanya, antara Deptan dan Komisi IV harus saling membantu.

Kerjasama antara pemerintah dengan Dewan, menurut Sekjen Deptan Hasanuddin Ibrahim, semakin lama semakin baik. “Semoga di tahun kelima nanti kerjasama ini makin membaik lagi,” ujarnya.

Ia berharap, setelah pemilu 2009 nanti, Deptan dan Komisi IV tidak belajar dari nol lagi. Tapi melanjutkan kinerja yang sudah ada sekarang. Walaupun orangnya mungkin sudah berganti. “Mungkin saya tidak di sini lagi, anggota DPR yang sekarang juga mungkin berganti. Meski personil ini berganti, tapi kerjasama ini sudah menjadi sistem,” papar Hasanuddin.

Menurutnya, model sinergi antara Deptan dengan Komisi IV makin hari makin menemukan pola yang ideal. Pola yang terbaik untuk kepentingan petani dan peternak Indonesia. Sehingga pertanian itu makin hari makin maju. “Jika perlu Deptan dan Komisi IV berteriak sama-sama kalau komisi-komisi lain kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan pertanian. Kita demo sama-sama. Kompak dalam konotasi positif. Kompak untuk kepentingan pertanian, kompak untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Hasanuddin.



Lampiran-lampiran



REKAP ANGGARAN PER JENIS BELANJA APBN 2009 (Pagu Sementara)

NO	KODE/NAMA UNIT	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		MENGIKAT	TIDAK MENGIKAT	MENGIKAT	TIDAK MENGIKAT			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKJEN	49.097.756	-	69.807.765	228.761.209	107.533.396	1.118.800.000	1.574.000.126
	- Biro/Sam/Sekr	36.097.000	0	45.000.765	37.909.352	85.000.000	118.800.000	322.807.117
	- Pusat-pusat	13.000.756	0	24.807.000	65.750.000	20.533.396	0	124.091.152
	- PUAP	0	0	0	125.101.857	2.000.000	1.000.000.000	1.127.101.857
2	ITJEN	13.587.925	0	14.629.275	31.380.000	1.500.000	0	61.097.200
3	DITJEN TP	41.983.618	0	10.810.782	937.464.138	20.460.426	0	1.010.718.964
4	DITJEN HORTI	16.252.580	0	7.858.520	183.456.276	26.043.624	38.150.000	271.761.000
5	DITJEN BUN	61.780.578	0	12.557.066	206.677.897	34.079.576	135.096.525	450.191.642
6	DITJEN NAK	81.713.848	0	35.350.252	271.609.867	81.867.039	287.460.708	758.001.714
7	DITJEN PPHP	14.537.966	0	6.174.434	299.449.008	109.376.550	30.345.500	459.883.458
8	DITJEN PLA	11.403.305	0	7.530.420	153.454.789	131.834.630	647.245.559	951.468.703
9	BADAN LITBANG	414.171.000	0	66.427.900	326.474.771	52.385.232	0	859.458.903
10	BADAN PSDM	86.629.878	0	51.588.244	843.074.264	170.129.551	80.625.000	1.232.046.937
11	BADAN KP	14.036.000	0	4.953.000	190.365.343	3.957.007	210.677.650	423.989.000
12	BARANTAN	96.896.665	0	64.465.435	118.571.293	91.397.468	0	371.389.961
	TOTAL	902.091.119	0	352.153.093	3.790.738.855	830.564.499	2.548.400.942	8.424.007.608
	(%)	10.7	0	4.2	45	9.9	30.3	100

REKAP ANGGARAN PER SUMBER PEMBIAYAAN APBN 2009

NO	ESELON-1	BELANJA TIDAK MENGIKAT			BELANJA MENGIKAT			PNBP	JUMLAH
		NON PENDAMPING	PENDAMPING	PHLN	PEGAWAI	BARANG	JUMLAH		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SETJEN	1.423.717.288	2.000.000	11.367.057	49.097.755	84.607.106	133.704.861	3.210.920	1.574.000.126
2	ITJEN	34.543.459	0	0	13.587.925	12.965.816	26.553.741	0	61.097.200
3	DITJEN TP	957.962.800	0	0	41.983.618	10.616.382	52.600.000	148.464	1.010.718.964
4	DITJEN HORTI	247.341.040	0	0	16.252.580	8.135.880	24.388.460	0	271.761.000
5	DITJEN BUN	375.997.306	0	0	61.780.578	12.080.316	73.860.894	333.442	450.191.642
6	DITJEN NAK	623.802.500	0	12.500.000	81.713.848	35.350.252	117.064.100	4.635.114	758.001.714
7	DITJEN PPHP	439.258.418	0	0	14.537.966	6.083.474	20.621.440	0	459.883.458
8	DITJEN PLA	752.295.965	0	183.431.633	11.403.305	4.337.800	15.741.105	0	951.468.703
9	BADAN LITBANG	281.180.245	4.530.706	89.969.293	414.171.000	66.099.455	480.270.455	3.508.203	859.458.903
10	BADAN PSDM	718.464.000	37.313.000	342.711.890	86.629.878	45.847.995	132.477.873	1.080.174	1.232.046.937
11	BADAN KP	399.594.300	404.300	5.001.400	14.036.000	4.953.000	18.989.000	0	423.989.000
12	BARANTAN	191.050.867	0	0	96.955.765	63.845.868	160.801.633	19.537.461	371.389.961
	TOTAL	6.445.208.188	44.248.006	644.981.273	902.150.218	354.923.344	1.257.073.562	32.453.778	8.424.007.608

DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV DPR RI

NO	NO ANGGOTA	NAMA	JABATAN/FRAKSI
PIMPINAN			
1	194	H.Z. Arifin Junaidi	Ketua/F-KB
2	426	Drs H.M. Syarfi Hutauruk	Wk.Ketua/F-PG
3	377	Ir Mindo Sianipar	Wk.Ketua/F-PDIP
4	271	Ir H.Suswono,MMA	Wk.Ketua/F-PKS
5	9	Hilman Indra,SE,MBA	Wk.Ketua/F-PBPD
FRAKSI PARTAI GOLKAR			
6	428	Prof Dr(IPB)H Bomer Pasaribu,SH,SE,MS	Anggota/F-PG
7	433	H.Saleh Djasit,SH	Anggota/F-PG
8	434	H.Azwar Chesputra,SE	Anggota/F-PG
9	437	Drs H.Ismail Tajuddin	Anggota/F-PG
10	452	Dra Hj.S.Sumiyati	Anggota/F-PG
11	477	Drs Hj.Sri Harini	Anggota/F-PG
12	495	Dr H.M.Markum Singodimedjo	Anggota/F-PG
13	503	Drs H.Mohamad Aly Yahya	Anggota/F-PG
14	506	Gde Sumarjaya Linggih,SE	Anggota/F-PG
15	520	Drs Mukhtarudin	Anggota/F-PG
16	537	Drs H.M.Fachri Andi Leluasa	Anggota/F-PG
17	547	Robert Joppy Kardinal	Anggota/F-PG
FRAKSI PDI PERJUANGAN			
18	302	Dr H.Idham,SH,MKn	Anggota/F-PDIP
19	305	Dra Elviana, MSi	Anggota/F-PDIP
20	331	Drs H.M.Djoemad Tjiptowardojo,MBA,MM	Anggota/F-PDIP
21	349	Drs H.Mardjono,MM,PhD	Anggota/F-PDIP
22	352	Ganjar Pranowo	Anggota/F-PDIP
23	385	H.Wowo Ibrahim	Anggota/F-PDIP
24	388	Drs I Made Urip,MSi	Anggota/F-PDIP
25	403	Jacobus K.Mayongpadang	Anggota/F-PDIP

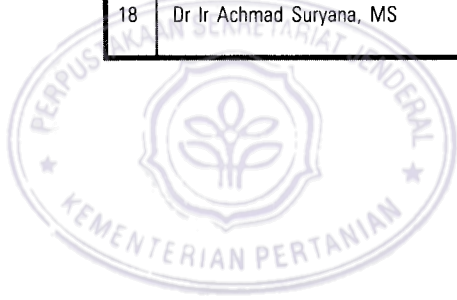
NO	NO ANGGOTA	NAMA	JABATAN/FRAKSI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT			
26	79	Maruahal Silalahi	Anggota/F-PD
27	84	Sarjan Tahir,SE,MM	Anggota/F-PD
28	91	Hj.Indria Octavia Muaja	Anggota/F-PD
29	108	Surya Supeno	Anggota/F-PD
30	122	Drs I Wayan Sugiana,MM	Anggota/F-PD
31	129	Nuraeni A.Barung	Anggota/F-PD
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
32	24	H.M.AI Amin Nur Nasution,SE	Anggota/F-PPP
33	32	H.Endang Kosasih,SE,MA	Anggota/F-PPP
34	43	H.M.Faqih Chaironi	Anggota/F-PPP
35	52	Ny.Hj.Mahsusoh Ujiati	Anggota/F-PPP
36	61	H.Rusnain Yahya	Anggota/F-PPP
37	64	H.M.Hifnie Sarkawie	Anggota/F-PPP
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL			
38	133	H.Imam Syuja',SE	Anggota/F-PAN
39	174	Darmajanto	Anggota/F-PAN
40	176	H.Nazamudin,SE,MM	Anggota/F-PAN
41	181	Nurhadi M.Musawir,SH,MM,MBA	Anggota/F-PAN
42	185	Sudjud Siradjudin, SH,MH	Anggota/F-PAN
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA			
43	189	Dr H.Ishartanto, SE,MMA	Anggota/F-KB
44	195	Drs Mufid A.Busyairi,MPD	Anggota/F-KB
45	231	Masduki Baidlowi	Anggota/F-KB
46	213	KH Ahmad Rawi	Anggota/F-KB
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera			
47	281	Tamsil Linrung	Anggota/F-PKS
48	256	Syamsu Hilal	Anggota/F-PKS
49	258	Drs H.Djalaluddin Asy-Syatibi	Anggota/F-PKS

NO	NO ANGGOTA	NAMA	JABATAN/FRAKSI
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI			
50	132	Joseph Wiliem Lea Wea	Anggota/F-BPD
FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI			
51	295	H.Rusman H.M.Ali,SH	Anggota/F-PBR
FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA			
52	419	Ir.Apri Hananto Sukandar,M.DIV	Anggota/F-PDS



DAFTAR NAMA PEJABAT DEPARTEMEN PERTANIAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr Ir Anton Apriyantono, MS	Menteri Pertanian
2	Dr Ir Abdul Munif, MSc.Agr	Sekretaris Menteri Pertanian
3	Dr Ir Kaman Nainggolan, MS	Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan Pertanian
4	Ir Mathur Riyadi, MA	Staf Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian
5	Ir Hj Emilia Yusnia Harahap, MM	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Luar Negeri
6	Dr Ir Iskandar Andi Nuhung	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi
7	Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, Spl	Sekretaris Jenderal
8	Dr Mulyanto, M.Eng	Inspektur Jenderal
9	Ir Sutarto Alimoeso, MM	Direktur Jenderal Tanaman Pangan
10	Dr Achmad Dimiyati, MS	Direktur Jenderal Hortikultura
11	Dr Ir Tjeppey Daradjatun Soejana, MSc	Direktur Jenderal Peternakan
12	Ir Achmad Mangga Barani, MM	Direktur Jenderal Perkebunan
13	Ir Hilman Manan, Dipl.HE	Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
14	Prof Dr Ir Zaenal Bachrudin, MS	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
15	Ir Syukur Iwantoro, MS	Kepala Badan Karantina Pertanian
16	Dr Ir Ato Suprpto	Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
17	Dr Ir Sumadjo Gatot Irianto	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
18	Dr Ir Achmad Suryana, MS	Kepala Badan Ketahanan Pangan



Tentang Penulis



Ir Rusdiono lahir di Jember, 7 September 1963. Setelah lulus dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (Fateta-IPB) tahun 1987, ia menjadi dosen. Namun profesi itu cuma dijalani tiga tahun saja. Pria berkaca mata ini lebih memilih dunia jurnalistik untuk lahan pengabdianya kepada masyarakat dan bangsa.

Berbagai media cetak, koran dan majalah, pernah ia tangani. Antara lain koran *Republika*, majalah *Kiblat*, majalah *Nebula* (ESQ), dan majalah *Gontor*. Selama 10 tahun ayah enam anak ini ikut membesarkan *Republika*. Mulai dari reporter hingga menduduki jabatan sebagai Koordinator Desk Tabloid dan Suplemen –jabatan setingkat wakil redaktur pelaksana. Mantan pelajar teladan Jawa Timur, 1981, ini antara lain membidani lahirnya tabloid *Dialog Jumat* dan suplemen *Pendidikan* –keduanya menjadi bacaan favorit pembaca *Republika* hingga saat ini. Juga membidani majalah *Nebula* dan majalah *Gontor*.

Sebagai reporter ia pernah meliput bidang pendidikan, agama,

ekonomi dan bisnis, iptek, kesehatan, kependudukan, kriminalitas, dan politik. Di bidang politik ia, misalnya, pernah ditugaskan meliput Sidang Umum MPR, dan *ngepos* di gedung DPR RI selama satu tahun.

Selain aneka liputan di dalam negeri, ia juga berkesempatan menjalani tugas jurnalistik ke mancanegara. Misalnya liputan TKI dan pariwisata di Korea Selatan, liputan haji dan umroh di Arab Saudi, liputan dialog antarumat beragama di Jerman, liputan pertemuan mahasiswa ASEAN/Jepang di Filipina, liputan seminar dan pameran di Singapura, dan liputan pendidikan sistem ganda di Jerman.

Redaktur Pelaksana majalah *Gontor* ini juga aktif menjadi penulis dan kontributor sejumlah buku. Selain itu ia kerap tampil sebagai *trainer* dalam pelatihan menulis dan pelatihan jurnalistik. Misalnya ia pernah melatih para mahasiswa IPB, Yayasan Pesantren Al-Azhar Jakarta, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok Modern Darul Qiyam Magelang, LP3I Tangerang, dan Pondok Modern Darunnajah Bogor.

Rusdiono bisa dihubungi di 0888-987-4706, 08159-7575-86 atau email rusdiono@yahoo.com atau rusdiono79@gmail.com.



Ahmad Soim lahir di Pati, 23 November 1968. Setelah lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Perikanan, Jurusan Budidaya Perairan (1992) ia langsung bekerja sebagai penulis.

Bapak lima anak ini antara lain telah menulis buku: *Pembesaran Kepiting* yang diterbitkan PT Penebar Swadaya (TRUBUS) yang sudah dicetak 6 kali, buku *Menjadi Petani Berdaya* yang dibiayai *Food and Agriculture Organization (FAO)* di proyek pemberdayaan petani kemitraan sawit dan karet rakyat, *Pertanian*

Tangguh yang ditulis bersama rekan sekerjanya dan diterbitkan Yayasan Pengembangan Sinar Tani, juga buku *Sukses Menjadi Penulis Pertanian dan Perikanan*, serta buku petani-petani luar biasa yang diterbitkan oleh Penerbit Sevenplan Publishing.

Teori dan keterampilan menulisnya antara lain diperoleh dari kursus di Lembaga Jurnalistik Mandiri (Lemjuri), pelatihan wartawan yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pelatihan Manajemen Pers Terpadu yang diselenggarakan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Ahmad Soim adalah peserta terbaik dalam pelatihan yang diselenggarakan SPS Pusat tersebut.

Semboyan Managing Editor Tabloid Sinar Tani ini adalah: *Menulis adalah pekerjaan/ Bekerja itu ibadah/ Menulis juga profesi yang mulia/ Dengan menulis kita membantu orang menambah ilmu meraih sukses*. Ia dapat dihubungi di 0812-8177-546 atau email ahmad_sbq@yahoo.com.



Hubungan Departemen Pertanian dengan Komisi IV DPR RI sangat baik walau melalui proses yang panjang. Proses yang berliku dan penuh dinamika. Namun semua itu demi menghadirkan program-program pembangunan di bidang pertanian yang mampu memperbaiki keadaan: Peningkatan kesejahteraan rakyat dan Pengurangan kemiskinan.

(Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS)

Antara Departemen Pertanian dengan Komisi IV tidak saja perlu sinergi, tapi bagaimana di antara keduanya bisa menciptakan simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan.

(Ketua Komisi IV DPR-RI HZ Arifin Junaidi)

Model sinergi antara Deptan dengan Komisi IV makin hari makin menemukan pola yang ideal. Pola yang terbaik untuk kepentingan petani dan peternak Indonesia. Sehingga pertanian kita makin hari makin maju.

(Sekjen Departemen Pertanian Dr Ir Hasanuddin Ibrahim, Spl)

Hubungan Departemen Pertanian dengan Komisi IV sangat bagus. Tapi karena ada perbedaan posisi antara eksekutif dan kami di legislatif, maka ada saja perbedaan-perbedaan pandangan.

(Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr H Bomer Pasaribu, SH,SE,MS)



Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian